



KANTOR
BUPATI

BOLAANG MONGONDOW



perkabolaangmongondow



bolamogkab

news |

bolamogkab



kominfo

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LP P D) TAHUN 2025



Yusra Alhabsyi
Bupati Bolaang Mogondow

Dony Lumenta
Wakil Bupati Bolaang Mogondow

BENDUNGAN LOLAK



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 memuat gambaran mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta berbagai kebijakan strategis yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun. Penyusunan laporan ini juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga legislatif, dunia usaha, maupun seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2025.

Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Lolak 27 Maret 2026
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YUSRA ALHABVI, S.E, M.Si



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.1.1 Undang-undang Pembentukan Daerah	1
1.1.1.2 Data Geografis Wilayah	3
1.1.1.3 Jumlah Penduduk	13
1.1.1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	15
1.1.1.5 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah dan Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	20
1.1.1.6 Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan di Setiap Perangkat Daerah	29
1.1.1.7 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	34
1.1.1.8 Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi	38
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	57
1.1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	57
1.1.2.1.1 Permasalahan Pembangunan	57
1.1.2.2 Visi Misi Kepala Daerah	66
1.1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	69
1.1.2.4 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	85
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	158
1.1.3.1.1 SPM Pendidikan	162
1.1.3.1.2 SPM Kesehatan	171
1.1.3.1.3 SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174
1.1.3.1.4 SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman	176
1.1.3.1.5 SPM Trantibum, Linmas	178
1.1.3.1.6 SPM Sosial	181



Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	188
2.1 Capaian Kinerja Makro	188
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	189
2.1.2 Angka Kemiskinan	191
2.1.3 Angka Pengangguran	192
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	193
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	196
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan	198
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	200
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	200
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	201
2.3.2 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	202
2.3.3 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	205
2.3.4 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	209
2.3.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai	212
2.3.6 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	303
Bab III : Capaian Kinerja Tugas Pembantuan	315
3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	316
3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerah	318
3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	319
3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten	319
3.3.1.1 Target Kinerja	319
3.3.1.2 Realisasi	320
3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang dilaksanakan oleh Kabupaten	322
3.3.3 Permasalahan dan Solusi	322
Bab IV : Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	324
4.1 Urusan Pendidikan	325
4.2 Urusan Kesehatan	330
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	337
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	340
4.5 Urusan Trantibum dan Linmas	344
4.6 Urusan Sosial	352
4.7 Program dan Kegiatan	356
Bab V : Penutup	366



**BAB
I**

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

1.1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Bolaang Mongondow dalam perjalannya secara yuridis dibentuk berdasarkan beberapa aturan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Namun dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi di atas masih didasarkan pada UUDS Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1957). Padahal, baik UUD Sementara Tahun 1950 maupun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1957 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat ini konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan agar masing masing daerah otomon diatur dalam undang-undang tersendiri (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Kemudian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang mendasari pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow masih bersifat administratif sehingga tidak memberi kerangka hukum pembangunan secara utuh sesuai potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman.

Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum dan pengaturan mengenai Kabupaten Bolaang Mongondow.



Selain itu, materi muatan yang umum untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai daerah otonom juga harus menjadi bagian dalam pengaturan mengenai Kabupaten Bolaang Mongondow, diantaranya pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, dan urusan pemerintahan daerah. Bahkan, pengaturan mengenai Kabupaten Bolaang Mongondow ke depan juga perlu memuat potensi dan karakteristik khas daerahnya namun itu belum termuat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Selain itu banyak materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi diantaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Untuk itu, sebuah Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow diperlukan agar dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat daerah ini didasarkan dan sesuai dengan arah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

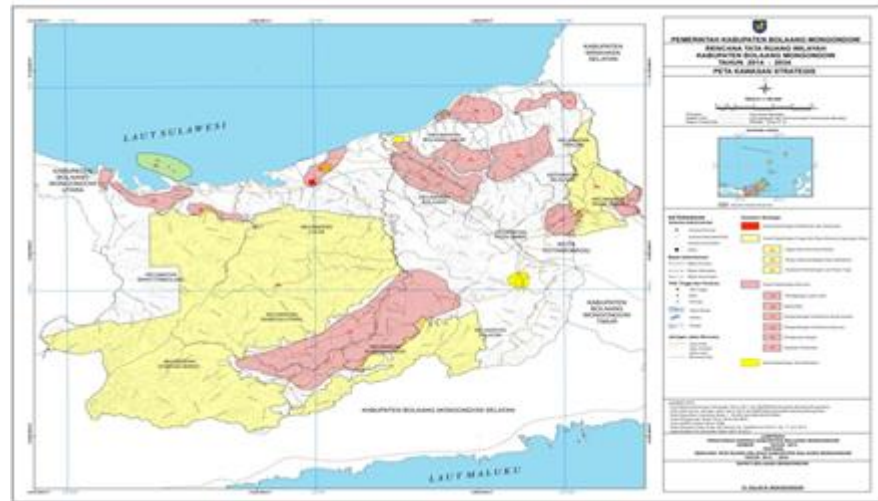
Maka dibutuhkan penyesuaian dengan menyusun Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara secara khusus agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengakomodasi potensi dan karakteristik daerah, perkembangan hukum, ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7126).



1.1.1.2 Data Geografis Wilayah

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow



Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Ibukota Lolak. secara Astronomis terletak pada posisi $00^{\circ} 15'46''$ - $00^{\circ} 15'38''$ Lintang Utara dan antara $123^{\circ} 07'26''$ - $124^{\circ} 41'46''$ Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kabupaten Bolaang Mongondow secara administratif terbagi kedalam 12 Kecamatan, kemudian diresmikannya 3 (tiga) Kecamatan baru pada akhir Tahun 2012 sehingga menjadi 15 (lima belas) Kecamatan dan 200 desa definitif, serta 2 Kelurahan hingga saat ini.

Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai data Badan Pusat Statistik pada Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2026 mencapai 2.382,53 km², berkurang dari data luas wilayah tahun 2025 sebesar 2.977,69 km² karena luas kecamatan Lolayan masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait. Selain itu dari data jumlah penduduk Tahun 2025 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai ± 258.561 jiwa.



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

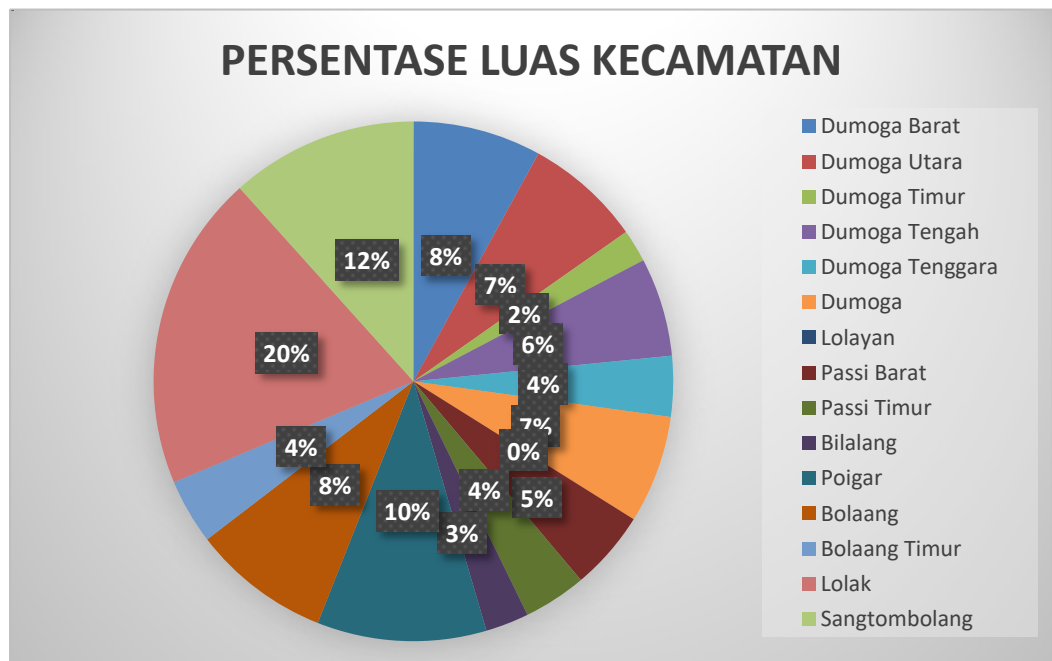
**TAHUN
2025**

**Tabel 1.1
Kecamatan dan Luas Wilayah**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ² /sq.km)	%
Dumoga Barat	Doloduo	190,40	6,49
Dumoga Utara	Mopuya Utara	173,00	5,89
Dumoga Timur	Modomang	48,40	1,65
Dumoga Tengah	Ibolian	146,30	4,99
Dumoga Tenggara	Konarom	89,83	3,13
Dumoga	Pusian	159,80	5,45
Lolayan	Tungoi	...*	...*
Passi Barat	Passi	117,90	4,02
Passi Timur	Pangian	93,30	3,18
Bilalang	Bilalang IV	64,30	2,19
Poigar	Poigar	251,00	8,56
Bolaang	Kelurahan Inobonto	204,70	6,98
Bolaang Timur	Tadoy	96,80	3,30
Lolak	Lolak	469,20	15,99
Sangtombolang	Maelang	277,60	9,46
Bolaang Mongondow	Lolak	2.382,53	81,28

Sumber : BPS 2026

**Gambar 1.2
Persentase Luas Wilayah Per Kecamatan**



Sumber: BPS 2026



➤ Kondisi Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Bolaang Mongondow cukup bervariasi dari daerah yang dataran rendah, bergelombang, berbukit serta bergunung dengan tingkat kemiringan antara 0% - 45% serta mempunyai ketinggian bervariasi pula antara 0 – 650 meter di atas permukaan laut. Sementara yang terendah atau ketinggiannya 0 - 2 meter dari permukaan laut umumnya terdapat pada kecamatan yang terletak disepanjang pesisir pantai utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Jalur gunung membentang dari timur ke barat pada bagian utara yang mengapit Dataran Dumoga dan Dataran Mongondow. Terdapat 5 gunung di Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana yang tertinggi adalah gunung Kabelat terletak di Kecamatan Lolak dengan ketinggian 1.732 meter, sedangkan yang terendah adalah gunung Kapaya terletak di Kecamatan Bolaang dengan ketinggian 1.331 meter.

Tabel 1.2

Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow

KECAMATAN	TINGGI WILAYAH (mdpl)	JARAK IBUKOTA KABUPATEN
Dumoga Barat	152	110
Dumoga Utara	147	87
Dumoga Timur	125	100
Dumoga Tengah	144	88
Dumoga Tenggara	148	89
Dumoga	152	79
Lolayan	182	62
Passi Barat	340	64
Passi Timur	547	67
Bilalang	387	69
Poigar	6	49
Bolaang	5	19
Bolaang Timur	3	21
Lolak	8	3
Sangtombolang	5	34

Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2026



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

➤ Kondisi Klimatologi

Kabupaten Bolaang Mongondow terletak pada lintasan garis Katulistiwa, sehingga hanya mengenal dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim hujan yang selalu basah dan banyak hujan sebagaimana umumnya wilayah tropis. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi per tahun dan suhu bervariasi antara 20°C – 32°C. Berdasarkan laporan curah hujan dinas pertanian kabupaten bolaang mongondow tahun 2025, total curah hujan 15 kecamatan mencapai 37.065,96 mm selama tahun 2025. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi dari pada Bulan Juni mencapai 5239,9 mm dan terendah pada Bulan september yaitu 1280,06 mm. Berikut tabel Curah Hujan yang terjadi selama tahun 2025 pada 15 kecamatan di kabupaten Bolaang Mongondow.



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

Tabel 1.3
Curah Hujan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Sepanjang Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	DUMOGA	246,7	199	56	252	88	296,7	268,5	843,4	68,4	201,7	269,2	94,5	2884,1
2	DUMOGA BARAT	220	172	348	334	55	512	173	180	10	37	157	158	2356
3	DUMOGA TIMUR	260,9	228,9	346,1	311,1	87,6	129,2	66,2	386,3	194,5	116,9	128,5	25	2281,2
4	DUMOGA TENGAH	370	230	289	263	93	386	529,6	540,2	220,5	130,7	276	258,2	3586,2
5	DUMOGA TENGGARA	345	167	348	324	85	454	228	309	228,5	174	147,6	171,6	2981,7
6	DUMOGA UTARA	473	209	270	279	214	156	175	281	86	188	158	68	2557
7	LOLAYAN	384,5	159	373	243,3	344,5	156	0	195	64	243	205,5	300	2667,8
8	PASSI BARAT	536,1	174,5	259,5	293,5	338	171	123	326	146	234	112	73,5	2787,1
9	PASSI TIMUR	610,5	182,8	314,6	416,3	314,9	141,5	166,3	22,5	160,9	215,7	376,8	340,9	3263,7
10	BILALANG	610,5	174,5	259,5	293,5	329	137,4	161	95,5	73,8	261,2	282,9	183,4	2862,2
11	POIGAR	329	367	1553,5	590,5	245,5	264	161	8	61	186,5	331	516	4613
12	BOLAANG	621,5	348,5	558,8	1435,5	437	468	108,5	0	68,5	200	229,7	433	4909
13	BOLAANG TIMUR	438,5	301,5	28	421	331,5	234,5	137	163	270	143,5	304,5	617,5	3390,5
14	LOLAK	552	382	438,5	388,5	334	219	164	133	143	102	274,5	529	3659,5
15	SANGTOMBOLANG	404,5	303,5	433	660,5	1008,5	212	125,5	168	285	162	277,5	92,5	4132,5
	TOTAL	6402,7	3599,2	5875,5	6505,7	4305,5	3937,3	2586,6	3650,9	2080,1	2596,2	3530,7	3861,1	48931,5

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow 2026



➤ Kondisi Geologi

Menurut hasil penelitian Kementerian ESDM (2004), bagian dari kawasan Indonesia Timur termasuk Bolaang Mongondow, secara geologi memiliki karakteristik yang lebih kompleks dan rumit bila dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat. Ini dikarenakan kawasan timur Indonesia merupakan pertemuan dari lempeng-lempeng litosfera : Eurasia yang relatif stabil di bagian barat laut, Lempeng Indo-Australia di bagian barat dan barat daya yang bergerak relatif ke timur laut, Lempeng Pasifik di bagian timur yang bergerak ke barat laut dan Lempeng Filipina Barat di bagian timur laut yang bergerak ke arah barat.

Gambar 1.3
Peta Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow



Sumber: RTRW Bolaang Mongondow, 2014-2034

Bagian timur laut Sulawesi merupakan akibat perputaran searah jarum jam dari lempeng kecil bagian barat daya Sulawesi dan Kalimantan pada masa lalu yang diikat pada bagian barat daya oleh sistem busur pada sesar-sesar mendatar mengiris, dan penolakan dasar laut Sulawesi di utara oleh adanya penujangan di Parit Sulawesi Utara.

Berdasarkan peta Geologi di atas Formasi Geologi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

Qal : Aluvium dan Endapan Pantai terdiri dari material berupa pasir, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

- Qav : Batuan Gunung Api Ambang yang terdiri dari material tuf; aglomerat, lahar lava dan endapan belerang didalam kawah, tuf berwarna kelabu muda, lava pejal, bersusunan hipersenten-hornblenda dan andesit hornblende. Gunung Api Ambang masih aktif, bebentuk strato dengan lima lapangan fumarola.
- Ql : Batu gamping Terumbu; Batu gamping terumbu terangkat dan batu gamping klastik dengan komponen utama koral, setempat berlapis.
- Qpl : Endapan Danau; satuan ini dikuasai oleh batu lempung kelabu, setempat mengandung sisa tumbuhan dan lignit. Batu pasir berbutir halus sampai kasar serta kerikil dijumpai di beberapa tempat. Satuan ini termampatkan lemah tebalnya menurut data bor mencapai 94 m.
- TQpv : Batuan Gunung api Pinogu; satuan ini terdiri atas Tuf, tuf lapili, breksi dan lava. Breksi gunung api di Pegunungan Bone, G. Mongadalia dan Pusian bersusunan andesit piroksin dan dasit. Tuf yang tersingkap di G. Lemimbut dan G. Lolombulan umumnya berbatu apung, kuning muda berbutir sedang sampai kasar, di selingi oleh lava bersusunan menengah sampai basa. Tuf dan Tuf Lapili di sekitar S. Bone bersusunan dasitan, Lava berwarna kelabu muda hingga kelabu tua, umumnya bersusun andesit piroksin. Satuan ini secara umum termampatkan lemah sampai sedang, umumnya diduga berumur Pliosen hingga Plistosen.
- QTs : Molasa Selebes merupakan endapan pasca orogen yang terbentuk di cekungan-cekungan kecil, terdiri atas konglomerat, breksi serta batupasir, umumnya termampatkan lemah. Konglomerat dan breksi tersusun oleh beranekan bahan komponen berupa kepingan andesit, basal, granit, granodiorit, batu gamping, batu pasir maupun kuarsa. Satuan ini menunjukkan kemiringan landai hingga 300, tebalnya mencapai beberapa puluh meter, dan berumur sekitar Pliosen-Plistosen.



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

- Tpww** : BREKSI WOBUDU : Brcksi gunung api, aglomerat, tuf, tuf lapili, dan lava. Breksi gunung api berwarna kelabu, tersusun oleh kepingan andesit dan basal berukuran kerikil sampai bongkah. Tuf dan tuf lapili berwarna kuning kecoklatan, berbutir halus sampai kerikil, umumnya lunak dan berlapis. Lava berwama kelabu. bersusunan andesit sampai basal. Satuan ini menindih tak selaras Formasi Dolokapa yang berumur Miosen Tengah hingga Plistosen Akhir. Tebal satuan sekitar 1000 - 1500 meter.
- Tmts** : Formasi Tapadaka terdiri dari Batupasir, grewake, batu pasir terkarsikan dan serpih. Batu pasir berwarna kelabu muda hingga tua dan hijau, berbutir halus sampai kasar, mengandung batuan gunungapi hijau dan serpih merah, setempat-setempat gampingan. Batu pasir yang tersingkap di S. Tapadaka mengandung urat kalsit 0,5 – 1 m. Grewake babutir lulus sampai lasar, bersudut sampai membulat tanggung, pejal, tersusun oleh plagioklas, augit. kuarsa, dan sedikit hematit dan magnetit. Batu pasir yang tersingkap di sebelah selatan Macia terkarsikan, hijau, kompak, mengandung feldspar scna sedikit pirit dan kalkopirit.
- Tmtl** : Anggota Batugamping Formasi Tapadaka: Batu gamping kelabu terang, pejal. mengandung pecahan batuan gunung api hijau. Batugamping ini sebagian membentuk lensa-lensa di dalam Formasi Tapadaka dan sebagian terlihat berganti fasies ke arah samping menjadi batupasir. Fosil-fosil yang dikandungnya adalah *Lepidocyclina* (*Eulepidina*) sp. Umur satuan ini diperkirakan Miosen Awal hingga Miosen Akhir.
- Tmbl** : Anggota Batu gamping Batuan Gunungapi Bilungala Batu gamping Tmbl kelabu mengandung fosil *Lepislocyclina sumatransis* (BRADY). Kumpulan fosil tersebut menunjukkan umur Miosen Awal - Miosen Akhir (Kadar. D.C. hubungan tertulis, 1972).
- Tets** : Formasi Tinombo Fasies Sedimen (Ahlburg. 1913) Satuan ini mengandung Serpih dan batupasir dengan sisipan batu gamping dan rijang. Serpih



kelabu dan merah, getas, sebagian gampingan; rijang mengandung radiobria. Batu pasir berupa greiwake dan batupasir kuarsa. kelabu dan hijau. pejal. berbutir halus sampai sedang. sebagian mengandung, pirit. Sisipan batugamping di S. Mayambak berwarna merah, pejal, berlapis baik. Satuan batuan ini diterobos oleh granit, diorit dan trakit seperti yang terlihat di S. Bayau. Satuan ini mempunyai hubungan menjemari dengan Formasi Tinombo fasies gunung api.

➤ **Kondisi Hidrologi**

Deretan gunung-gunung yang berada di kawasan Bolaang Mongondow membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS). Wilayah Sungai yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Wilayah sungai lintas provinsi Dumoga-Sangkub yang meliputi DAS Dumoga, Sangkub, Buyat, Lomboit, Andagile, Bulawa, dan Tuliawa; dan Wilayah sungai lintas kabupaten berupa rencana pengembangan WS Poigar - Ranoyapo yang meliputi DAS Poigar dan DAS Ranoyapo.

Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah CAT Lolak dan CAT Dumoga – Kosio yang merupakan CAT dalam 1 kabupaten dan CAT Sidate – Poigar yang merupakan CAT Lintas Propinsi. Jaringan terdiri atas:

- a. Bendungan, meliputi: Bendungan Torout dengan kapasitas $11,70 \text{ m}^3/\text{dtk}$ untuk pelayanan 7.803 ha, Bendung Kosinggolan dengan kapasitas $8,07 \text{ m}^3/\text{dtk}$ untuk pelayanan 5.381 ha, Bendungan Ayong – Maelang untuk pelayanan kurang lebih 2.293 ha, Bendungan Pusian – Molong untuk pelayanan kurang lebih 1.171 ha, Bendungan Lolak – Pinogaluman untuk pelayanan kurang lebih 2.040 ha, Bendungan Katulidan – Sinantakan di Bolaang Mongondow dan Kotamobagu untuk pelayanan kurang lebih 650 ha dan Bendungan Poigar untuk pelayanan kurang lebih 1.000 ha dan rencana pengembangan Bendungan Lolak dengan kapasitas kurang lebih $12.400.000 \text{ m}^3$ untuk pelayanan kurang lebih 2.500 ha;
- b. Daerah irigasi, meliputi: DI kewenangan nasional dan DI kewenangan propinsi yang ada di kabupaten, Saluran irigasi nasional, yaitu Saluran Irigasi Primer yang terdiri atas: Saluran Irigasi Primer Torout Kiri sepanjang kurang lebih



29,32 km; Saluran Irigasi Primer Torout Kanan sepanjang kurang lebih 4,56 km; dan Saluran Irigasi Primer Kosinggolan sepanjang kurang lebih 33,22 km.

c. Saluran irigasi propinsi, meliputi:

1. Saluran Irigasi Primer, meliputi: Saluran Irigasi Primer Torout Kanan sepanjang kurang lebih 4,56 km, Saluran Irigasi Primer Ayong – Maelang sepanjang kurang lebih 1,85 km, Saluran Irigasi Primer Pusian sepanjang kurang lebih 1,92 km, Saluran Irigasi Primer Lolak – Pinogaluman sepanjang kurang lebih 5,76 km, Saluran Irigasi Primer Katulidan – Sinantakan di Kotamobagu dan Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 0,768 km dan Saluran Irigasi Primer Poigar sepanjang kurang lebih 1,35 km; dan
2. Saluran irigasi sekunder, meliputi: Saluran Irigasi Sekunder Ayong - Maelang sepanjang kurang lebih 15,62 km, Saluran Irigasi Sekunder Pusian-Molong sepanjang kurang lebih 19,55 km, Saluran Irigasi Sekunder Lolak-Pinogaluman sepanjang kurang lebih 6,54 km, Saluran Irigasi Sekunder Katulidan-Sinantakan di Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu sepanjang kurang lebih 3,47 km, Saluran Irigasi Sekunder Poigar sepanjang kurang lebih 6,85 km, Saluran Irigasi Sekunder Torout sepanjang kurang lebih 37,405 km dan Saluran Irigasi Sekunder Kosinggolan sepanjang kurang lebih 14,594 km.

Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki 6 sungai, dengan sungai terpanjang yaitu sungai Dumoga, mengalir sepanjang 87,2 Km dan yang terpendek adalah sungai Moyosiboi dengan panjang 11,2 Km. Selain sungai, terdapat 3 Danau dimana yang terluas adalah danau Iloloi sebesar 52 Ha dan yang terkecil adalah danau Paya-paya sebesar 15 Ha.

➤ **Kondisi Geografis Lainnya**

Posisi Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan pintu masuk dan keluar dari wilayah Bolaang Mongondow bersatu menuju ibukota propinsi Sulawesi Utara. Ini merupakan posisi yang sangat strategis bagi pelaku bisnis dan investor. Selain berada tepat dijalur darat Koridor Sulawesi yang memiliki potensi dan mobilitas ekonomi yang tinggi, Kabupaten Bolaang Mongondow juga mempunyai jalur laut yang sedang berkembang dan akan terus ditingkatkan. Pelabuhan Laut Labuan Uki adalah Jalur Laut baru, ini adalah pintu masuk



dan keluarnya barang ke wilayah Bolaang Mongondow Bersatu, yang lebih dekat dibandingkan dengan Pelabuhan Laut Bitung. Dalam mendukung kedua bidang transportasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga membangun Terminal transportasi darat tipe A yang berfungsi mengumpulkan atau mendistribusikan arus transformasi dari dan kedua bidang transportasi tersebut diatas, maupun ke antar Kabupaten dan propinsi lainnya. Tinggi wilayah diatas permukaan laut (DPL) antar kecamatan sangat bervariasi. Kecamatan Poigar, Bolaang, Bolaang timur, Lolak dan Sang Tombolang rata-rata relatif hanya 0-20 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Passi Timur adalah kecamatan yang DPL-nya relative paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu setinggi 630 meter, diikuti dengan Kecamatan Bilalang dengan tinggi 500 meter diatas permukaan laut. Tinggi wilayah diatas permukaan laut setiap kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow menurut kecamatan ditunjukkan pada gambar dibawah ini. Kecamatan Passi Barat dan Kecamatan Lolayan memiliki rata-rata dpl masing-masing 450 dan 350 meter diatas permukaan laut. Untuk Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Dumoga Utara rata-rata mencapai 150 meter diatas permukaan laut. Ketiga wilayah kecamatan tersebut dikenal sebagai wilayah penghasil beras atau lumbung beras di Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.1.1.3 Jumlah Penduduk

Laju perkembangan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan rilis data yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow Pada tahun 2021 jumlah penduduk mencapai 252.011 jiwa, tahun 2022 menjadi 252.808 jiwa. jumlah penduduk naik signifikan tahun 2023 mencapai 254.945 Jiwa dan Tahun 2024 Menjadi 257.378 Jiwa. Sementara tahun 2025 naik hingga mencapai 258.561 jiwa. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow terus melakukan pembersihan data ganda dan data anomaly pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow selang beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Dan Sex Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow
2021-2025

TAHUN YEAR	LAKI-LAKI MALE	PEREMPUAN FEMALE	JUMLAH TOTAL	SEX RASIO
2021	131.335	120.676	252.011	108,83
2022	131.654	121.154	252.808	108,67
2023	132.717	122.228	254.945	108,58
2024	133.940	123.438	257.378	108,51
2025	134.496	124.065	258.561	108,41

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026

Hasil penghitungan rasio jenis kelamin yang berada di atas angka 100 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 108,41 berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 108–109 penduduk laki-laki.

Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow telah mencapai 258.561 jiwa. Kecamatan Lolak merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 34.382 jiwa atau 13,30 persen dari total penduduk, diikuti Kecamatan Lolayan sebesar 27.777 jiwa (10,74 persen), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Bilalang sebanyak 7.066 jiwa.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2025

NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK JENIS KELAMIN		
		(LK)	(PR)	(JML)
1	SANG TOMBOLANG	6.002	5.534	11.536
2	DUMOGA BARAT	9.636	8.943	18.579
3	DUMOGA TIMUR	11.287	10.500	21.787
4	DUMOGA UTARA	7.875	7.420	15.295
5	LOLAK	18.031	16.351	34.382
6	BOLAANG	11.215	10.273	21.488
7	LOLAYAN	14.454	13.323	27.777
8	PASSI BARAT	9.230	8.326	17.556
9	POIGAR	10.212	9.577	19.789
10	PASSI TIMUR	6.893	6.460	13.353
11	BOLAANG TIMUR	6.595	6.163	12.758



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

12	BILALANG	3.673	3.393	7.066
13	DUMOGA	8.291	7.524	15.815
14	DUMOGA TENGGARA	4.928	4.485	9.413
15	DUMOGA TENGAH	6.174	5.793	11.967
	BOLAANG MONGONDOW	134.496	124.065	258.561

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Kelompok Umur	Jumlah		
	L	P	Total
0 - 4	5812	5.595	11.407
05 - 09	9.951	9.564	19.515
10 - 14	10.710	9.756	20.466
15 - 19	11.537	10.581	22.118
20 - 24	12.305	11.444	23.749
25 - 29	11.384	10.281	21.665
30 - 34	10.612	9.178	19.970
35 - 39	8.087	7.365	15.452
40 - 49	19.406	17.792	37.198
50 - 59	17.903	16.327	34.230
>60	16.789	16.182	32.971

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, Kab. Bol-Mong, 2026

1.1.1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 15 Kecamatan dan 200 Desa dan 2 Kelurahan. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7
Jumlah Kecamatan dan Desa
Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Bilalang	1. Bilalang III 2. Bilalang IV 3. Tudu Aog 4. Tudu Aog baru 5. Kolingangaan 6. Bilalang III Utara 7. Bilalang Baru 8. Apado



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
2.	Bolaang	1. Komangaan 2. Solimandungan Baru 3. Solimandungan Dua 4. Solimandungan I 5. Bangomolunow 6. Langagon II 7. Langagon I 8. Langagon 9. Inobonto I 10. Inobonto 11. Inobonto II
3.	Dumoga Utara	1. Tumokang Baru 2. Mopugad Utara 3. Mopugad Selatan 4. Mopuya Utara 5. Mopuya Selatan 6. Dondomon 7. Mopugad Utara I 8. Mopugad Utara II 9. Mopugad Selatan I 10. Mopuya Utara I 11. Mopuya Utara II 12. Mopuya Selatan I 13. Mopuya Selatan II 14. Dondomon Utara 15. Dondomon Selatan 16. Tumokang Timur
4.	Passi Barat	1. Muntoi 2. Poyuyanan 3. Lobong 4. Passi 5. Bulud 6. Otam 7. Wangga 8. Inuai 9. Passi II 10. Muntoi Timur 11. Otam Barat 12. Wangga I 13. Bintau
5.	Dumoga Tenggara	1. Bonawang 2. Tapadaka I



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
		3. Tapadaka Utara 4. Tapadaka Timur 5. Konarom 6. Konarom Barat 7. Konarom Utara 8. Osion 9. Ikuna 10. Dumara
6.	Dumoga Timur	1. Tonom 2. Mogoyunggung 3. Modomang 4. Kembang Mertha 5. Dumoga 6. Pinonobatuan 7. Dumoga II 8. Pinonobatuan Barat 9. Amertha Sari 10. Kembang Sari 11. Amertha Buana 12. Mogoyunggung I 13. Moguyunggung II 14. Dumoga III 15. Dumoga IV
7.	Lolak	1. Totabuan 2. Pindol 3. Solog 4. Tandu 5. Lolak 6. Motabang 7. Mongkoinit 8. Labuan Uki 9. Pinogaluman 10. Sauk 11. Lalow 12. Buntalo 13. Bumbung 14. Baturapa 15. Tuyat 16. Pindolili 17. Lolak Tombolango 18. Lolak II 19. Buntalo Timur



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
		20. Buntalo Selatan 21. Baturapa II 22. Diat 23. Pinogaluman Timur 24. Mongkoinit Barat 25. Dulangon 26. Padang Lalow
8.	Passi Timur	1. Pangian 2. Poopo 3. Manembo 4. Insil 5. Mobuya 6. Insil Baru 7. Pangian Tengah 8. Pangian Barat 9. Poopo Barat 10. Poopo Selatan 11. Sinsingon Barat 12. Sinsingon Timur
9.	Lolayan	1. Tanoyan Selatan 2. Bombonan 3. Abak 4. Tapa Aog 5. Mopusi 6. Matali Baru 7. Bakan 8. Tungoi 9. Lolayan 10. Mopait 11. Kopandakan II 12. Tanoyan Utara 13. Tungoi 14. Mengkang
10.	Dumoga Tengah	1. Ibolian 2. Ibolian II 3. Kinomaligan 4. Kosio 5. Kosio Timur 6. Kosio Barat 7. Werdhi Agung 8. Werdhi Agung Selatan 9. Werdhi Agung Utara



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
		10. Werdhi Agung Timur
11.	Bolaang Timur	1. Ambang I 2. Ambang II 3. Tadoy 4. Bolaang 5. Bantik 6. Lolan 7. Tadoy I 8. Bolaang I 9. Lolan II
12.	Sang Tombolang	1. Ayong 2. Babo 3. Bolangat 4. Maelang 5. Domisil Moonow 6. Pangi 7. Lolanan 8. Cempaka 9. Batu Merah 10. Pangi Timur 11. Bolangat Timur 12. Pasir Putih
13.	Dumoga Barat	1. Matayangan 2. U'uan 3. Ikhwan 4. Doloduo 5. Wangga Baru 6. Toraut 7. Mekaruo 8. Toraut Utara 9. Doloduo I 10. Doloduo II 11. Doloduo III 12. Toraut Tengah
14.	Poigar	1. Mariri Lama 2. Mariri Baru 3. Nonapan II 4. Nonapan I 5. Wineru 6. Gogaluman 7. Poigar I 8. Nanasi



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
		9. Pomoman 10. Tiberias 11. Mondatong 12. Poigar II 13. Poigar III 14. Mariri II 15. Mariri I 16. Nonapan Baru 17. Nanasi Timur 18. Nonapan 19. Tanjung Mariri 20. Mondatong Baru
15.	Dumoga	1. Serasi 2. Kanaan 3. Toruakat 4. Pusian 5. Ponompiaan 6. Mototabian 7. Bumbungon 8. Siniung 9. Siniung I 10. Dumoga I 11. Pusian Selatan 12. Pusian Barat

1.1.1.5 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 berjumlah dari 47 Perangkat Daerah berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk rincian pada perangkat daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 1.8
Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah Serta
Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Dinas Pendidikan / - Satuan Pendidikan Formal: TK, SD, SMP - Satuan Pendidikan Non Formal: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2	Dinas Kesehatan / - UPTD Puskesmas - UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan - UPTD Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan - RSUD Datoe Binangkang	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - UPTD Peralatan Laboratorium	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - UPTD Rusunawa	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
7	Dinas Sosial	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
10	Dinas Ketahanan Pangan	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
11	Dinas Lingkungan Hidup - UPTD Laboratorium - UPTD Pengelolaan Sampah	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
15	Dinas Perhubungan - UPTD Terminal - UPTD Pengujian	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
21	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
23	Dinas Pertanian - UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura - UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak - UPTD Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
24	Dinas Perkebunan	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
25	Dinas Perdagangan dan ESDM - UPTD Metrologi	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
27	Badan Keuangan Daerah	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
28	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
29	Inspektorat Daerah	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
31	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Bagian Hukum - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bagian Administrasi Pembangunan - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Organisasi - Bagian Umum Setda - Bagian Perencanaan dan Keuangan - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
32	Sekretariat DPRD - Bagian Umum - Bagian Keuangan - Bagian Persidangan dan Risalah	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
33	Kantor Camat Lolayan	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
34	Kantor Camat Bilalang	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
35	Kantor Camat Passi Timur	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
36	Kantor Camat Passi Barat	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
37	Kantor Camat Poigar	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
38	Kantor Camat Bolaang / - Kantor Lurah Inobonto I	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
39	Kantor Camat Bolaang Timur	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
40	Kantor Camat Dumoga	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
41	Kantor Camat Dumoga Utara	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
42	Kantor Camat Dumoga Barat	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
43	Kantor Camat Dumoga Timur / - Kantor Lurah Imandi	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
44	Kantor Camat Dumoga Tenggara	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
45	Kantor Camat Dumoga Tengah	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
46	Kantor Camat Lolak	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
47	Kantor Camat Sang Tombolang	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

1.1.1.6 Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan di Setiap Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2025 sebanyak 5.473 orang (terdiri dari 3.377 orang PNS dan 2.096 orang PPPK), terdiri dari 375 orang pejabat struktural, 4.065 orang pejabat fungsional dan 1.033 orang staf pelaksana (sumber data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow) dengan rincian sebagai berikut:



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

**Tabel 1.9
Rincian ASN
Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2025**

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan / Fungsi Pengawasan / Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Dinas Pendidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	9	2643	148	2800
2	Dinas Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	22	1076	67	1195
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	8	24	63	95
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	7	3	11	21
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	5	5	23	33
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	13	20	31	64
7	Dinas Sosial	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	8	4	9	21
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	6	7	8	21
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	6	3	3	12
10	Dinas Ketahanan Pangan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	8	6	9	23
11	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	6	4	12	22
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	5	4	14	23
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	5	4	12	21



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan / Fungsi Pengawasan / Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	7	2	6	15
15	Dinas Perhubungan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	15	0	34	49
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	6	2	16	24
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	8	1	8	17
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	3	18	10	31
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	6	5	5	16
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	6	4	6	16
21	Dinas Perikanan	Urusan Pilihan	5	6	12	23
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Urusan Pilihan	5	1	7	13
23	Dinas Pertanian	Urusan Pilihan	13	119	26	158
24	Dinas Perkebunan	Urusan Pilihan	6	6	9	21
25	Dinas Perdagangan dan ESDM	Urusan Pilihan	7	3	23	33
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	7	10	14	31
27	Badan Keuangan Daerah	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	21	1	42	64
28	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	7	1	31	39



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan / Fungsi Pengawasan / Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
29	Inspektorat Daerah	Urusan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan daerah	7	44	9	60
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	5	6	10	21
31	Sekretariat Daerah	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	17	28	113	158
32	Sekretariat DPRD	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	5	5	46	56
33	Kantor Camat Lolayan	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	7	0	23	30
34	Kantor Camat Bilalang	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	6	0	13	19
35	Kantor Camat Passi Timur	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	8	0	26	34
36	Kantor Camat Passi Barat	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	8	0	19	27
37	Kantor Camat Poigar	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	8	0	10	18
38	Kantor Camat Bolaang	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	9	0	13	22
39	Kantor Camat Bolaang Timur	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	7	0	4	11
40	Kantor Camat Dumoga	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	8	0	10	18
41	Kantor Camat Dumoga Utara	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	8	0	6	14
42	Kantor Camat Dumoga Barat	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	7	0	8	15



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan / Fungsi Pengawasan / Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
43	Kantor Camat Dumoga Timur	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	10	0	6	16
44	Kantor Camat Dumoga Tenggara	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	7	0	5	12
45	Kantor Camat Dumoga Tengah	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	6	0	4	10
46	Kantor Camat Lolak	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	7	0	9	16
47	Kantor Camat Sang Tombolang	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan	5	0	10	15
	Jumlah Seluruhnya		375	4063	1035	5.473



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

1.1.1.7 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.10
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

PEMERINTAHAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1,160,389,264,041.60	1,156,102,906,144.11	99.63
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	76,932,298,552.85	78,367,609,139.11	101.86
Pajak Daerah	49,014,287,670.67	53,543,445,318.98	109.24
Retribusi Daerah	19,840,547,000.00	16,460,149,666.00	82.96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,743,236,233.00	3,643,236,233.00	97.32
Lain-lain PAD yang Sah	4,334,227,649.18	4,720,777,921.13	108.91
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	76,932,298,552.85	78,367,609,139.11	101.86



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

PENDAPATAN TRANSFER	1,072,269,349,902.00	1,067,995,706,493.00	99.60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,019,142,924,351.00	1,023,222,220,607.00	100.40
Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00
Dana Bagi Hasil (DBH)	123,251,448,000.00	140,292,549,600.00	113.82
Dana Alokasi Umum (DAU)	590,427,543,680.00	600,851,001,340.00	101.76
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	484,832,542,680.00	497,175,168,680.00	102.54
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	105,595,001,000.00	103,675,832,660.00	98.18
Dana Alokasi Khusus (DAK)	152,908,392,671.00	141,345,574,523.00	92.43
DAK Fisik	23,731,322,000.00	23,090,426,003.00	97.29
DAK Non Fisik	129,177,070,671.00	118,255,148,520.00	91.54
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	866,587,384,351.00	882,489,125,463.00	101.83
Dana Desa	152,555,540,000.00	140,733,095,144.00	92.25
Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	152,555,540,000.00	140,733,095,144.00	92.25
Pendapatan Transfer Antar Daerah	53,126,425,551.00	44,773,485,886.00	84.27
Pendapatan Bagi Hasil	51,126,425,551.00	44,773,485,886.00	87.57
Bantuan Keuangan	2,000,000,000.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	53,126,425,551.00	44,773,485,886.00	84.27
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1,072,269,349,902.00	1,067,995,706,493.00	99.60
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11,187,615,586.75	9,739,590,512.00	87.05
Pendapatan Hibah	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	100.00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10,097,615,586.75	8,649,590,512.00	85.65
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11,187,615,586.75	9,739,590,512.00	87.05
JUMLAH PENDAPATAN	1,160,389,264,041.60	1,156,102,906,144.11	99.63
BELANJA DAERAH	1,197,627,995,761.39	1,093,880,623,940.95	91.33
BELANJA OPERASI	824,361,944,145.43	749,808,701,945.95	90.95
Belanja Pegawai	522,177,176,647.88	486,910,895,170.00	93.24
Belanja Barang dan Jasa	286,074,213,547.55	247,097,098,682.95	86.37
Belanja Subsidi	233,250,000.00	225,250,000.00	96.57
Belanja Hibah	15,659,857,500.00	15,359,348,948.00	98.08
Belanja Bantuan Sosial	217,446,450.00	216,109,145.00	99.38
JUMLAH BELANJA OPERASI	824,361,944,145.43	749,808,701,945.95	90.95
BELANJA MODAL	135,172,050,732.96	118,083,060,226.00	87.35
Belanja Modal Tanah	25,200,000.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,040,538,101.25	35,811,328,903.00	91.72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,396,491,706.71	50,284,544,517.00	80.58
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32,762,293,390.00	31,060,903,631.00	94.80
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	887,527,535.00	866,620,675.00	97.64
Belanja Modal Aset Lainnya	60,000,000.00	59,662,500.00	99.43
JUMLAH BELANJA MODAL	135,172,050,732.96	118,083,060,226.00	87.35
BELANJA TIDAK TERDUGA	1,455,008,759.00	1,176,049,100.00	80.82
Belanja Tidak Terduga	1,455,008,759.00	1,176,049,100.00	80.82
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1,455,008,759.00	1,176,049,100.00	80.82



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

BELANJA TRANSFER	236,638,992,124.00	224,812,812,669.00	95.00
Belanja Bagi Hasil	6,945,148,424.00	6,941,413,825.00	99.94
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4,961,093,724.00	4,958,372,525.00	99.94
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1,984,054,700.00	1,983,041,300.00	99.94
Belanja Bantuan Keuangan	229,693,843,700.00	217,871,398,844.00	94.85
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	229,693,843,700.00	217,871,398,844.00	94.85
JUMLAH BELANJA TRANSFER	236,638,992,124.00	224,812,812,669.00	95.00
JUMLAH BELANJA	1,197,627,995,761.39	1,093,880,623,940.95	91.33
SURPLUS/DEFISIT	(37,238,731,719.79)	62,222,282,203.16	(167.09)
PEMBIAYAAN DAERAH	37,238,731,719.79	37,156,725,359.79	99.77
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37,238,731,719.79	37,156,725,359.79	99.77
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37,238,731,719.79	37,156,725,359.79	99.77
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37,238,731,719.79	37,156,725,359.79	99.77
PEMBIAYAAN NETTO	37,238,731,719.79	37,156,725,359.79	99.77
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	99,379,007,562.95	0.00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

1.1.1.8 Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

KAB. BOLAANG MONGONDOW

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN

BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	554.506.437.526,34	507.931.538.744,95	99.523.511.664,38	92.979.986.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	321.147.819.510,49	294.844.247.168,21	36.266.543.869,31	34.367.450.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Dinas Pendidikan	321.147.819.510,49	294.844.247.168,21	36.266.543.869,31	34.367.450.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	262.823.970.466,88	241.620.189.228,00	49.117.500,00	48.035.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.099.177.939,61	53.224.057.940,21	36.217.426.369,31	34.319.415.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	224.671.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	184.310.959.834,93	167.596.038.768,74	25.559.686.746,07	22.714.985.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Dinas Kesehatan	93.198.320.097,00	86.242.644.625,00	21.328.164.582,00	19.101.595.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.187.489.788,00	64.925.637.601,00	80.826.096,00	55.162.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	22.631.347.563,00	19.627.567.952,00	21.247.338.486,00	19.046.432.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.092.354.787,00	1.438.576.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	238.054.769,00	206.322.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	49.073.190,00	44.539.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Lolak	2.290.838.684,00	1.862.917.661,00	24.161.316,00	18.249.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.271.278.684,00	1.853.209.661,00	24.161.316,00	18.249.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.560.000,00	9.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Pusian	1.836.800.000,00	1.590.677.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.823.820.000,00	1.590.677.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Mopuya	2.516.886.320,00	2.127.600.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.504.226.320,00	2.116.540.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.660.000,00	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Passi Barat	1.603.738.900,00	1.345.910.921,00	41.105.100,00	37.407.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.597.555.700,00	1.345.910.921,00	41.105.100,00	37.407.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Pangian	1.630.599.690,75	1.237.476.233,00	12.400.337,25	12.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.623.579.690,75	1.237.476.233,00	12.400.337,25	12.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Imandi	2.009.827.216,18	1.589.730.343,96	4.121.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.003.567.216,18	1.589.730.343,96	4.121.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

1.02	Puskesmas Tungoi	1.221.736.522,00	1.038.446.038,00	3.407.478,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.217.011.522,00	1.038.446.038,00	3.407.478,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Poigar	2.357.444.025,00	1.966.433.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.341.190.025,00	1.966.433.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Tanoyan	1.373.843.275,00	1.270.042.474,00	8.200.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.369.039.275,00	1.265.284.474,00	8.200.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.804.000,00	4.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Doloduo	2.533.883.080,00	1.777.631.717,26	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.527.803.420,00	1.775.231.717,26	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.079.660,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Maelang	1.594.114.750,00	1.184.890.982,00	14.624.250,00	14.624.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.583.181.750,00	1.184.890.982,00	14.624.250,00	14.624.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Bilalang	1.074.487.166,00	743.401.301,00	13.093.056,00	12.349.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.067.942.166,00	738.211.301,00	13.093.056,00	12.349.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.545.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Buntalo	837.509.548,00	745.486.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	832.949.548,00	740.944.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.560.000,00	4.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Inobonto	1.386.043.024,00	1.175.400.564,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.377.943.024,00	1.169.400.564,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.100.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Komangaan	819.407.849,00	589.439.925,00	2.389.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	813.125.449,00	589.439.925,00	2.389.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Tadoy	1.160.567.548,00	848.608.050,00	11.932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.156.527.548,00	844.616.050,00	11.932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.040.000,00	3.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Werdhi Agung	1.162.586.985,00	998.132.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.162.586.985,00	998.132.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Puskesmas Konarom	1.107.800.015,00	612.228.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.103.536.815,00	612.228.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.263.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	UPTD Instalasi Farmasi	306.531.604,00	138.641.950,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.556.751,00	72.448.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	220.974.853,00	66.193.255,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

1.02	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	216.825.011,00	124.275.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.880.044,00	51.518.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	158.944.967,00	72.757.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	62.071.168.525,00	58.386.020.787,00	4.066.646.562,00	3.489.983.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.936.352.167,00	37.119.323.881,00	9.360.075,00	9.307.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.954.956.927,00	18.317.821.344,00	4.057.286.487,00	3.480.676.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.179.859.431,00	2.948.875.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21.564.323.049,00	19.495.899.582,00	35.368.384.779,00	34.664.880.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.564.323.049,00	19.495.899.582,00	35.368.384.779,00	34.664.880.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.733.517.104,00	8.377.888.057,00	5.729.731.389,00	5.250.627.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

1.03	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	773.582.026,00	741.096.336,00	1.664.817.500,00	1.625.731.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.743.342.493,00	2.497.354.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.000.920.255,00	3.000.276.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.770.080.083,00	4.671.473.970,00	27.973.835.890,00	27.788.521.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	59.858.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	383.022.598,00	207.810.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.859.778.813,00	11.229.988.657,00	626.633.250,00	385.445.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.859.778.813,00	11.229.988.657,00	626.633.250,00	385.445.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.183.141.476,00	2.895.678.172,00	626.633.250,00	385.445.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	123.081.416,00	109.162.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	986.949.589,00	963.212.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.563.081.424,00	7.259.420.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.524.908,00	2.515.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.447.489.965,92	10.775.056.193,00	1.321.400.126,00	494.631.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	6.730.310.262,00	6.522.405.079,00	624.725.865,00	207.315.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.490.904.739,00	6.284.742.004,00	624.725.865,00	207.315.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	170.731.395,00	169.768.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	68.674.128,00	67.894.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.680.710.388,92	4.218.463.328,00	563.427.752,00	162.165.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.360.562.579,46	3.052.462.977,00	563.427.752,00	162.165.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.320.147.809,46	1.166.000.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

1.05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.469.315,00	34.187.786,00	133.246.509,00	125.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.469.315,00	34.187.786,00	133.246.509,00	125.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.176.066.353,00	3.990.308.376,00	380.862.894,00	352.593.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Dinas Sosial	4.176.066.353,00	3.990.308.376,00	380.862.894,00	352.593.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.010.857.921,00	2.883.309.393,00	380.862.894,00	352.593.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	346.273.505,00	307.864.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	291.690.888,00	289.395.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	207.568.065,00	201.055.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	319.675.974,00	308.683.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	68.501.959.647,09	61.331.425.600,00	10.245.995.126,39	6.926.599.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.410.502.553,00	4.497.421.994,00	2.051.558.090,00	1.689.998.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.410.502.553,00	4.497.421.994,00	2.051.558.090,00	1.689.998.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.495.800.311,00	2.909.001.164,00	2.051.558.090,00	1.689.998.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	43.951.988,00	41.107.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	177.108.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.693.641.600,00	1.547.313.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.271.801.255,00	2.391.984.039,00	410.000.000,00	9.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.271.801.255,00	2.391.984.039,00	410.000.000,00	9.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.276.569.973,00	1.762.555.198,00	410.000.000,00	9.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	250.000.000,00	249.803.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	299.039.355,00	200.187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	214.437.927,00	55.288.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	231.754.000,00	124.149.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.955.434.762,00	3.826.413.284,00	37.537.168,00	33.970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Dinas Ketahanan Pangan	3.955.434.762,00	3.826.413.284,00	37.537.168,00	33.970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

2.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.984.283.162,00	2.897.311.930,00	37.537.168,00	33.970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	907.781.622,00	891.339.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	22.143.088,00	17.843.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	41.226.890,00	19.918.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4.020.582.285,00	3.638.360.297,00	3.854.613.322,00	2.243.872.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Dinas Lingkungan Hidup	4.020.582.285,00	3.638.360.297,00	3.854.613.322,00	2.243.872.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.538.219.789,00	2.372.882.924,00	564.613.322,00	549.299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	235.941.059,00	231.167.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	277.979.573,00	257.917.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	373.750.000,00	353.533.175,00	2.200.000.000,00	1.694.572.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	594.691.864,00	422.859.000,00	1.090.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.572.512.668,00	4.143.682.484,00	606.310.317,00	575.135.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.572.512.668,00	4.143.682.484,00	606.310.317,00	575.135.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.981.143.747,00	3.665.524.709,00	606.310.317,00	575.135.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	501.355.725,00	408.210.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	77.433.000,00	60.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	6.925.246,00	5.964.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.654.950,00	3.302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.408.090.883,00	7.661.468.395,00	56.275.890,00	55.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.408.090.883,00	7.661.468.395,00	56.275.890,00	55.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.613.242.436,00	2.302.414.263,00	56.275.890,00	55.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PROGRAM PENATAAN DESA	71.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.708.378.392,00	4.399.052.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	990.872.890,00	937.822.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.873.662.313,00	6.691.823.730,00	349.404.000,00	332.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.873.662.313,00	6.691.823.730,00	349.404.000,00	332.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.343.129.314,00	2.083.346.919,00	349.404.000,00	332.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	301.200.000,00	215.148.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.678.132.999,00	2.856.905.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.551.200.000,00	1.536.422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.443.708.476,50	10.341.851.797,00	568.688.727,00	551.910.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Dinas Perhubungan	11.443.708.476,50	10.341.851.797,00	568.688.727,00	551.910.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.180.045.911,50	5.615.056.524,00	166.228.827,00	150.704.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.263.662.565,00	4.726.795.273,00	402.459.900,00	401.205.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.739.118.860,00	6.276.700.223,00	515.851.356,93	492.243.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.739.118.860,00	6.276.700.223,00	515.851.356,93	492.243.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.853.376.713,00	2.584.460.591,00	475.037.468,34	474.708.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.743.697.397,00	1.563.834.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.142.044.750,00	2.128.405.000,00	40.813.888,59	17.535.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.373.578.126,00	2.229.934.290,00	444.347.618,00	42.451.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Dinas Koperasi dan UKM	2.373.578.126,00	2.229.934.290,00	444.347.618,00	42.451.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.283.903.274,00	2.145.108.190,00	444.347.618,00	42.451.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	24.165.015,00	23.758.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	38.864.994,00	35.834.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.599.787,00	6.407.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	20.045.056,00	18.825.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.849.742.177,59	3.551.002.561,00	83.459.996,46	80.183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.849.742.177,59	3.551.002.561,00	83.459.996,46	80.183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.577.190.315,99	3.308.417.842,00	83.459.996,46	80.183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	16.024.814,00	15.757.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	13.233.327,60	12.673.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	125.815.432,00	109.543.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	117.478.288,00	104.609.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.038.889.925,00	3.736.367.978,00	1.191.129.366,00	743.805.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.038.889.925,00	3.736.367.978,00	1.191.129.366,00	743.805.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.649.723.294,00	2.492.985.129,00	1.185.215.286,00	737.900.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	72.454.283,00	68.371.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.215.916.761,00	1.175.011.273,00	5.914.080,00	5.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.795.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	25.793.200,00	25.309.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.793.200,00	25.309.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.793.200,00	25.309.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	14.813.583,00	14.195.771,00	2.389.275,00	2.389.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.813.583,00	14.195.771,00	2.389.275,00	2.389.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	14.813.583,00	14.195.771,00	2.389.275,00	2.389.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	214.876.399,00	163.003.380,00	60.000.000,00	59.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	214.876.399,00	163.003.380,00	60.000.000,00	59.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	214.876.399,00	163.003.380,00	60.000.000,00	59.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.288.852.181,00	2.141.906.325,00	14.430.000,00	13.199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.288.852.181,00	2.141.906.325,00	14.430.000,00	13.199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.268.864.141,00	2.122.856.325,00	14.430.000,00	13.199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	19.988.040,00	19.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39.975.289.123,42	33.157.767.507,00	4.196.359.102,25	1.956.705.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.419.911.396,00	3.893.799.191,00	429.114.900,00	13.499.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

3.25	Dinas Perikanan	4.419.911.396,00	3.893.799.191,00	429.114.900,00	13.499.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.275.558.896,00	2.889.590.102,00	13.974.900,00	13.499.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	849.082.500,00	841.159.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	289.270.000,00	157.050.000,00	415.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.510.670.704,84	2.340.132.738,00	2.235.044.866,00	1.196.714.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.510.670.704,84	2.340.132.738,00	2.235.044.866,00	1.196.714.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.251.348.063,84	2.097.683.998,00	419.331.316,00	417.421.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	259.322.641,00	242.448.740,00	1.815.713.550,00	779.293.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	28.680.360.819,28	22.892.055.767,00	707.245.114,00	675.389.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Dinas Pertanian	17.498.244.245,28	14.266.189.138,00	617.093.023,00	590.179.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.347.969.042,40	12.709.091.000,00	617.093.023,00	590.179.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.748.380.229,55	63.608.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.569.477.096,03	877.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	9.442.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	99.681.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	723.293.375,50	616.139.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Dinas Perkebunan	11.182.116.574,00	8.625.866.629,00	90.152.091,00	85.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.520.928.698,00	2.263.826.397,00	90.152.091,00	85.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.263.303.221,00	251.022.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.218.541.970,00	5.952.668.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	161.202.085,00	146.508.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	18.140.600,00	11.840.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14.930.613,00	13.898.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	Dinas Perdagangan dan ESDM	14.930.613,00	13.898.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

3.29	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	14.930.613,00	13.898.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.815.595.114,94	3.575.958.534,00	628.215.841,00	71.101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Dinas Perdagangan dan ESDM	3.815.595.114,94	3.575.958.534,00	628.215.841,00	71.101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.507.199.614,06	3.290.009.643,00	47.061.558,00	45.154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	35.459.880,00	29.502.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	23.203.508,00	13.335.009,00	581.154.283,00	25.946.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	18.681.373,17	18.284.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	117.871.714,31	113.598.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	113.179.025,40	111.227.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	533.820.475,36	441.922.666,00	196.738.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	Dinas Perdagangan dan ESDM	533.820.475,36	441.922.666,00	196.738.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	494.858.523,21	411.602.982,00	196.738.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	38.961.952,15	30.319.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	76.621.778.347,94	70.315.721.162,00	15.665.670.164,44	13.880.320.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	42.772.441.781,94	38.530.353.563,00	8.105.006.004,44	6.418.791.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Bagian Tata Pemerintahan	441.006.971,00	437.549.115,00	211.460.000,00	198.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	441.006.971,00	437.549.115,00	211.460.000,00	198.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Bagian Hukum	890.744.999,00	792.313.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	890.744.999,00	792.313.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Bagian Pembangunan	419.062.843,00	386.967.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	419.062.843,00	386.967.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	725.320.770,00	713.580.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	725.320.770,00	713.580.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.438.527.067,00	3.161.069.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.438.527.067,00	3.161.069.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

4.01	Bagian Organisasi	449.203.680,00	353.962.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	449.203.680,00	353.962.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Bagian Perencanaan dan Keuangan	17.338.935.672,00	16.391.386.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.338.935.672,00	16.391.386.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.243.856,00	31.794.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Bagian Umum	15.896.427.202,28	13.393.316.964,00	7.893.546.004,44	6.220.355.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.896.427.202,28	13.393.316.964,00	7.893.546.004,44	6.220.355.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.760.329.918,00	2.490.706.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.760.329.918,00	2.490.706.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Bagian Perekonomian	412.882.659,66	409.502.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	412.882.659,66	409.502.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	33.849.336.566,00	31.785.367.599,00	7.560.664.160,00	7.461.529.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Sekretariat DPRD	33.849.336.566,00	31.785.367.599,00	7.560.664.160,00	7.461.529.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.647.006.640,50	20.233.392.104,00	7.560.664.160,00	7.461.529.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.202.329.925,50	11.551.975.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	28.569.495.088,64	26.191.211.258,00	3.582.540.517,00	1.289.466.497,00	1.455.008.759,00	1.176.049.100,00	236.638.992.124,00	224.812.812.669,00
5.01	PERENCANAAN	6.483.436.178,60	6.082.626.359,00	211.629.800,00	208.925.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.483.436.178,60	6.082.626.359,00	211.629.800,00	208.925.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.020.353.290,00	4.719.585.433,00	211.629.800,00	208.925.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	631.030.722,60	600.065.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	832.052.166,00	762.975.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	15.782.539.255,04	14.901.626.815,00	3.274.851.317,00	985.840.498,00	1.455.008.759,00	1.176.049.100,00	236.638.992.124,00	224.812.812.669,00
5.02	Badan Keuangan Daerah	15.782.539.255,04	14.901.626.815,00	3.274.851.317,00	985.840.498,00	1.455.008.759,00	1.176.049.100,00	236.638.992.124,00	224.812.812.669,00
5.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.180.151.442,04	10.388.113.706,00	1.274.851.317,00	985.840.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.354.707.152,00	2.335.020.707,00	0,00	0,00	1.455.008.759,00	1.176.049.100,00	236.638.992.124,00	224.812.812.669,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

5.02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.074.875.716,00	1.071.137.562,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.172.804.945,00	1.107.354.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	5.991.023.419,00	4.924.439.548,00	96.059.400,00	94.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.991.023.419,00	4.924.439.548,00	96.059.400,00	94.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.163.074.763,00	3.787.393.264,00	96.059.400,00	94.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.827.948.656,00	1.137.046.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	46.211.354,00	34.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	46.211.354,00	34.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	46.211.354,00	34.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	266.284.882,00	248.275.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	266.284.882,00	248.275.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	266.284.882,00	248.275.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.184.895.156,00	9.798.868.931,00	897.573.417,00	399.770.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	13.184.895.156,00	9.798.868.931,00	897.573.417,00	399.770.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Inspektorat Daerah	13.184.895.156,00	9.798.868.931,00	897.573.417,00	399.770.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.487.895.769,00	8.193.275.414,00	897.573.417,00	399.770.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.456.821.297,00	1.605.593.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	240.178.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	31.928.678.043,00	30.080.774.465,00	650.400.741,50	623.166.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN	31.928.678.043,00	30.080.774.465,00	650.400.741,50	623.166.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Sang Tombolang	1.721.966.837,50	1.590.854.944,00	20.973.187,50	20.646.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.704.234.237,50	1.573.122.344,00	20.973.187,50	20.646.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.732.600,00	17.732.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Dumoga Timur	2.435.417.904,00	2.314.206.094,00	253.392.387,50	251.376.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.940.742.632,00	1.824.647.594,00	53.392.387,50	51.669.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	484.087.392,00	479.950.500,00	200.000.000,00	199.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.587.880,00	9.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Dumoga Barat	1.831.004.267,00	1.726.034.519,00	29.415.000,00	28.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.819.088.267,00	1.714.184.519,00	29.415.000,00	28.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.916.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Bilalang	2.196.336.650,00	2.114.338.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.175.782.820,00	2.098.455.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.553.830,00	15.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Dumoga	1.804.441.223,00	1.657.836.367,00	9.657.000,00	9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.790.100.467,00	1.643.849.767,00	9.657.000,00	9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.340.756,00	13.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Dumoga Tengah	1.470.509.343,00	1.389.302.319,00	16.317.000,00	15.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.452.370.099,00	1.371.702.419,00	16.317.000,00	15.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.139.244,00	17.599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Dumoga Tenggara	1.473.027.513,00	1.394.196.863,00	7.215.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.462.551.813,00	1.383.821.863,00	7.215.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.475.700,00	10.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Bolaang Timur	1.413.071.496,00	1.337.732.244,00	16.405.800,00	15.848.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.403.072.346,00	1.328.186.244,00	16.405.800,00	15.848.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.999.150,00	9.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Poigar	1.949.220.926,00	1.831.953.345,00	7.215.000,00	7.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.934.117.156,00	1.817.718.345,00	7.215.000,00	7.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.103.770,00	14.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Lolayan	2.990.165.252,00	2.869.336.625,00	2.775.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.973.100.552,00	2.853.536.625,00	2.775.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.064.700,00	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Bolaang	3.061.349.086,00	2.715.954.695,00	215.683.332,00	199.276.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.551.166.711,00	2.217.663.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	494.692.456,00	488.744.600,00	215.683.332,00	199.276.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.489.919,00	9.546.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Dumoga Utara	1.794.253.596,50	1.699.285.728,00	19.243.861,50	18.048.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.777.062.624,50	1.682.240.528,00	19.243.861,50	18.048.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.190.972,00	17.045.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Lolak	1.569.633.723,00	1.518.705.049,00	7.215.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.534.247.589,00	1.483.774.694,00	7.215.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.386.134,00	34.930.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Passi Timur	3.085.134.744,00	2.960.975.541,00	24.205.548,00	22.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.057.278.444,00	2.933.185.541,00	24.205.548,00	22.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.856.300,00	27.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Passi Barat	3.133.145.482,00	2.960.061.431,00	20.687.625,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.116.895.482,00	2.943.811.431,00	20.687.625,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.073.411.213,00	10.849.498.278,00	410.000.000,00	9.970.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.073.411.213,00	10.849.498.278,00	410.000.000,00	9.970.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.073.411.213,00	10.849.498.278,00	410.000.000,00	9.970.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

8.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.686.056.140,00	2.595.035.300,00	410.000.000,00	9.970.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.293.012.573,00	1.248.951.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6.416.842.500,00	6.366.986.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	677.500.000,00	638.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	824.361.944.145,43	749.656.805.945,95	135.172.050.732,96	118.065.986.226,00	1.455.008.759,00	1.176.049.100,00	236.638.992.124,00	224.812.812.669,00



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1.2.1 Permasalahan Startegis Pemerintah Daerah

1.1.2.1.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Bolaang Mongondow pada masing-masing urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Aspek Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar. Pada aspek ini masyarakat berhak mendapatkan kebutuhan dasar dilayani dan difasilitasi Pemda agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Beberapa permasalahan pembangunan teridentifikasi dari aspek pelayanan dasar dan kesejahteraan:



a. Pendidikan

- Masih Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai bagian dari angka perbandingan antara banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang Pendidikan tertentu yang sekolah pada jenjang Pendidikan tersebut dengan banyaknya pendudukan usia sekolah pada jenjang yang sama. Hal ini bisa dilihat pada data APM Tingkat SMP yang hanya mencapai 85,93 persen dan SMA/SMK/Sederajat yang hanya mencapai 55,83 persen sesuai data BPS dalam Buku Bolmong dalam angka 2026.
- Kualitas kelulusan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan dilihat dari masih rendahnya rata-rata lama sekolah tahun 2025 yang hanya mencapai 8,49 dan harapan lama sekolah yang hanya mencapai 11,82.
- Masih ditemukannya kasus putus sekolah pada anak.
- Masih ada tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidik sesuai standar.

b. Kesehatan

- Belum optimalnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan penurunan stunting dengan masih adanya kasus stunting.
- Masih ditemukannya kasus kematian ibu.
- Pelayanan Kesehatan bermutu belum sepenuhnya diperoleh masyarakat.
- Masih Tingginya angka kematian bayi.
- Belum optimalnya implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga.
- Masih banyak penduduk yang belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak balita.
- Belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan.



c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih rendahnya kondisi jalan mantap yang terbangun.
- Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi. Di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 75 Daerah Irigasi (DI) dengan luas area 9.059 Ha, dimana 54,29% kondisi baik; 10,00% Sedang, 15,71% rusak ringan, dan rusak berat 20,00%.
- Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- Belum optimalnya penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah
- Kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi masih perlu ditingkatkan.
- Masih perlunya peningkatan penataan bangunan dan lingkungannya.
- Belum semua wilayah bebas banjir.
- Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum terdatanya capaian kinerja standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- Belum tuntasnya pemukiman kumuh didalam dan diluar Kawasan pemukiman kumuh.
- Perlunya pendataan yang rumah yang dilaksanakan setiap tahun.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Belum optimalnya upaya penegakan perundang-undangan daerah
- Rendahnya tingkat sosialisasi kebencanaan yang dilakukan terhadap masyarakat.



f. Sosial

- Belum terintegrasi dan terimplementasikannya target-target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja indikator SPM bidang social
- Belum optimalnya penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Pemberian bantuan sosial untuk kebutuhan dasar PMKS/PPKS masih rendah.
- Rendahnya penyandang disabilitas baik fisik maupun mental, serta lanjut usia terlantar (LUT) tidak potensial yang memperoleh jaminan sosial.

2. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

- Penurunan Tingkat pengangguran terbuka belum optimal.
- Belum optimalnya penempatan tenaga kerja.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Menurunnya partisipasi Perempuan di sektor pemerintahan.
- Meningkatnya jumlah pernikahan usia anak.
- Masih rendahnya Lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender.

c. Pangan

- Belum Optimalnya skor pola pangan harapan (PPH).
- Rasio Ketersediaan pangan masih rendah.

d. Pertanahan

- Masih rendahnya luasan lahan yang bersertifikat.



e. Lingkungan Hidup

- Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup begitu juga dengan capaian Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan yang hasilnya belum optimal.
- Belum optimalnya pengelolaan sampah.
- Belum optimalnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum semua penduduk umur 0-17 tahun memiliki KIA

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Rendahnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.
- Belum optimalnya badan usaha milik desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa.
- Rendahnya Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD).

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Rendahnya cakupan pria berKB.
- Cakupan pengendalian penduduk belum optimal.

i. Perhubungan

- Rendahnya ketersediaan halte angkutan umum.
- Belum optimalnya layanan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten.
- Belum semua kendaraan umum laik jalan.
- Belum optimalnya penyediaan fasilitas jalan.

j. Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya implementasi satu data dalam penyediaan data penunjang perencanaan Pembangunan.



k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Belum optimalnya kemitraan yang dilakukan oleh UMKM.
- Akses UMKM untuk mengikuti pameran promosi produk masih sangat kecil.
- Menurunnya persentase koperasi aktif.
- Masih rendahnya jumlah KSP/USP yang masuk dalam kategori sehat.
- Kurangnya daya saing produk UMKM dibanding produk pabrikan.
- Koperasi merah putih belum berjalan optimal.

l. Penanaman Modal

- Rencana dan realisasi investasi belum tercapai.
- Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan.

m. Kepemudaan dan Olahraga

- Rendahnya keaktifan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow
- Kurangnya peran aktif pemuda terutama dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- Masih Minimnya wirausaha muda di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional, dipengaruhi oleh kurangnya pelatih yang bersertifikasi, kurangnya kualitas pengurus organisasi olah raga, serta kurangnya sarana prasarana olah raga sesuai standar.

n. Statistik

- Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral
- Belum optimalnya penerapan single data melalui aplikasi satu data Kabupaten Bolaang Mongondow



o. Persandian

- Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan persandian informasi.

p. Kebudayaan

- Masih banyaknya budaya lokal yang belum dilestarikan, hingga kini.
- Masih rendahnya jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan

q. Perpustakaan

- Fasilitas Perpustakaan yang belum memadai.
- Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah masih sangat kurang.
- Menurunnya minat membaca masyarakat.

r. Kearsipan

- Masih rendahnya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan, dan tidak dilakukan secara terpadu.
- Belum ada pemanfaatan e-arsip dalam pengelolaan arsip oleh instansi pemerintah.

3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

- Kurang optimalnya Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara pembenihan ikan yang baik dan memaksimalkan armada tangkap dan teknik penangkapan ikan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan. Sampai tahun 2025 jumlah produksi (ton) perikanan tangkap dan budidaya hanya mencapai 11.727 ton.
- Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat perikanan.

b. Pariwisata

- Kurangnya minat wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah.



- Kurangnya kompetensi SDM pengelola pariwisata dan kurang optimalnya 3A (amenitas, atraksi, aksesibilitas).
- c. Pertanian
 - Menurunnya capaian produksi komoditi tanaman pangan khususnya pada komoditi pangan kacang hijau, wortel dan kedelai.
 - Belum optimalnya promosi komoditi pertanian dan hortikultura.
 - Rendahnya kualitas pasca panen.
 - Stabilitas harga panen produksi pertanian yang belum terjaga, hal ini ditandai dengan anjloknya harga produksi pertanian saat panen raya tiba serta nilai NTP yang masih rendah
 - Kurangnya sarana dan prasarana teknologi terutama alsintan yang menyebabkan pada saat panen kehilangan sampai dengan 10% hasil panen
- d. Perdagangan
 - Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen
 - Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan
 - Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata.
- e. Perindustrian
 - Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB.
 - Rendahnya pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - Masih rendahnya cakupan pembinaan unit usaha IKM.
 - Masih rendahnya pembinaan unit usaha IKM di Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah.
- f. Transmigrasi
 - Belum adanya lahan transmigrasi yang tersedia



4. Urusan Fungsi Penunjang

a. Penelitian dan Pengembangan

- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk bahan pengambilan kebijakan.

b. Perencanaan Pembangunan Daerah

- Optimalisasi penjabaran prioritas pembangunan nasional dan provinsi kedalam pelaksanaan program prioritas daerah.
- Optimalisasi keselarasan program perencanaan Pembangunan daerah dengan Renstra PD dan RKPD.

c. Keuangan Daerah

- Belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terkendala oleh data potensi pajak dan retribusi yang perlu dilakukan pemutakhiran, dan pemanfaatan teknologi yang masih kurang dalam peningkatan akurasi data dan pelayanan pajak dan retribusi. Dapat dilihat pada rasio PAD.
- Masih tingginya belanja pegawai.

d. Kepegawaian dan Diklat

- Rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.
- Belum terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam upaya meningkatkan profesionalitas ASN.
- Belum optimalnya pejabat yang telah mengikuti diklat pim (II, III dan IV).

e. Sekretariat Daerah

- Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah.
- Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur dan pendampingan aparatur.

f. Sekretariat DPRD

- Rendahnya jumlah perda yang di tetapkan setiap tahunnya.



g. Pengawasan

- Tingkat Maturitas dan kapabilitas SPIP belum sesuai dengan harapan. Tingkat Maturitas dan kapabilitas SPIP perlu ditingkatkan sehingga mencapai level 4.
- Belum seluruhnya objek pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan

h. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Masih rendahnya kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan
- Masih adanya organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang belum terdaftar secara sah di instansi terkait (Kesbangpol).

i. Kewilayahan

- Belum Optimalnya pelayanan Masyarakat di kecamatan.

1.1.2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Tujuan pembangunan baik nasional dan daerah telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga kelingkup dunia.

Untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2025 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025-2029.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik,



partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029.

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan kondisi Kabupaten Bolaang Mongondow saat ini, dengan menganalisa permasalahan dan peluang serta tantangan yang akan dihadapi dalam 5 Tahun mendatang. Visi utamanya adalah **BOLMONG JUARA** yang merupakan akronim dari **BOLAANG MONGONDOW MAJU DAN SEJAHTERA**. Dibalik kata “BOLMONG JUARA” tersimpan semua niatan dan semangat agar siapa saja yang sering mengucapkannya dan meneriakkannya, maka akan tertanam dalam alam bawah sadar sehingga menjadi energi baru sebagai daya dorong untuk menjadi “juara” sebagai ruh dan etos kerja. Visi “BOLMONG JUARA” adalah membangun Kabupaten Bolaang Mongondow yang Maju dan Sejahtera, dengan tiga pilar pembangunan yaitu inovasi, kolaborasi dan desentralisasi. Visi Bolaang Mongondow Maju dan Sejahtera mengandung makna sebagai berikut:

Maju = menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow yang berdaya saing tinggi, unggul, modern, tangguh, inovatif, kreatif, adaptif dan berkeadilan, di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selain itu, membangun Masyarakat Bolaang Mongondow yang Maju adalah mewujudkan masyarakat yang mempunyai kualitas hidup yang tinggi meliputi bidang “kesehatan, bidang pendidikan dan sarana prasarana pemerintahan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

Sejahtera = menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow yang Sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan



pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar meliputi sandang, pangan dan papan, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merumuskan lima misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Misi Pertama

Mengembangkan sumber daya manusia unggul di Bolaang Mongondow melalui penguatan mutu layanan pendidikan gratis, berkelanjutan dan layanan kesehatan holistik yang inklusif

2. Misi Kedua

Meningkatkan Infrastruktur Daerah Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan.

3. Misi Ketiga

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Transparan.

4. Misi Keempat

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan Membangun Perekonomian yang Kreatif, Inovatif Berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Lokal.

5. Misi Kelima

Menjadikan Kehidupan Masyarakat lebih Harmonis dan Toleran.

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 14 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

1. Wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan peningkatan kualitas SDM, melalui Pendidikan Vokasi, Iptek Berbasis Riset dan Inovasi;



- 2 Pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan kualitas SDM bidang Kesehatan ;
- 3 Peningkatan kualitas layanan kepesertaan perlindungan Jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- 4 Penerapan ekonomi hijau di segala bidang sesuai dengan potensi daerah;
- 5 Transformasi digital di semua bidang;
- 6 Peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa dan UMKM;
- 7 Regulasi yang adaptif, taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif;
- 8 Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi;
- 9 Kerukunan beragama serta masyarakat yang berbudaya;
- 10 Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender;
- 11 Peningkatan Infrastruktur pelayanan dasar berkualitas;
- 12 Lingkungan hidup yang berkualitas;
- 13 Ketahanan Energi air dan pangan;
- 14 Bolaang Mongondow yang tanggap bencana dan perubahan iklim.

1.1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah.

Adapun program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 1.11
Program Prioritas Pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2025-2029

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Dibawah 15 Tahun (Angka)	
		Skor Literasi/Numerasi SD, SMP (Angka)	
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
		Indeks Literasi Digital (Angka)	
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Terlestarikannya Bahasa dan Sastra daerah	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekstrakurikuler kesenian (%)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
		Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	
		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		"Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar" (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Persentase Desa/ Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Indeks Infrastruktur (Angka)	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	
		Indeks Resiko Bencana (IRB) (Angka)	
		Indeks Konektivitas (%)	
	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang ()	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	MENINGKATNYA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan ()	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun (Km)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	
		Indeks Kualitas Air (Indeks)	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)	
		Persentase Tutupan Lahan (Persentase)	
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Meningkatnya Efektifitas Kajian Lingkungan untuk memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional ()	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	Meningkatnya Tatakelola Energi Baru Terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT ()	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
		Bauran Energi Terbarukan ((%))	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	Menurunnya Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Angka)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan		Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi (Angka)	
		Monitoring Center for Prevention (MCP-KPK) (Angka)	
		Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	
		Nilai Sakip (Angka)	
		Indeks Inovasi Daerah (Angka)	
		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan ()	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	
	Menigkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan ()	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD ()	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis ()	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi ()	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar, serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan ()	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti ()	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti ()	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RW/Dusun Yang Memperoleh Manfaat Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RW/Dusun Yang Memperoleh Manfaat Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terasilitasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	Meningkatnya penyelesaian sengketa /kasus tindak pidana	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Persentase layanan berbasis elektronik di lingkup pemerintah daerah yang terkelola	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Angka)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	Persentase jumlah berita dan informasi Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
Meningkatkan Kualitas		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp Juta))	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Pertumbuhan Ekonomi			
		Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	
	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Peningkatan luas lahan perkebunan (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan ()	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ()	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		Peningkatan Produksi Hortikultura ()	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan ()	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
	Meningkatnya Pegendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian ()	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Perikanan atas Peraturan Perundang-Undangan Berlaku di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota (Angka)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian ()	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian ()	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	Meningkatnya Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) ()	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang di Bina (Angka)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri ()	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Meninkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalaam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	
Menurunnya angka kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		Tingkat Kemiskinan ((%))	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	
		Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) (Nilai)	
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (Angka)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	Meningkatnya Rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan (Persentase)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan inovatif		Persentase Desa Mandiri (%)	
		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	MENINGKATNYA PERKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	Menurunya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	
Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, toleran, terkendali, tertib dan maju		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	
		Capaian Administrasi Kependudukan dan Capil (%)	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	
		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	Meningkatnya Efektifitas kerja sama Desa	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa (Desa)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
	Meningkatnya etika dan budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	Meningkatnya Kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Meningkatnya Kualitas Layanan pencatatan Sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Desa)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	Meningkatnya kualitas penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang di selesaikan (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	OPD meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat Hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		Total Fertility Rate (TFR) (%)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	Terselenggaranya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1.1.2.4 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Adapun kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan masing-masing urusan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:



Tabel 1.12
Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Tahunan Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2025

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	DINAS PENDIDIKAN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PENDIDIKAN
	Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PENDIDIKAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat Partisipasi Sekolah dasar	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat Partisipasi Sekolah Menengah	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat Partisipasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter daerah	DINAS PENDIDIKAN
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	DINAS PENDIDIKAN
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan	DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah	DINAS KESEHATAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dpelihara	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	DINAS KESEHATAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan	DINAS KESEHATAN
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DINAS KESEHATAN
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	DINAS KESEHATAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	DINAS KESEHATAN
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DINAS KESEHATAN
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Germas	DINAS KESEHATAN
RSUD DATOE BINANGKANG			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD DATOE BINANGKANG



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	RSUD DATOE BINANGKANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD DATOE BINANGKANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	RSUD DATOE BINANGKANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	RSUD DATOE BINANGKANG
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia	RSUD DATOE BINANGKANG
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	RSUD DATOE BINANGKANG
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi layanan terintegrasi	RSUD DATOE BINANGKANG
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan	RSUD DATOE BINANGKANG



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya	RSUD DATOE BINANGKANG
DINAS PU DAN TATA RUANG			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PU DAN TATA RUANG



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Panjang Bangunan Pengaman sepanjang Daerah Aliran Sungai	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Rumah Tangga yang memiliki akses layanan air minum yang layak	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Rumah Tangga yang memiliki akses layanan limbah yang layak	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi panjang sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kondisi baik	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Akumulasi Panjang jalan kabupaten Yang Ditingkatkan Kualitasnya	DINAS PU DAN TATA RUANG



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga Konstruksi yang Terbina	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pengawasan Yang Sesuai	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	DINAS PU DAN TATA RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PU DAN TATA RUANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang di adakan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diperbaiki	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen dan Laporan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen dan Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen dan Laporan penetapan lokasi kawasan kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani (Ha)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang ditingkatkan untuk mencegah perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan terbangun	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lokasi Usaha Yang Berizin	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang DitanganJumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangan	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelanggaran Perda	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah orang yang menerima pelayanan informasi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DINAS SOSIAL			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS SOSIAL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS SOSIAL
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS SOSIAL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS SOSIAL



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	DINAS SOSIAL
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam Penanggulangan PMKS	DINAS SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Direhabilitas	DINAS SOSIAL
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data TKS tersedia dan Jumlah Kelompok Penerima Bantuan	DINAS SOSIAL
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang ditangani	DINAS SOSIAL
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan terhadap kesiapsiagaan bencana	DINAS SOSIAL



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS TRANSMIGRA SI DAN TENAGA KERJA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS TRANSMIGRA SI DAN TENAGA KERJA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS TRANSMIGRA SI DAN TENAGA KERJA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS TRANSMIGRA SI DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS TRANSMIGRA SI DAN TENAGA KERJA



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki PP/PKB	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia lembaga penyedia layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	DINAS PP DAN PERLINDUNG AN ANAK
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	DINAS PP DAN PERLINDUNG AN ANAK
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	DINAS PP DAN PERLINDUNG AN ANAK
DINAS KETAHANAN PANGAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KETAHANAN PANGAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase kecamatan yang memiliki lembaga toko tani	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen kebijakan Target Konsumsi Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah buku peta rawan pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang ditangani	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi, registrasi dan rekomendasi keamanan pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Ranperda Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS yang tersedia	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengendalian terhadap lokasi Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Taman KEHATI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Pelaporan Penyajian Pemanfaatan Data	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang tertib Administrasi (DESA)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa yang diberdayakan (KELOMPOK)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PP DAN KB			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PP DAN KB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PP DAN KB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PP DAN KB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PP DAN KB
	Pelaksanaan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah organisasi pelaksana	DINAS PP DAN KB



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB, PLKB)	jumlah penyuluh KB yang Diberdayakan	DINAS PP DAN KB
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan di daerah Kab/Kota	Jumlah Akseptor di Kab/Kota	DINAS PP DAN KB
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah organisasi dan mitra lainnya yang mendapatkan pembinaan dan kesertaan ber KB	DINAS PP DAN KB
	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	DINAS PP DAN KB
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Rumah Data Kependudukan yang Dibangun	DINAS PP DAN KB
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kelompok yang mendapatkan KIT	DINAS PP DAN KB



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
DINAS PERHUBUNGAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERHUBUNGAN
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C Yang berfungsi	DINAS PERHUBUNGAN
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Perizinan	DINAS PERHUBUNGAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Kendaraan Yang di Uji	DINAS PERHUBUNG AN
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Rekayasa Lalulintas	DINAS PERHUBUNG AN
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin (dokumen)	DINAS PERHUBUNG AN
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang tersedia	DINAS PERHUBUNG AN
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah moda transportasi	DINAS PERHUBUNG AN
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan	DINAS PERHUBUNG AN
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana umum jaringan trayek Pedesaan	DINAS PERHUBUNG AN
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan	DINAS PERHUBUNG AN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan	DINAS PERHUBUNGAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan sub domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan egovernment di Lingkup Pemda Kab Bolaang Mongondow	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan Statistik Sektorall di lingkup Kab/ Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usajha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wlayah Keanggotaan Dalam Daerah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan, Kekuatan Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi	DINAS KOPERASI, US AHA KECIL, DAN MENENGAH
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	DINAS KOPERASI, US AHA KECIL, DAN MENENGAH
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Yang Produktif yang bernilai tambah memiliki Akses asar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penguatan Manajemen Standarisasi	DINAS KOPERASI, US AHA KECIL, DAN MENENGAH
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang di Kembangkan	DINAS KOPERASI, US AHA KECIL, DAN MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Diberikan fasilitasi / Insentif dan kemudahan penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi yang diikuti	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor yang di berdayakan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kader yang diberdayakan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah medali yang diperoleh pada Pekan Olahraga	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang mendapat Pembinaan dan Pengembangan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	kebudayaan masyarakat yang terlindungi	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan SDM adat pelestarian seni budaya	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus pembudayaan gemar membaca	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	DINAS PERIKANAN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERIKANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERIKANAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERIKANAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kab/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana tangkap yang diadakan	DINAS PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana Pembudidayaan ikan yang tersedia	DINAS PERIKANAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota	jumlah lokasi wisata baru yang terkelola	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	jumlah dokumen pengelolaan kawasan strategis pariwisata	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	jumlah lokasi destinasi wisata yang terkelola	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DINAS PERTANIAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERTANIAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PERTANIAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERTANIAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERTANIAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERTANIAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERTANIAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dokumen Pengawasan penggunaan sarana pertanian	DINAS PERTANIAN
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengelolaan SDG hewan	DINAS PERTANIAN
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Database lahan yang tersedia	DINAS PERTANIAN
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen pembangunan prasarana pertanian	DINAS PERTANIAN
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis tindakan penjaminan kesehatan hewan yang dilaksanakan	DINAS PERTANIAN
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas serangan yang tertangani	DINAS PERTANIAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan	DINAS PERTANIAN
	DINAS PERKEBUNAN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERKEBUNAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PERKEBUNAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERKEBUNAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERKEBUNAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERKEBUNAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERKEBUNAN
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dokumen Pengawasan penggunaan sarana pertanian	DINAS PERKEBUNAN
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengelolaan SDG hewan	DINAS PERKEBUNAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen pembangunan prasarana pertanian	DINAS PERKEBUNAN
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas serangan yang tertangani	DINAS PERKEBUNAN
DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin pemanfaatan Langsung Panas Bumi berdasarkan potensi	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah ijin yang diterbitkan	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pendukung	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran dan Misi Dagang Yang Diikuti	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANG AN DAN ESDM
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	SEKRETARIAT DPRD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	SEKRETARIAT DPRD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	SEKRETARIAT DPRD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	SEKRETARIAT DPRD
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	SEKRETARIAT DPRD



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen layanan administrasi DPRD sesuai SOP	SEKRETARIAT DPRD
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang ditindaklanjuti	SEKRETARIAT DPRD
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi tugas DPRD yang terfasilitasi	SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT DAERAH			
	Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Terkait BUMD, BLUD, Distribusi Perekonomiandan Ekonomi Mikro kecil	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	SEKRETARIAT DAERAH



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Kegiatan Pelaksanaan Adminstrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Adminstrasi Pemnagunan Yang Difasilitasi dan Di Evaluasi	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kegiatan terkait kesejahteraan rakyat / masyarakat dan bina mental spiritual	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaksanaan adminstrasi tata pemerintahan daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah MOU	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata pesentase pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang diadakan	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	SEKRETARIAT DAERAH



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah fasilitas terhadap administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	jumlah fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah yang disediakan	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah dokumen / laporan pengadministrasian barang milik daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan Penataan organisasi	jumlah kegiatan penataan organisasi	SEKRETARIAT DAERAH



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	SEKRETARIAT DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	rasio kebutuhan ASN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan terhadap ASN secara cepat dan tepat waktu	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio jumlah ASN dalam jabatan (struktural/Fungsional) sesuai Kompetensi	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase tindak lanjut pembinaan disiplin ASN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis terhadap kebutuhan organisasi	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
BADAN KEUANGAN DAERAH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Bulan)	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Bulan)	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bulan)	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan, pendanaan dan evaluasi	BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang tersedia	BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat daerah yang diasistensi perencanaannya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat daerah yang diasistensi perencanaannya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat daerah yang diasistensi perencanaannya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan yang tersedia	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pengembangan inovasi dan teknologi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
6	UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	INSPEKTORAT DAERAH		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	INSPEKTORAT DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	INSPEKTORAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	INSPEKTORAT DAERAH
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Entitas yang dilaksanakan Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Entitas yang dilaksanakan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	INSPEKTORAT DAERAH



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendamoingan dan Asistensi	INSPEKTORAT DAERAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
	KECAMATAN DUMOGA BARAT		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA BARAT



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN DUMOGA BARAT
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perencanaan pembangunannya	KECAMATAN DUMOGA BARAT
KECAMATAN DUMOGA TENGAH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA TENGAH
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perencanaan pembangunannya	KECAMATAN DUMOGA TENGAH



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
KECAMATAN DUMOGA TIMUR			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat kelurahan	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	jumlah dokumen yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN DUMOGA TIMUR
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN DUMOGA TIMUR



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	KECAMATAN DUMOGA UTARA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Desa yang dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan	KECAMATAN DUMOGA UTARA



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN DUMOGA UTARA
	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang dilaksanakan Pemberdayaan	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA
KECAMATAN PASSI BARAT			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN PASSI BARAT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN PASSI BARAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN PASSI BARAT
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	KECAMATAN PASSI BARAT



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN PASSI BARAT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	KECAMATAN PASSI BARAT
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN PASSI BARAT
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN PASSI BARAT
KECAMATAN BOLAANG TIMUR			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN BOLAANG TIMUR



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan</i>	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN BOLAANG TIMUR
KECAMATAN POIGAR			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	KECAMATAN POIGAR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	KECAMATAN POIGAR



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN POIGAR
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang disediakan	KECAMATAN POIGAR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	KECAMATAN POIGAR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	KECAMATAN POIGAR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Desa)	KECAMATAN POIGAR
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perencanaan pembangunannya (desa)	KECAMATAN POIGAR
	Pencegahan Gangguan Ketentraman Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah desa yang ditangani	KECAMATAN POIGAR



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
KECAMATAN PASSI TIMUR			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang disediakan	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawaan (Desa)	KECAMATAN PASSI TIMUR
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perencanaan pembangunannya (desa)	KECAMATAN PASSI TIMUR



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
KECAMATAN DUMOGA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	KECAMATAN DUMOGA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	KECAMATAN DUMOGA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	KECAMATAN DUMOGA
	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perencanaan pembangunannya (desa)	KECAMATAN DUMOGA
KECAMATAN LOLAYAN			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	KECAMATAN LOLAYAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	KECAMATAN LOLAYAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN LOLAYAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	KECAMATAN LOLAYAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	KECAMATAN LOLAYAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN LOLAYAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN LOLAYAN
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN LOLAYAN
KECAMATAN BILALANG			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	KECAMATAN BILALANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	KECAMATAN BILALANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN BILALANG



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	KECAMATAN BILALANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	KECAMATAN BILALANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN BILALANG
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang diberdayakan	KECAMATAN BILALANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN BILALANG
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN BILALANG
KECAMATAN BOLAANG			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	KECAMATAN BOLAANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	KECAMATAN BOLAANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN BOLAANG



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan	KECAMATAN BOLAANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	KECAMATAN BOLAANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN BOLAANG
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang diberdayakan	KECAMATAN BOLAANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	KECAMATAN BOLAANG
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN BOLAANG
KECAMATAN SANG TOMBOLANG			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN SANG TOMBOLANG



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan</i>	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN SANG TOMBOLANG
KECAMATAN LOLAK			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN LOLAK
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN LOLAK
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	KECAMATAN LOLAK



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan</i>	KECAMATAN LOLAK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN LOLAK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Yang Dipelihara	KECAMATAN LOLAK
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Perencanaan Pembangunannya	KECAMATAN LOLAK
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen rumusan kebijakan teknis dan pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen kebijakan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonomi pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.



Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2025 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam misi pembangunan daerah, yakni misi ke I yakni Mengembangkan sumber daya manusia unggul di Bolaang Mongondow melalui penguatan mutu layanan pendidikan gratis, berkelanjutan dan layanan kesehatan holistik yang inklusif serta misi ke V Menjadikan Kehidupan Masyarakat Lebih Harmonis dan Toleran.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional dip periode berikutnya.

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan dana disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dengan



memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

Dalam penyusunan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagai dasar pelaksanaan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal:

1. Bidang Pendidikan
 - Pendidikan anak usia dini (PAUD)
 - Pendidikan dasar
 - Pendidikan kesetaraan
2. Bidang Kesehatan
 - Pelayanan kesehatan ibu hamil
 - Pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - Pelayanan kesehatan balita
 - Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - Pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
 - Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
 - Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota



- Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota
- 5. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
 - Pelayanan informasi rawan bencana
 - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- 6. Bidang Sosial
 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
 - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
 - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
 - Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
 - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, sebagai berikut:

1.1.3.1 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan:

- 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2 Pendidikan dasar
- 3 Pendidikan kesetaraan

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan dapat di lihat pada tabel dibawah ini:



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

Tabel 1.13
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
1). Pendidikan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					96.971.177.855	53.417.671.805
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH RKB YANG DIBANGUN	Angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan		2.378.052.000	3.629.988.000
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Lolak, Lalow	224.466.000	1.131.632.000
					Kab. Bolaang Mongondow, Lolayan, Kopandakan II		
					Kab. Bolaang Mongondow, Poigar, Mariri Baru		
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	TERBANGUNYA JAMBAAN SEKOLAH	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.294.226.000	2.298.268.440



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.800.000.000	1.900.827.900
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.958.336.965	3.769.985.501
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Lolak, Lolak	1.420.880.876	451.500.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA BOS	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.473.765.000	21.181.403.093



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pembangunan Laboratorium Sekolah dasar						1.715.147.000
	Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan						1.375.156.800
	Pembangunan Konten Digital Untuk Pendidikan						562.673.309



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						409.271.400
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Pelayanan di bidang pendidikan						1.284.229.316
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						198.596.900



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pembangunan Ruang Kelas Baru						253.265.000
	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau Magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan						242.781.231
	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah						9.482.538.680
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000.000	1.200.000.000



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.473.338.211	1.473.338.211
	Pembangunan Laboratorium	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	DOKUMEN	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.546.919.000	6.546.919.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan		866.801.700	866.801.700
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang dilayani	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	405.616.833	405.616.833
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA BOS	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.982.275.000	11.982.275.000



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
2). Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					6.482.717.700	6.482.717.700
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH BAHAN KETERAMPILAN SKB	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraann	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	831.096.000	831.096.000
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH PENERIMA ALAT PERMAINAN PAUD	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraann	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153.119.892	153.119.892
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	KEGIATAN GEBYAR PAUD	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraann	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	324.155.422	324.155.422
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	SOSIALISASI SINGRON DAPODIK PAUD	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraann	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	532.655.386	532.655.386



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tutor/Pendidik yang dibayarkan	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan		1.800.271.000	1.800.271.000
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH PENERIMA BOP SEKOLAH	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan		2.941.420.000	2.941.420.000
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					918.910.000	918.910.000
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	JUMLAH PKBM YANG MENERIMA	angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	918.910.000	918.910.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					94.342.300	94.342.300
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					94.342.300	94.342.300
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD SMP PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Guru Yang ikut pelatihan	Jumlah Guru yang di nilai	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.342.300	94.342.300
3). Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					746.617.585	746.617.585
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					746.617.585	746.617.585



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka partisipasi sekolah (APS) SD, SMP, PAUD, dan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Guru yang di Nilai	Jumlah Guru PAUD	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	746.617.585	746.617.585
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					10.530.063	10.530.063
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.530.063	10.530.063
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		JUMLAH LEMBAGA YANG BELUM MENGURUS PERIZINAN		Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.530.063	10.530.063

1.1.1.2 Penyelerasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/prevent



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimum (SPM) bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					5.822.473.051	7.826.984.988
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.822.473.051	7.826.984.988
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	1.696.951.176	3.162.414.015
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	1.432.488.250	1.251.195.442
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	73.424.282	29.424.282
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	197.252.262	230.753.262
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	1.026.765.278	1.395.765.278



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	97.600.591	108.400.591
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	494.305.331	655.805.331
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	35.109.154	33.279.272
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	44.408.726	61.959.254
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	349.016.450	442.538.248



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	298.059.000	344.259.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bolaang Mongondow	77.092.551	111.192.013

1.1.3.1.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

Tabel 1.15
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.725.499.003	2.743.342.493
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					2.725.499.003	2.743.342.493
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan perdesaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Terbangunn ya layanan air minum	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	564.056.003	721.899.493
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Terbangunn ya layanan air minum	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	600.000.000	500.000.000
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunn ya layanan air minum	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1.561.443.000	1.521.443.000
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.017.296.860	3.000.920.255
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.017.296.860	3.000.920.255
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Persentase Layanan Penyediaan Sistim Air Limbah	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Terbangu nnya layanan sistem air limbah domestik	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	3.658.220.000	2.754.462.000
	Penyusunan Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistim pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Persentase Layanan Penyediaan Sistim Air Limbah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Terbangu nnya layanan sistem air limbah domestik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	359.076.860	246.458.255



1.1.3.1.4 Penyelesaian Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota

Penyelesaian prioritas pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimum (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:

Tabel 1.16

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					107.162.024	107.162.024
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					24.181.978	24.181.978
	Pengumpulan data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	7.628.630	7.628.630	Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kabupaten Bolaang Mongondow	7.628.630	7.628.630
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat bencana	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota berdasarkan Tingkat kerusakan rumah	Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		5.565.470	5.565.470



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		5.099.754	5.099.754
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi kabupaten/kota	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi	Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		5.888.124	5.888.124
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					17.980.046	17.980.046
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	5.306.400	5.306.400	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		5.306.400	5.306.400
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.901.241	4.901.241



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pengembang Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.171.979	5.171.979
	Rembuk Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban bencana	Pengembangan Perumahan	Jmlah Orang Yang Mengikuti Rembuk	Jumlah Dokumen Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.600.426	2.600.426
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					65.000.000	65.000.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Rumah Korban Bencana yang tertangani	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Dibangun	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Rumah Korban Bencana yang tertangani	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Dibangun	Terlaksananya Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000	15.000.000

1.1.3.1.5 Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

4. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimum (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.17
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.630.282.842	1.550.506.101
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					478.254.976	478.254.976
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Kebakaran Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145.302.585	145.302.585
2. pelayanan informasi rawan bencana;	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.949.168	0



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
3. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Terlaksananya Penanganan Kawasan Pasca Bencana Dengan Direhabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	621.118.557	604.290.984
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						621.118.557	604.290.984
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Terlaksananya Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	529.155.967	529.155.967
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Terlaksananya Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.833.000	18.833.000
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.187.544	28.187.544



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.992.927	24.992.927

1.1.3.1.6 Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah

Penyeragaman prioritas pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimum (SPM) bidang sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.18
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					402.173.933	346.273.505
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.134.154



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah PMKS dan PSKS Yang di Berdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Ataw Barang	Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah yang dilakukan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.256.652	6.134.154
		Jumlah PSKS yang diberdayakan					
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah PMKS dan PSKS yang diberdayakan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah PSKS Yang Diberdayakan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.703.153	81.761.203
	Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah PMKS dan PSKS Yang di Berdayakan					
		Jumlah PSKS yang diberdayakan					
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah PMKS dan PSKS yang diberdayakan	Jumlah Kelompok yang mendapat bantuan	Jumlah PSKS Yang Diberdayakan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.933.000	79.800.000
	Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah PMKS dan PSKS yang diberdayakan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah PSKS Yang Diberdayakan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	183.281.128	178.578.148
	Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan					
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					285.505.680	291.690.888
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						43.715.826
	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan	Jumlah orang terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.961.476	9.961.476
		Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan					
	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan	Jumlah Orang Terlantar Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.209.666	4.665.000
		Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan	Jumlah Orang Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.323.350	29.089.350
		Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan					
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						247.975.062
	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.527.532	190.012.995
		Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan					
	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.880.106	31.880.106
		Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan					



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.603.550	25.553.550
		Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan					
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					645.395.571	207.568.065
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					645.395.571	207.568.065
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah PMKS yang diberdayakan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang didata	Tersedianya data yang akurat	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	359.955.456	135.214.429
		Tersedianya Data PMKS dan PSKS					
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah PMKS yang diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	Tersedianya data yang akurat	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127.708.320	69.019.062
		Tersedianya Data PMKS dan PSKS					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PMKS yang diberdayakan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersedianya data yang akurat	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157.731.795	0
		Tersedianya Data PMKS dan PSKS					
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					331.126.662	319.675.974
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					238.743.214	228.367.950
	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.795.626	70.270.362
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Yang Dilatih					
	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Korban yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.532.560	123.982.560
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Yang Dilatih					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Standar Pelayanan Minimum	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah
	Penangan an Bencana	Penagana n Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bencana Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ko ta	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bencana Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ko ta	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.517.128	21.217.128
	Penangan an Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yang Tertangan i	Jumlah Kelompok Rentan yang ditangani	Persentase Korban yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21517128	21.217.128
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Yang Dilatih					
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Tertanga ni	Jumlah korban yang mendapatkan dukungan psikososial	Persentase Korban yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.897.900	12.897.900
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Yang Dilatih					
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					92.383.448	91.308.024
	Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksana an Taruna Siaga Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Tertanga ni	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Taruna Siaga Bencana yang terlatih	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.383.448	91.308.024



**BAB
II**

***CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH***

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan aspek pengukuran kinerja pemerintah pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkaitan erat dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow. Meskipun kondisi perekonomian terus memberikan trend positif akan tetapi keadaan tersebut harus dikendalikan sehingga mengharuskan Pemerintah untuk bekerja keras meningkatkan kinerja melalui berbagai hal dalam pencapaian kinerja makro.

Pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian wajib dilakukan, terkait dengan pertumbuhan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi, juga untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat, sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan alam, yang secara umum sangat berkaitan erat dengan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan makro ekonomi daerah terkait langsung dengan turunan kebijakan bidang sektoral yang umum dilakukan pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah, kebijakan bidang fiskal yang dibahas bersama eksekutif dan legislatif dan ditetapkan oleh legislatif, dan kebijakan bidang kawasan dan kebijakan bidang regulasi dan kelembagaan.

Arah utama kebijakan makro ekonomi daerah digunakan sebagai alat untuk menuntun kebijakan fiskal, kebijakan moneter khususnya inflasi, kebijakan regulasi dan kelembagaan, kebijakan kawasan (infrastruktur, industri dan ekonomi, permukiman baru), dan kebijakan sektoral melalui semua program yang ditetapkan oleh seluruh Perangkat Daerah. Kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi rencana usaha dan investasi yang dilakukan swasta dan masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan lainnya. Seluruh kegiatan perangkat daerah dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan simultan baik secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi semua aspek kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah, BUMN, BUMD, sektor swasta, kelompok-kelompok produsen, dan perorangan yang menggunakan bahan baku berasal dari sumberdaya lokal dan impor.

Kebijakan strategis yang dilakukan secara konsisten, pada akhir satu periode tertentu satu tahun akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah semakin berkembang dan diharapkan kehidupan Masyarakat semakin meningkat dan sejahtera. Aspek ekonomi daerah menganalisa trend perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir yang difokuskan pada



beberapa variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi inflasi, pengangguran, kemiskinan, disparitas antar wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kelembagaan ekonomi penunjang percepatan gerak ekonomi daerah. Tujuannya untuk meningkatkan dimensi pembangunan manusia yang menekankan pada pendidikan dan kesehatan bahkan revolusi mental. Manusia sebagai modal pembangunan daerah akan menjadi pendorong perekonomian jika memiliki kualitas yang mampu bersaing. Lebih jauh dianalisa tentang struktur ekonomi dari sisi produksi dan sisi pengeluaran, struktur pengembangan dan peningkatan infrastruktur dasar, dan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standar hidup layak.



Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Bolaang Mongondow
2020-2025

IPM	Indeks Pembangunan Manusia					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia	68,77	69,04	69,82	70,48	71,14	71,83

Sumber : BPS Sulawesi Utara 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow terus meningkat dari tahun ketahun. Sesuai data dari Badan Pusat statistik Provinsi Sulut dan Buku Bolaang Mongondow Dalam Angka 2026, dengan menggunakan metode baru tahun 2025 IPM Kabupaten Bolaang Mongondow naik mencapai 71,83 naik sebesar 0,69 poin dari IPM tahun 2024 yang mencapai 71,14 dan tahun 2023 yang mencapai 70,48 atau naik sebesar 0,66 poin dibanding IPM tahun 2022 sebesar 69,82. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka ini mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Angka IPM Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2020 - 2025 terus mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/ wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/Tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. IPM menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, serta IPM 60-69 kategori sedang.

Jika melihat standar United Nations Development Program (UNDP) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Bolaang Mongondow telah memenuhi kategori tinggi. Hal ini dibarengi dengan memaksimalkan capaian kinerja pemerintah daerah dari target indikator yang di tetapkan dalam mendorong peningkatan 3 variabel dimensi yang menjadi tolak ukur indikator perhitungan IPM, meliputi : a) aspek kesehatan Angka Harapan Hidup (tahun) b) Aspek Pendidikan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, c) Aspek Pendapatan yaitu standar hidup layak Masyarakat. Berikut Indeks Pembangunan Manudia beserta Komponen-Komponen Pembentuknya di Kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun 2022 hingga 2025.



Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponen-komponen
Pembentuknya di Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2022-2025

IPM dan Komponen Pembentuknya	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia			
	2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,78	70,07	70,31	72,48
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11.61	11.63	11.65	11.82
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.17	8.36	8.38	8.49
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (rupiah)	1.060.137	1.120.760	1.241.864	1.242.625
Indeks Pembangunan Manusia	69,82	70,48	71,14	71,83

Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2026

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Terdapat 5 (lima) indikator kemiskinan yang menjadi perhatian dalam melihat angka kemiskinan. Hal tersebut yakni Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan.

Jika dilihat dari angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow, terjadi penurunan angka kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 dengan nilai 6,98 persen dibanding tahun 2024 yang mencapai 7,74 persen. Kondisi penurunan angka kemiskinan ini sesuai data BPS dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 20,19 ribu tahun 2024 menjadi 18,40 ribu tahun 2025. Kondisi ini juga diikuti oleh bertambahnya garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) dari 415.628 rupiah tahun 2024 naik menjadi 454.500 rupiah tahun 2025.

Indikator kemiskinan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :



Tabel 2.3

Indikator Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	19.08	17.96	19.02	20,19	18,40
Persentase Penduduk Miskin (P0)	7.58	7.04	7.37	7,74	6,98
Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1)	1.14	1.24	0.55	0,79	0,73
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.27	0.31	0.11	0,15	0,12
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	343.302	355.639	394.032	415.628	454.500

Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow 2026

Dari tahun ke tahun garis kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami kenaikan yang berarti penduduknya semakin sejahtera. Pada tahun 2025, garis kemiskinan tercatat 454.500 dengan penduduk miskin sebanyak 18,40 ribu jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 6,98 persen. Berdasarkan data BPS diperoleh indeks kedalaman kemiskinan 0,73 dan indeks keparahan kemiskinan 0,12. Terjadinya penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai Gambaran penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin.

2.1.3 Angka Pengangguran

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan mempersiapkan usaha tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow berusia di atas 15 tahun pada tahun 2025 tercatat 199.933 jiwa. Jumlah ini naik dibanding tahun 2024 yang mencapai 197.353 jiwa. Penduduk berusia di atas 15 tahun tersebut terdiri dari 143.432 jiwa Angkatan kerja dan 56.501 jiwa bukan Angkatan kerja. Pada kelompok Angkatan kerja, penduduk dengan Pendidikan terakhir SMA sebanyak 43.935 jiwa dengan mayoritas kegiatan utama bekerja. Sedangkan pada Pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 9.661 jiwa pada kelompok angkatan kerja. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 kembali mengalami perlambatan, dengan capaian 4,97 persen dibanding tahun



2024 yang hanya sebesar 4,48 persen dan tahun 2023 sebesar 4,61 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja hingga mencapai 199.933 jiwa dibanding tahun 2024 yang mencapai 197.353 Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel berikut ::

Tabel 2.4
Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow
2022-2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja	118.506	194.731	197.353	199.933
Jumlah penduduk angkatan kerja	112.630	121.669	134.652	143.432
Persentase penduduk yang bekerja	95,04	95,39	95,52	95,03
Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja	5.876	5.874	6.039	7.128
Persentase pengangguran terbuka	5,21	4,61	4,48	4,97

Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka 2026 (BPS)

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kondisi Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2021 melalui upaya pemulihan ekonomi terlihat dengan pertumbuhan sebesar 3,87 persen dan terus merangkak naik pada tahun 2022 dengan peningkatan mencapai 5,35 persen. Sementara di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami sedikit perlambatan dengan Tingkat pertumbuhan sebesar 5,18 persen dan Kembali mengalami percepatan di tahun 2024 dengan mengalami peningkatan sebesar 5.33 persen. Sementara di tahun 2025 Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari 5,33 menjadi 4,96



persen. Pertumbuhan paling tinggi Adalah untuk kategori jasa lainnya (22,29 Persen) sedangkan terendah pada kategori industri pengolahan (0,48 persen).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bolaang Mongondow atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai 12,53 triliun rupiah, sedangkan atas harga konstan mencapai 7,01 triliun rupiah. Dari 17 kategori, Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, yaitu mencapai 39,31 persen, diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,76 persen. Sebaliknya, kontribusi Jasa Perusahaan hanya 0,03 persen dan merupakan andil yang paling kecil.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow (Persen)
2021-2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,26	6,71	3,18	6,85	3,40
2	Pertambangan dan Penggalian	15,97	-0,98	-4,36	0,36	7,35
3	Industri Pengolahan	10,15	6,58	6,79	-2,55	8,63
4	Pengandaan listrik dan Gas	7,64	9,17	4,66	6,53	2,51
5	Pengandaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,84	2,24	1,08	-0,18	7,59
6	Konstruksi	5,65	3,81	9,14	5,41	0,48
7	Perdagangan Besar dan eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,04	8,34	10,61	6,63	6,83
8	Transportasi Pergudangan	2,25	8,26	15,44	5,73	9,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,50	9,39	10,43	8,97	22,29
10	Informasi dan Komunikasi	3,89	4,48	8,6	6,04	8,26



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,85	-6,76	-3,13	3,00	4,92
12	Real estate	0,61	2,68	5,05	4,00	5,77
13	Jasa Perusahaan	3,84	5,77	4,14	4,18	3,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	3,77	1,65	6,51	8,83	5,86
15	Jasa Pendidikan	4,53	7,58	8,37	7,48	7,84
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,41	6,36	7,63	7,65	8,09
17	Jasa Lainnya	4,76	6,49	15,17	14,33	7,30
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		3,87	5,35	5,18	5,33	4,96

Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2026

Untuk laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/ Kota se provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi SULUT (Persen), 2021-2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bolaang Mongondow	3,87	5,35	5,18	5,33	4,96
2	Minahasa	3,53	5,47	5,55	5,49	5,58
3	Kepulauan Sangihe	5,99	5,45	5,30	5,32	5,67
4	Kepulauan Talaud	3,34	5,22	5,21	4,79	4,19
5	Minahasa Selatan	4,91	5,41	5,54	5,58	5,27
6	Minahasa Utara	5,96	5,50	5,41	5,21	5,50
17	Bolaang Mongondow Utara	3,46	5,52	5,43	5,12	5,29
8	Siau Tagulandang Biaro	4,43	5,19	5,25	4,93	5,18
9	Minahasa Tenggara	4,29	5,30	5,38	5,37	5,09
10	Bolaang Mongondow Selatan	3,74	5,20	5,33	5,28	4,92



No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi SULUT (Persen), 2021-2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
11	Bolaang Mongondow Timur	3,05	5,18	5,35	5,14	5,41
	Kota					
1	Kota Manado	5,14	5,64	5,52	5,53	5,77
2	Kota Bitung	4,60	5,61	5,66	5,11	6,67
3	Kota Tomohon	2,05	5,17	5,32	4,74	5,41
4	Kota Kotamobagu	4,20	5,15	5,4	5,29	5,28
	Sulawesi Utara	4,16	5,42	5,48	5,39	5,66

Sumber : Sulut Dalam Angka 2026

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

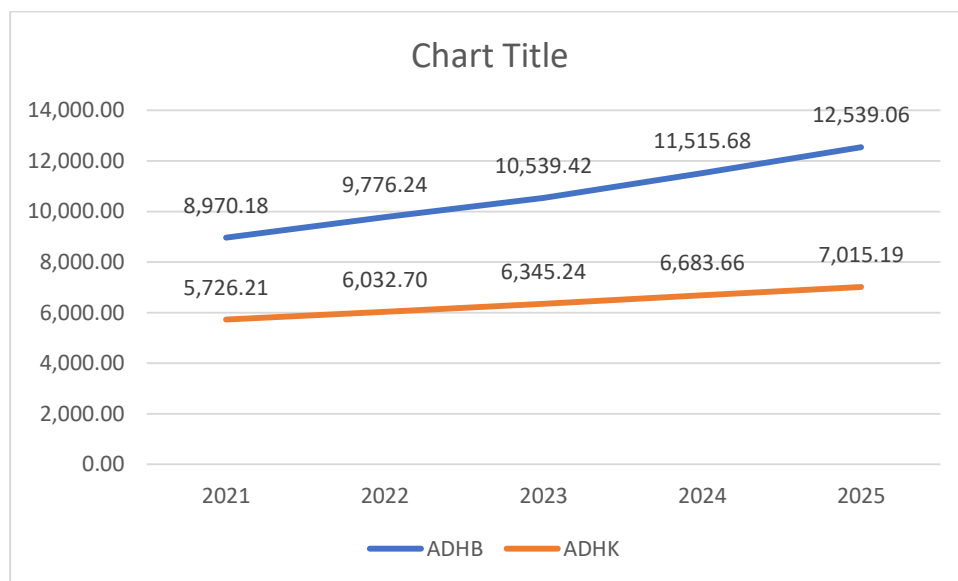
Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka negara tersebut akan dipandang sebagai negara yang makmur oleh negara-negara lainnya di dunia. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Dimana, dalam bidang ekonomi PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB digunakan sebagai salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Sehingga karena PDB berkaitan erat dengan Pendapatan Nasional, maka ia juga terkait erat dengan refleksi pendapatan per kapita di Indonesia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (provinsi/kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bolaang Mongondow atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai 12,53 triliun rupiah, sedangkan atas harga konstan mencapai 7,01 triliun rupiah.

Grafik 2.1
PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2021-2025
Kabupaten Bolaang Mongondow



Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2026

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bolaang Mongondow Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam Triliun Rupiah)
2021 – 2025

Lapangan Usaha / Industry		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	3.601,21	3.954,95	4.192,69	4.662,13	4.929,13
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1.014,06	1.058,52	1.055,33	1.135,96	1.371,16
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	653,96	735,34	799,73	799,86	898,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	7,99	8,26	8,41	8,82	9,70
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	7,99	8,26	8,41	8,82	9,70



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

	Lapangan Usaha / Industry	2021	2022	2023	2024	2025
F	Konstruksi/Construction	961,13	1.024,89	1.118,86	1.198,88	1.250,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.013,20	1.137,25	1.303,18	1.446,81	1.599,99
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	159,34	186,89	235,73	256,19	284,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	31,85	35,72	40,20	45,13	56,16
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	50,84	53,95	60,50	66,27	73,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	101,44	102,25	102,49	107,10	114,79
L	Real Estat/Real Estate Activities	392,55	410,48	439,54	472,87	516,54
M, N	Jasa Perusahaan/Business Activities	3,19	3,46	3,72	4,02	4,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	291,09	304,39	329,61	360,11	383,11
P	Jasa Pendidikan/Education	429,99	477,36	527,34	591,91	653,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	200,86	219,42	248,37	273,43	300,07
R, S, T, U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	48,55	53,18	63,10	74,49	81,42
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		8.970,18	9.776,24	10.539,42	11.515,68	12.539,06

Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2026

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Menurut Antonio Carrales, seorang profesional ekonomi di University College London, Gini Ratio menyediakan indeks untuk mengukur ketimpangan tersebut. Gini Ratio dimaknai sebagai sebuah alat ukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Indeks ini menggunakan ukuran skala 0 sampai dengan 1, yaitu angka 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang ekstrem di masyarakat. Gini ratio Bolaang Mongondow dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi meski demikian belum adanya kesenjangan social ditingkatan Masyarakat.



Pada tahun 2021 Gini ratio Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 0.360 kemudian turun pada angka 0.317 di tahun 2022 dan terus menurun pada tahun 2023 mencapai 0,311. Memasuki tahun 2024 angka Gini ratio naik mencapai 0,32 dan terus merangkak naik pada tahun 2025 sebesar 0,354. Meski kenaikan terjadi akan tetapi Angka ini menunjukkan bahwa di Bolaang Mongondow angka tersebut masih mendekati nol menandakan meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Sementara itu Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebesar 0.360 dan turun mencapai 0.343 di tahun 2025. Ketimpangan pendapatan mengacu pada sejauh mana pendapatan di distribusikan secara merata diantara populasi. Ketimpangan pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak kaya. Berikut kondisi rasio gini kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi utara tahun 2021-2025:

Tabel 2.8
Ratio Gini Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota				
	2021	2022	2023	2024	2025
Bolaang Mongondow	0.360	0.317	0.311	0,320	0,354
Minahasa	0.387	0.308	0.327	0,341	0,308
Kepulauan Sangihe	0.340	0.323	0.356	0,321	0,312
Kepulauan Talaud	0.328	0.356	0.339	0,289	0,315
Minahasa Selatan	0.366	0.382	0.350	0,324	0,299
Minahasa Utara	0.363	0.385	0.408	0,338	0,359
Bolaang Mongondow Utara	0.328	0.351	0.380	0,374	0,338
Kepulauan Sitaro	0.344	0.323	0.366	0,354	0,307
Minahasa Tenggara	0.357	0.351	0.320	0,302	0,323
Bolaang Mongondow Selatan	0.329	0.307	0.310	0,296	0,305
Bolaang Mongondow Timur	0.370	0.370	0.324	0,335	0,321
Kota Manado	0.346	0.373	0.406	0,382	0,342
Kota Bitung	0.324	0.346	0.371	0,374	0,364
Kota Tomohon	0.354	0.374	0.339	0,336	0,359
Kota Kotamobagu	0.346	0.404	0.375	0,357	0,305
Sulawesi Utara	0.365	0.365	0.370	0.360	0.343



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Kabupaten/Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota				
	2021	2022	2023	2024	2025

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (4 Desember 2025). *Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota, 2025*. Diakses pada 5 Maret 2026, dari <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjgwIzI=/gini-ratio-menurut-kabupaten-kota.html>

Sumber : BPS Sulawesi Utara 2026

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran atas pencapaian kinerja pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten bolaang mongondow tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten bolaang mongondow.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah RPD Tahun 2023-2026. Tahun 2025 merupakan tahun Ketiga pelaksanaan pembangunan daerah dengan Tema pembangunan Tahun 2025 yakni **“Memaksimalkan Kontribusi Pertanian Industri dan Pariwisata didukung sarana prasarana dan SDM yang memadai serta berkelanjutan”** yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026.



2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.9
Target Kinerja

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 1 : Mewujudkan Bolaang Mongondow yang Berbudaya dan Berdaya Saing			
1.	Tujuan :			
	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70
	Sasaran :			
1.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Tahun	13,90
1.2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata-Rata Usia Harapan Hidup	Angka	69,75
1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	6,25
	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan yang berkeadilan Dan Berkelanjutan			
2.	Tujuan :			
	Terbangunnya Infrastruktur yang Memadai	Indeks Infrastruktur	Angka	68
	Sasaran :			
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan	Angka	24,82
		Presentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik	Persen	71
2.2	Meningkatnya Layanan Air Minum Layak	Presentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	Persen	74,70
3.	Tujuan :			
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,98
	Sasaran :			
3.1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Angka	60,00
3.2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Angka	95,43
3.3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	75,00
	Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri Bertumpu pada Potensi Sumber Daya Lokal			
4	Tujuan :			
	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,58
		Gini Ratio	Angka	0,315
	Sasaran :			
4.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	10,30
		Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	2,5



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	Persen / Tahun	10
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bersih, Demokratis dan Bebas KKN				
5	Tujuan :			
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Nilai Rata Rata Capaian Opini BPK, Nilai SAKIP, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	Angka	84,75
	Sasaran :			
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Zona	Hijau
5.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih	Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikati	BB
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Angka	3,8
Misi 5 : Mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur				
6	Tujuan :			
	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,04
	Sasaran :			
6.1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan	Angka	1,14

2.3.2 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran kinerja terhadap tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang telah dicapai berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 1 : Mewujudkan Bolaang Mongondow yang Berbudaya dan Berdaya Saing						
1.	Tujuan :					
	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70	71,83 (BPS 2026)	102,61
	Sasaran :					



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Tahun	13,90	11,82 (HLS, BPS 2026)	85,03
1.2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata Rata Usia Harapan Hidup	Angka	69,75	72,48 (BPS 2026)	103,91
1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	6,25	6,98 (BPS 2026)	89,54
Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan yang berkeadilan Dan Berkelanjutan						
2.	Tujuan :					
	Terbangunnya Infrastruktur yang Memadai	Indeks Infrastruktur	Angka	68	65 (Data Kementrian PUPR 2022)	95,59
	Sasaran :					
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan	Angka	24,82	15,30 (Data Tahun 2024)	61,64
		Presentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik	Persen	71	49,30 (BPS 2026)	69,44
2.2	Meningkatnya Layanan Air Minum Layak	Presentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	Persen	74,70	68,95 (LKJIP PUPR 2025)	92,30
3.	Tujuan :					
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,98	81,78 (BPS Sulut)	113,61
	Sasaran :					
3.1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Angka	60,00	74,08 (LKJIP DLH 2025)	123,47
3.2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Angka	95,43	86,55 (LKJIP DLH 2025)	90,69
3.3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	75,00	61,4 (LKJIP DLH 2025)	81,87



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri Bertumpu pada Potensi SumberDaya Lokal					
4	Tujuan :					
	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,58	4,96 (BPS 2026)	88,88
		Gini Ratio	Angka	0,315	0,354 (BPS 2026)	112,38
	Sasaran :					
4.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	10,30	8,63 *(BPS 2026)	83,78
		Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	2,5	3,40 *(BPS 2026)	136
4.2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	Persen / Tahun	10	4,33	43,30
	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bersih, Demokratis dan Bebas KKN					
5	Tujuan :					
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Nilai Rata Rata Capaian Opini BPK, Nilai SAKIP, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	Angka	84,75	63,55	75,99
	Sasaran :					
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Zona	Hijau (85)	Hijau (85,18)	100
5.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih	Opini BPK	Opini	WTP (100)	WTP (100) *(Opini BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2024)	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB (71)	B (65,92) *(Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025)	92,85
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Angka	3,8	3,5 *(Hasil Penilaian Dari Kemendagri Tahun 2023)	92,10
Misi 5 : Mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur						
6	Tujuan :					
	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,04	79,08 *(Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2025)	93
Sasaran :						
6.1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan	Angka	1,14	1,2	105

2.3.3 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pengukuran ini untuk membandingkan antara realisasi kinerja tahun pelaporan dengan beberapa tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

Capaian Kinerja Dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 1 : Mewujudkan Bolaang Mongondow yang Berbudaya dan Berdaya Saing						
1.	Tujuan :					
	Meningkatkan Mutu Pendidika	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,16	69,62	71,83 (BPS 2026)



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	n Dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang berdaya Saing					
	Sasaran :					
1.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Tahun	13,30	11,63	11,82 (BPS 2026)
1.2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata Rata Usia Harapan Hidup	Angka	69,45	70,07	72,48 (BPS 2026)
1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	7,58	7,37	6,98 (BPS 2026)
	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan yang berkeadilan Dan Berkelanjutan					
2.	Tujuan :					
	Terbangunnya Infrastruktur yang Memadai	Indeks Infrastruktur	Angka	65	65	65 (Data Tahun 2023)
	Sasaran :					
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan	Angka	23,39	15,30	15,30 (Data tahun 2024)
		Presentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik	Persen	67	56,51	49,30 (BPS 2026)
2.2	Meningkatnya Layanan Air Minum Layak	Presentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	Persen	68,57	68,63	68,95 (LKJIP PUPR 2025)
3.	Tujuan :					
	Meningkatkan	Indeks Kualitas Lingkungan	Angka	75,33	75,33 (Statistik	81,78 (BPS Sulut



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kualitas Lingkungan Hidup	Hidup			Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2023)	2026)
	Sasaran :					
3.1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Angka	50,00	55,00	74,08 (LKJIP DLH 2025)
3.2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Angka	95,87	93,13	86,55 (LKJIP DLH 2025)
3.3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	75,72	61,4	61,4 (LKJIP DLH 2025)
	Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri Bertumpu pada Potensi SumberDaya Lokal					
4	Tujuan :					
	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.18	5,33	4,96 *(Bolmong Dalam Angka 2026)
		Gini Ratio	Angka	0,311	0,320	0,354 *(BPS Sulut 2026)
	Sasaran :					
4.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	6,79	-2.55	8,63 *(Bolmong Dalam Angka 2026)
		Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	3,18	6,85	3,40 *(Bolmong Dalam Angka 2026)



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	Persen / Tahun	10	7,24	4,33
	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bersih, Demokratis dan Bebas KKN					
5	Tujuan :					
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Nilai Rata Rata Capaian Opini BPK, Nilai SAKIP, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	Angka	65,66	65,66	63,55
	Sasaran :					
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Zona	Merah (57,76)	Hijau (95,05)	Hijau (85,18)
5.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih	Opini BPK	Opini	WTP 100	WTP (100)	WTP *(Opini BPK Atas Laporan Keuangan 2024)
		Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikament	B	B (64,56)	B (65,92) *(Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024)
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3,0528	3,0561	3,0561 *(Hasil Penilaian Dari Kemendagri Tahun 2023)
	Misi 5 : Mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur					
6	Tujuan :					
	Meningkatkan Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,89	83,26	79,08 *(Indeks Ketahanan Pangan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Daerah					Badan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2025)
	Sasaran :					
6.1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan	Angka	1,02	1,16	1,2

2.3.4 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan jangka menengah

Pengukuran ini untuk melihat capaian kinerja dengan target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025			Target Akhir RPD 2023 – 2026	% Capaian Thp Target Akhir RPD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Misi 1 : Mewujudkan Bolaang Mongondow yang Berbudaya dan Berdaya Saing						
1.	Tujuan :						
	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	70	71,83	102,61	70,25	102.24
	Sasaran :						
1.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	13,90	11,82	85,03	14	84,42
1.2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata Rata Usia Harapan Hidup	69,75	72,48	103.91	70	103.54
1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,25	6,98	89,54	5,75	82,37
	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan yang berkeadilan Dan Berkelanjutan						



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025			Target Akhir RPD 2023 – 2026	% Capaian Thp Target Akhir RPD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Tujuan :						
	Terbangunnya Infrastruktur yang Memadai	Indeks Infrastruktur	68	65 (Data Kementerian PUPR 2023)	95,59	70	92,85
	Sasaran :						
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan	24,82	15,30 (Data Tahun 2024)	61,64	25,56	59,85
		Presentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik	71	49,30	69,44	73	57,53
2.2	Meningkatnya Layanan Air Minum Layak	Presentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	74,70	68,95	92,30	76,20	90,49
3.	Tujuan :						
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,98	81,78 (BPS Sulut)	113,61	72,00	113,58
	Sasaran :						
3.1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	60,00	74,08 (LKJIP DLH 2025)	123,47	60	123,47
3.2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	95,43	86,55 (LKJIP DLH 2025)	90,69	95,43	90,69
3.3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75,00	61,4 (LKJIP DLH 2025)	81,87	75,00	81,87
	Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri Bertumpu pada Potensi SumberDaya Lokal						
4	Tujuan :						
	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,58	4,96 *(Bolmong Dalam Angka 2026)	88,88	6,15	80,65
		Gini Ratio	0,315	0,354 *(BPS Provinsi Sulawesi Utara 2024)	112,38	0,310	114,19
	Sasaran :						
4.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	10,30	8,63 *(Bolmong Dalam Angka 2026)	83,78	10,35	83,38
		Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Sektor	2,5	3,40 *(Bolmong Dalam Angka 2026)	136	3	113,33



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025			Target Akhir RPD 2023 – 2026	% Capaian Thp Target Akhir RPD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi					
4.2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	10	4,33	43,30	10	43,30
	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bersih, Demokratis dan Bebas KKN						
5	Tujuan :						
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Nilai Rata Rata Capaian Opini BPK, Nilai SAKIP, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	84,75	63,55	75,99	87,75	72,42
	Sasaran :						
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Hijau (85)	Hijau (85,18)	100	Hijau	100
5.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih	Opini BPK	WTP	WTP *(Opini BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2024)	100	WTP	100
		Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB	B (65,92) *(Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025)	92,10	BB	92,84
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,8	3,0561 *(Hasil Evaluasi Dari Kemendagri Tahun 2023)	80,42	3,9	78,36
	Misi 5 : Mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur						
6	Tujuan :						
	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	85,04	79,08	93,05	85,15	92,87
	Sasaran :						
6.1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan	1,14	1,2	95	1,2	100



2.3.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Pengukuran kinerja terhadap tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang telah dicapai berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 1

Tujuan 1 Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berdaya Saing				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	70	71,83	102,61

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya adalah pengukuran perbandingan dan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua. IPM pada awalnya digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara berkembang atau negara terkebelakang dan juga mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berdasarkan data yang tersedia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2023 hingga tahun 2025 dimana pada tahun 2023 IPM Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh nilai 69,62 dan meningkat menjadi 71,14 pada tahun 2024. Selanjutnya di akhir tahun 2025, IPM kembali mencatatkan peningkatan sebesar 0,69 dibandingkan dengan tahun 2024 menjadi 71,83.

Peningkatan IPM ini mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, terutama dalam aspek



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Berikut data komponen IPM Kabupaten Bolaang Mongondow dalam 3 (tiga) Tahun terakhir

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia		
	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70.07	70.31	72.48
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8.36	8.38	8.49
Harapan lama Sekolah (Tahun)	11.63	11.65	11.82
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	10915	11507	1.220.151 (Sulut Dalam Angka 2026)
Indeks Pembangunan Manusia	69.62	71.14	71,83

:

Penyebab Keberhasilan Peningkatan IPM:

1. Peningkatan Angka Harapan Hidup: Pencanangan gerakan hidup bersih dan sehat, pemerataan dan peningkatan akses, mutu dan standar pelayanan kesehatan mendorong peningkatan Angka Harapan Hidup.
2. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah: Peningkatan dipicu oleh Program-program strategis penyediaan fasilitas pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP, standarisasi penyelenggaraan pendidikan (SNP) serta upaya peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kependidikan.
3. Peningkatan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan: Pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan per kapita memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik.

Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja IPM:

1. Pembiayaan : dukungan anggaran program-program kesehatan dan pendidikan belum fokus pada pencapaian indikator sasaran.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga medis yang berkualitas dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
3. Faktor Eksternal: Kondisi ekonomi global, bencana alam, atau pandemi dapat memengaruhi perekonomian daerah dan berdampak pada indikator-indikator IPM.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

1. Penataan Aparatur Sipil Negara dan Anggaran: Pemerintah daerah telah berupaya melakukan penataan penempatan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tuntutan Layanan Publik serta dukungan



anggaran untuk fokus mendukung program-program strategis yang mendorong ketercapaian Indikator Sasaran

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Program pelatihan bagi tenaga pendidik dan medis, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.
3. Diversifikasi Ekonomi: Upaya diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor potensial khususnya pada sektor Pertanian dan Pengembangan Sektor Pariwisata.

Meskipun terdapat tantangan, upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai target-target pembangunan yang ditetapkan. Dapat juga kita lihat dalam bentuk Grafik Berikut:



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 “Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan”

Sasaran 1 Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pendidikan (Tahun)	13,90	11,82 (HLS 2025)	85,03

Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu pilar fundamental dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berfungsi sebagai tolok ukur kualitas intelektual dan kapasitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Indeks ini tidak hanya merepresentasikan angka literasi, tetapi juga menjadi cerminan dari aksesibilitas serta kemajuan sistem pendidikan secara menyeluruh. Pengukurannya secara teknis



didasarkan pada 2 (dua) komponen utama yang saling melengkapi yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indeks Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow memperlihatkan tren peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Dari capaian sebesar 11,63 pada tahun 2023 meningkat menjadi 11,65 pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025 terjadi peningkatan lagi yang cukup signifikan ke angka 11,82. Meski demikian, angka tersebut belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPD sebesar 13,90 pada Tahun 2025.

Penyebab Keberhasilan Peningkatan Indeks Pendidikan:

1. **Perbaikan dan Optimalisasi Program Kegiatan yang menunjang pencapaian Target IKU :** Melakukan Koordinasi Intensif baik secara internal maupun eksternal serta berpedoman pada data analisis dan evaluasi tahun sebelumnya pada perumusan program-program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian IKU.
2. **Kemudahan Akses dan Kualitas Pendidikan:** Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kemudahan akses baik dari sisi transportasi berupa penyediaan Transportasi Bus Sekolah dan perbaikan akses jalan menuju sekolah khususnya di daerah terpencil serta Peningkatan Intensitas bantuan beasiswa berbagai kategori kepada Peserta didik.
3. **Program Pendidikan Inklusif:** Implementasi program pendidikan inklusif yang memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas.
4. **Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan:** Memperkuat supervisi akademik dan sistem evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah guna mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas.

Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja Indeks Pendidikan:

1. **Pemerataan Infrastruktur Pendidikan:** Infrastruktur Pendukung Kegiatan Pembelajaran belum terdistribusi secara merata sehingga berpengaruh pada kualitas pembelajaran peserta didik
2. **Tingkat Partisipasi Pendidikan yang Rendah:** selain Faktor ekonomi dan sosial yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, penduduk anak usia dini yang belum teridentifikasi pada satuan PAUD masih cukup banyak. Di sisi lain, rendahnya kesadaran kesadaran orang tua peserta didik dalam mendorong semangat peserta didik untuk bersekolah turut berkontribusi pada rendahnya capaian Indeks Pendidikan.



3. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Masih adanya Guru PNS dan Non PNS yang belum bersertifikat Pendidik serta belum maksimalnya pendataan, pemetaan dan distribusi tenaga guru berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

1. **Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Pendidikan:** Pemerintah daerah perlu membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas baru, laboratorium, dan perpustakaan, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
2. **Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan:** Meningkatkan Program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan prestasi pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
3. **Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pendidik:** Meningkatkan Kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan secara konsisten.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan Indeks Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

**Perbandingan Realisasi Indeks Pendidikan
Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025**

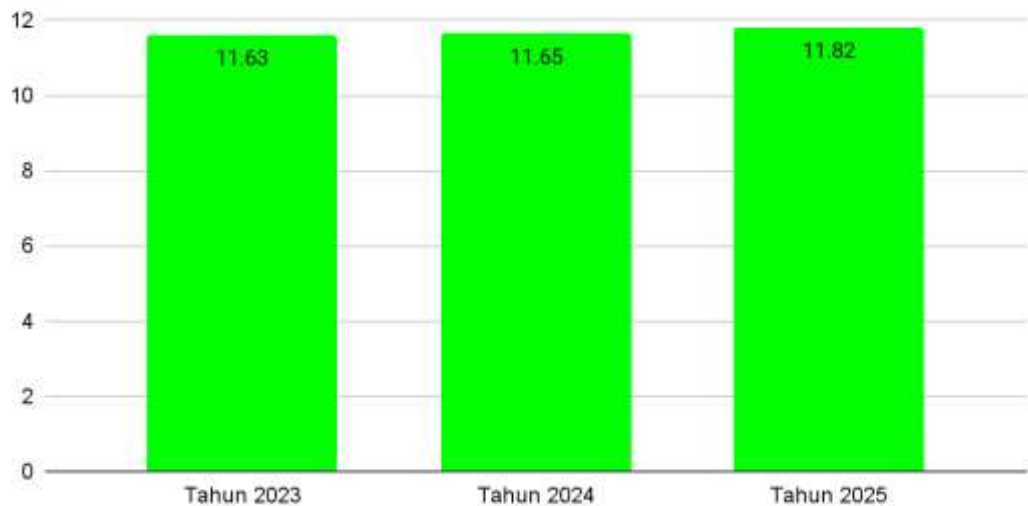
No	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Indeks Pendidikan	11,63	11,65	11,82

Tabel di atas menunjukkan adanya tren peningkatan capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam 3 tahun terakhir. Rata-rata peningkatan yang berhasil dicapai adalah sebesar 0,095 Poin. peningkatan signifikan tercatat antara tahun 2024 dan tahun 2025 yaitu dari angka 11,65 meningkat 0,17 poin ke angka 11,82. Namun meski capaian Indeks pendidikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, capaian tersebut belum berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Grafik berikut menggambarkan capaian target dan realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.



Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Bolaaang Mongondow Tahun 2023 - Tahun 2025



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 2

“Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta”

Sasaran 2				
Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata-Rata Usia Harapan Hidup (Angka)	69,75	72,48 (BPS)	103.91%

Rata - Rata Usia Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan atau ekspektasi dari usia bayi yang baru lahir mencapai kematiannya. Angka usia harapan hidup merupakan indikator kualitas kesehatan. Perhitungan capaian kinerja indikator **Usia Harapan Hidup (UHH)** = (Jumlah semua Umur masing-masing yang meninggal / jumlah orang yang meninggal pada tahun itu)

Pada 3 tahun terakhir, Indikator rata-rata usia harapan hidup menunjukkan adanya tren peningkatan. Hal ini dapat dilihat melalui capaian sejak tahun 2023, perolehan nilai indikator ini adalah 70,07 kemudian naik menjadi 70,31 pada 2024 dan di tahun 2025 meningkat lagi sebanyak 2,17 poin ke angka 72,48. Adapun persentase capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 103,91%.

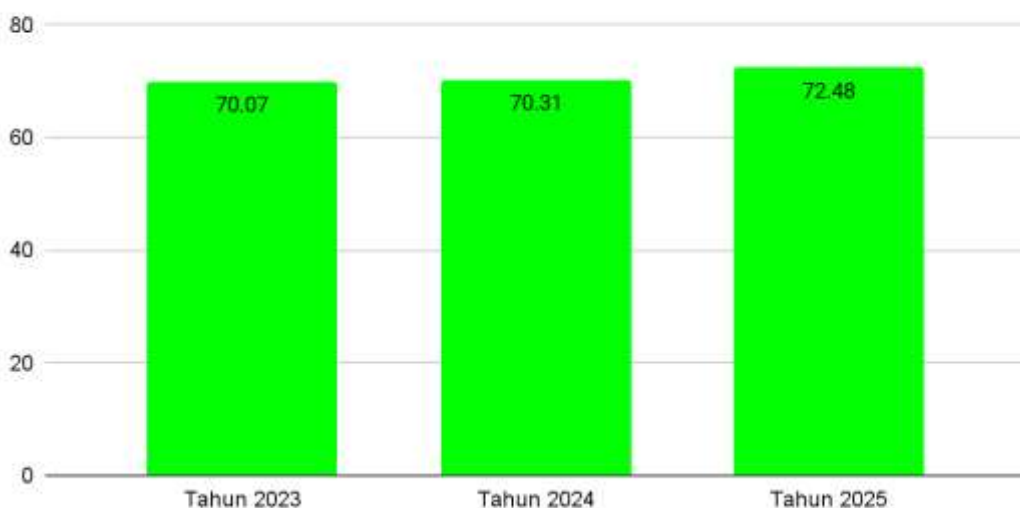


Perbandingan Realisasi Rata-rata Usia Harapan
Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Rata-Rata Usia Harapan Hidup	70,07	70,31	72,48

Tren peningkatan pada Capaian kinerja angka usia harapan hidup dalam beberapa tahun juga dapat kita lihat pada grafik berikut :

Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2023 - 2025



Faktor-faktor keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah upayakan terhadap Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025:

Faktor Penyebab Peningkatan AHH

Beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada peningkatan AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi:

- **Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan :** Adanya Penambahan Dokter dan Tenaga Kesehatan melalui pengangkatan PPPK pada Puskesmas dan Pustu/Polindes memungkinkan peningkatan pada Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat.
- **Peningkatan Fasilitas Kesehatan:** Pembangunan dan standarisasi fasilitas kesehatan pada puskesmas dan rumah sakit dengan mengacu pada Standar Kesehatan Nasional (SKN), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta implementasi Standar Pelayanan Publik pada beberapa Puskesmas di wilayah padat penduduk yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB-RI dan Ombudsman-RI



- **Program Kesehatan Masyarakat:** Program-program pada sektor kesehatan terus dioptimalkan seperti Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah, Program Imunisasi untuk anak (UCI), pemanfaatan aplikasi e-PPGBM untuk intervensi pemberian Makanan Tambahan (PMT)
- **Pemeliharaan Lingkungan Hidup:** Lingkungan yang sehat melalui keberhasilan Capaian target Indeks Lingkungan Hidup serta program pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.
- **Kesadaran Masyarakat akan Pola Hidup Sehat:** Kampanye dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan dalam meningkatkan pola hidup sehat masyarakat.
- **Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan:** Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan semakin baik.

Faktor Penyebab Penurunan AHH

Beberapa kendala yang dapat menyebabkan penurunan AHH, antara lain:

- **Meningkatnya angka kematian Ibu dan Balita :** Hal ini dapat disebabkan oleh masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal, terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan serta peningkatan biaya kesehatan bagi penduduk miskin.
- **Sarana dan Prasarana Kesehatan:** Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang belum memadai dan belum merata antar fasilitas kesehatan.
- **Data dan Informasi Kesehatan:** Belum optimalnya ketersediaan dan dan informasi kesehatan mempengaruhi kualitas perencanaan program preventif maupun promotif khususnya yang berhubungan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup
- **Sumberdaya Manusia Kesehatan :** Belum terpenuhinya Jumlah dan jenis serta penyebaran Tenaga Kesehatan yang berkualitas.
- **Pola Hidup Sehat:** Kesadaran akan pola hidup sehat (PHBS) dan sanitasi lingkungan pada sebagian masyarakat terutama di kalangan berpendidikan rendah, miskin dan menempati daerah kumuh masih rendah.

Alternatif Solusi yang Dilakukan

Untuk mengatasi tantangan yang ada, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerapkan beberapa solusi:

- **Peningkatan Infrastruktur Kesehatan:** Pembangunan puskesmas dan rumah sakit baru, terutama di wilayah pedesaan.



- **Program Asuransi Kesehatan Gratis:** Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat kurang mampu.
- **Peningkatan Kualitas Gizi:** Program pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil guna mengurangi angka kematian bayi serta meningkatkan kesehatan ibu.
- **Kampanye Gaya Hidup Sehat:** Penyuluhan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga, pola makan sehat, serta pengurangan konsumsi rokok dan alkohol.
- **Revitalisasi Program Posyandu:** Peningkatan peran posyandu dalam memberikan layanan kesehatan bagi ibu dan anak.
- **Pengelolaan Lingkungan yang Lebih Baik:** Program penghijauan, penyediaan akses air bersih, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan.
- **pelayanan kesehatan langsung :** Kunjungan ke rumah-rumah di setiap desa, menjangkau masyarakat terpencil yang sulit mengakses puskesmas maupun rumah sakit.

Kesimpulan

Peningkatan AHH di Bolaang Mongondow dipacu oleh penguatan tenaga kesehatan, standarisasi fasilitas kesehatan, dan program gizi yang optimal. Meski begitu, tantangan seperti angka kematian ibu/bayi dan ketimpangan akses masih perlu diatasi. Melalui solusi strategis seperti perluasan infrastruktur, jaminan BPJS, revitalisasi Posyandu, dan perbaikan sanitasi, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan secara inklusif demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pebandingan Capaian Angka Usia Harapan Hidup Kab.Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Dan Nasional

Tahun	Target Angka Usia Harapan Hidup Bolaang Mongondow	Capaian Angka Usia Harapan Hidup Bolaang Mongondow	Angka Usia Harapan Hidup Sulawesi Utara	Angka Usia Harapan Hidup Nasional
2023	69,55	70,07	73,85	73,93
2024	69,65	70,31	74,08	74,15
2025	69,75	72,48	74,44	74,47



**ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 3
"MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN"**

Sasaran 3 Menurunnya Angka Kemesikinan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kemiskinan	6,25	6,98 (BPS)	89,54%

Kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Terdapat 5 (lima) indikator kemiskinan yang menjadi perhatian dalam melihat angka kemiskinan. Hal tersebut yakni Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 adalah 6,98%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 18,40 ribu jiwa.

Analisis Penyebab Penurunan Angka Kemiskinan:

1. **Optimalisasi Pendataan Masyarakat PMKS pada aplikasi Siks-NG :** Adanya penambahan operator aplikasi Siks-NG pada Dinas Sosial dan 202 Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Bolaang Mongondow menghasilkan proses verifikasi dan validasi Data PMKS yang lebih cepat dan efisien sehingga memungkinkan penyaluran Program-program sosial lebih cepat dan tepat sasaran.
2. **Peningkatan Jumlah UMKM :** Tingginya Kesadaran Masyarakat untuk mengembangkan ekonomi keluarga melalui UMKM menyebabkan Jumlah UMKM yang semula berjumlah 6000 UMKM meningkat hingga 12.875 UMKM sehingga turut berkontribusi dalam peningkatann perekonomian serta penurunan angka kemiskinan
3. **Penyediaan Bantuan Pendidikan:** Bantuan dalam bentuk Penyediaan Subsidi dan Beasiswa bagi Peserta Didik berprestasi dan dari Keluarga kurang mampu/terancam putus sekolah berkontribusi pada kesiapan dan kemandirian ekonomi
4. **Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan:** Rapat Koordinasi Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah dilaksanakan untuk menyinkronkan program penanggulangan kemiskinan dan memantau implementasi rencana aksi di bidang kemiskinan. Langkah ini memastikan efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan.



Tantangan yang Dihadapi:

1. **Penyebaran Kemiskinan di Daerah Terpencil:** Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Wilayah Kabupaten Terluas di Provinsi Sulawesi Utara membuat masyarakat di pelosok kesulitan mengakses Layanan Bantuan Sosial atau pengurusan administrasi kemiskinan.
2. **Keterbatasan Sumber Daya:** Anggaran yang terbatas membatasi cakupan dan skala program penanggulangan kemiskinan yang dapat dilaksanakan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

1. **Desentralisasi Layanan:** Melaksanakan Pelayanan Jemput Bola ke Daerah Pelosok serta bekerjasama dengan perangkat pemerintah yang ada di masing-masing wilayah.
2. **Kemitraan dengan Sektor Swasta:** Kerja sama dengan perusahaan swasta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
3. **Digitalisasi Layanan:** Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan dan penyaluran bantuan sosial guna memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi proses.

Kesimpulan: Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 merupakan hasil dari berbagai upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya masih perlu diatasi melalui inovasi dan kerja sama yang lebih intensif untuk mencapai target pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

**Perbandingan Realisasi Indikator Angka Kemiskinan
Tahun 2023 Sampai dengan 2025**

No	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Angka Kemiskinan	7.37	7.74	6,98

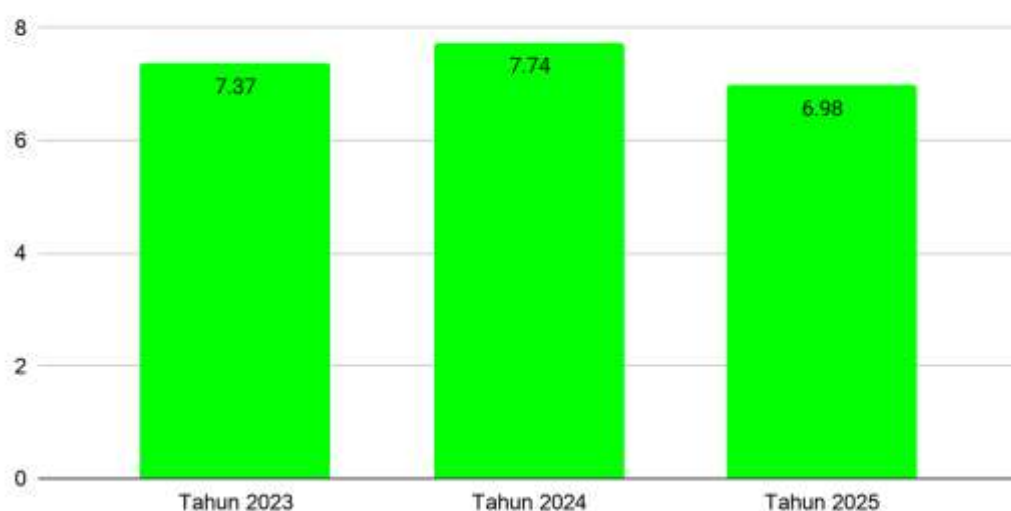
Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dari Angka Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam 3 tahun terakhir cukup fluktuatif dimana pada tahun 2023 persentase Angka Kemiskinan sebesar 7,37 % kemudian terjadi peningkatan persentase sebesar 0,37 Persen pada tahun 2024



menjadi 7,74% disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk Miskin yang semula berjumlah 19,02 ribu jiwa menjadi 20,19 ribu jiwa. Pada tahun 2025, persentase angka kemiskinan kembali mengalami penurunan sebesar 0,76 Persen dari Tahun sebelumnya ke angka 6,98 % atau sebanyak 18,40 ribu jiwa.

Angka Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
2023 - 2025



ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 2

Tujuan 2				
Terbangunnya Infrastruktur Yang Memadai				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Infrastruktur	68	65	95,59

Pembangunan infrastruktur secara masif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau *"middle income trap"*.

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus Bergeraknya Kabupaten Bolaang Mongondow aktivitas ekonomi. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, kita tentunya berharap dapat tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang



pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.

Tabel di bawah memuat data Capaian Indeks Infrastruktur 3 tahun terakhir dimana untuk tahun 2025 realisasi nilai Indeks Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow masih Mengacu Data Tahun 2024 yaitu berada di Angka 65 dengan Capaian Kinerja sebesar 95,59%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian pada Tahun 2023, Indeks Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow Masih sama yaitu berada di Angka 65. Hal ini disebabkan semenjak Tahun 2023 – 2025 Kementerian PUPR belum merilis Indeks Infrastruktur untuk Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

**Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Infrastruktur
Tahun 2023 Sampai dengan 2025**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realiasi Tahun 2024	Realiasi Tahun 2025
1	Indeks Infrastruktur(%)	65	65	65

Analisis terhadap kinerja infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan adanya upaya signifikan dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur. Pembangunan Bendungan Lolak, misalnya, dengan kapasitas 16 juta meter kubik, bertujuan mengairi 2.200 hektare lahan pertanian dan mengurangi risiko banjir hingga 29% di wilayah sekitar.

Selain itu, peresmian Instruksi Jalan Daerah (IJD) oleh Presiden Jokowi diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow, Namun, evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Bolaang Timur menunjukkan bahwa meskipun tahapan pelaksanaan pembangunan telah diikuti dan masyarakat diberdayakan melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), serta Kelompok Desa (KD), masih terdapat kendala dalam efektivitas pelaksanaan.

Kinerja kepala desa dalam aspek komunikasi, tanggung jawab, keaktifan pemimpin, dan motivasi juga ditemukan masih rendah, yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur desa. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa solusi alternatif telah diterapkan, seperti pengoperasian tiga infrastruktur kelistrikan oleh PLN yang



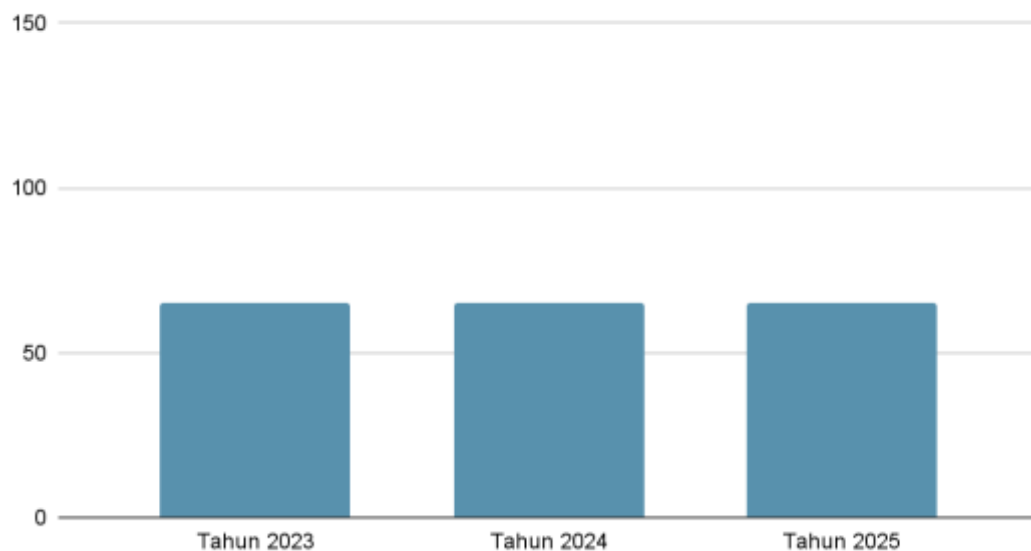
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

meningkatkan keandalan pasokan listrik dan membuka peluang investasi di wilayah Bolaang Mongondow Selatan . Selain itu, peningkatan peran fasilitator masyarakat dalam membimbing dan mengarahkan OMS, KD, dan KPP mulai dari tahap penyiapan hingga pelaporan dan penyerahan infrastruktur yang dibangun kepada KPP dan pemerintah desa juga telah dilakukan

Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya signifikan dalam meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow, masih diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi dan tanggung jawab aparat desa untuk mencapai kinerja yang optimal.

Indeks Infrastruktur



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 4 “Meningkatnya Infrastruktur Transportasi”

Sasaran 4 Meningkatnya Infrastruktur Transportasi				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan (Angka)	24,82	15,30	61,64

Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan (Angka)

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Indikator



Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2025 dari target 24,82 terealisasi 15,30 dengan Capaian 61,64%.

**Perbandingan Realisasi Rasio Panjang Jalan
Dengan Jumlah Kendaraan Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2025**

No	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan (Angka)	23,39	15,30	15,30

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023–2025, terlihat adanya perubahan capaian indikator pada periode tersebut. Pada tahun 2023, realisasi rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan tercatat sebesar 23,39. Nilai ini menggambarkan perbandingan antara panjang jalan yang tersedia dengan jumlah kendaraan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun tersebut.

Pada tahun 2024, realisasi rasio tercatat sebesar 15,30. Perubahan nilai rasio tersebut menunjukkan adanya dinamika antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan ketersediaan panjang jaringan jalan di daerah kabupaten bolaang mongondow. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan panjang jalan yang tersedia.

Sementara itu, data realisasi indikator Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Tahun 2025 masih menggunakan data realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 15,30. Secara umum, indikator rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan di Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan gambaran mengenai tingkat ketersediaan infrastruktur jalan dalam mendukung mobilitas kendaraan serta menjadi salah satu dasar dalam perencanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan infrastruktur transportasi di daerah.

Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:

1. **Peningkatan pembangunan dan penanganan jaringan jalan kabupaten:** panjang jalan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat semakin bertambah dan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi daerah.



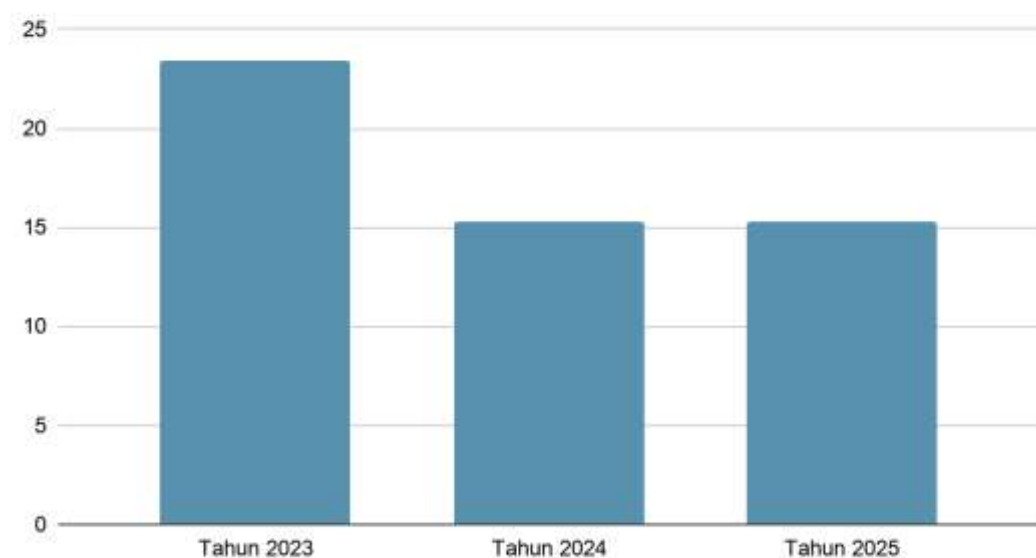
2. **Pengendalian Pertumbuhan Kendaraan:** Adanya kebijakan yang efektif dalam mengatur pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, seperti regulasi kepemilikan kendaraan dan peningkatan layanan transportasi umum, membantu menjaga keseimbangan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

1. **Pelaksanaan pembangunan jalan kabupaten:** untuk menambah panjang jaringan jalan yang dapat melayani mobilitas kendaraan dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah.
2. **Pelaksanaan peningkatan jalan:** melalui peningkatan struktur dan permukaan jalan sehingga kapasitas pelayanan jalan terhadap lalu lintas kendaraan menjadi lebih baik.
3. **Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan:** melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada ruas jalan yang mengalami kerusakan sehingga dapat kembali berfungsi secara optimal dalam mendukung mobilitas transportasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil meningkatkan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan, yang berkontribusi pada kelancaran lalu lintas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Sasaran 4 Meningkatnya Infrastruktur Transportasi				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)	71	49,30 (BPS Bolmong 2026)	69,44

Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)

Berdasarkan tabel indikator kinerja, ditetapkan target sebesar **71%**. Namun, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar **49,30%**. Jika dipersentasekan terhadap target yang ada, maka tingkat capaian kinerja indikator ini berada pada angka **69,44%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan jalan kabupaten. Meskipun demikian, realisasi yang diperoleh masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan penanganan lebih lanjut agar dapat mencapai kondisi baik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

**Perbandingan Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik
Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)	67	56,51	49,30 (BPS Bolmong 2026)

Berdasarkan tabel perbandingan persentase panjang jalan dengan kondisi baik Tahun 2023–2025, dapat dijelaskan bahwa kinerja infrastruktur jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Pada Tahun 2023, persentase panjang jalan dengan kondisi baik tercatat sebesar **67%**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar ruas jalan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun tersebut masih berada dalam kondisi yang baik dan dapat mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian daerah. Namun demikian, pada Tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi **56,51%**. Penurunan ini mengindikasikan adanya berkurangnya proporsi ruas jalan yang berada dalam kondisi baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya tingkat kerusakan jalan akibat intensitas penggunaan jalan yang tinggi, faktor cuaca, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan.



Selanjutnya pada Tahun 2025, persentase panjang jalan dengan kondisi baik kembali mengalami penurunan menjadi **49,30%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh total panjang jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow berada dalam kondisi baik. Data tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan penanganan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum, tren penurunan persentase panjang jalan dengan kondisi baik selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa upaya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan perlu terus diperkuat melalui perencanaan yang lebih optimal, pengalokasian anggaran yang memadai, serta peningkatan efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan guna mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Kinerja:

1. Adanya kegiatan peningkatan struktur jalan serta rehabilitasi pada beberapa ruas jalan kabupaten memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kondisi jalan, sehingga persentase jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan.
2. Kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara rutin maupun berkala mampu menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi baik serta mencegah kerusakan yang lebih berat pada ruas jalan kabupaten.

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

1. Masih sebagian kecil ruas jalan kabupaten yang dapat dipelihara untuk mempertahankan jalan dalam kondisi dikarenakan keterbatasan dana.
2. Masih adanya ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak/rusak berat.
3. Belum optimalnya pengembangan di beberapa jaringan infrastruktur jaringan jalan guna mendukung produktifitas bidang pariwisata, pertanian, perkebunan maupun pertambangan, baik yang baru dieksplorasi maupun yang telah dieksploitasi secara tidak langsung ikut mempengaruhi perkembangan jaringan jalan di daerah tersebut.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

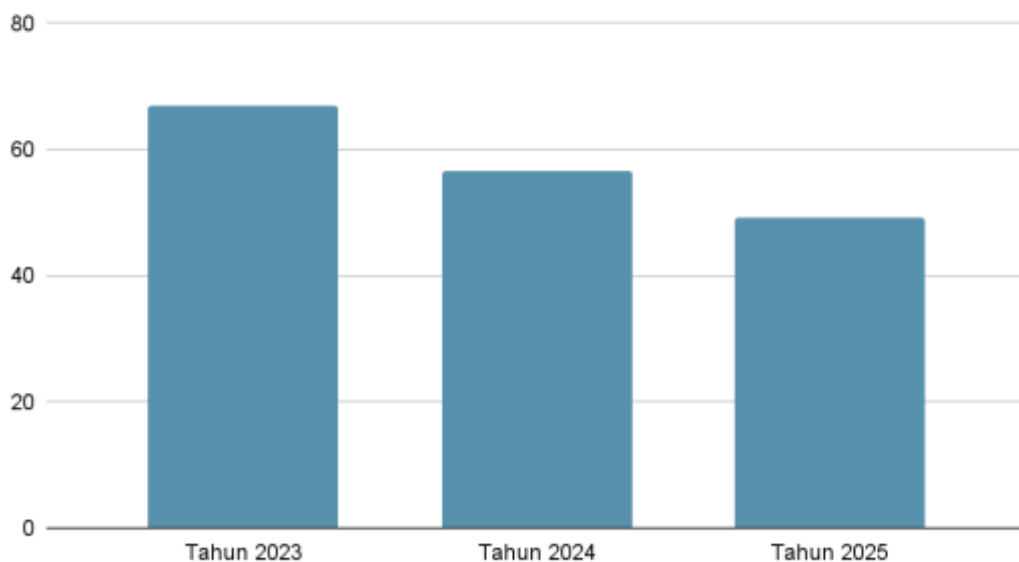
1. Permohonan pengajuan penambahan anggaran untuk Pengelolaan jaringan irigasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah dilaksanakan.



2. **Pemeliharaan Rutin dan Rehabilitasi:** Pelaksanaan program pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan secara berkala untuk memastikan jalan tetap dalam kondisi baik.
3. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:** Pembangunan infrastruktur pendukung seperti drainase yang baik untuk mencegah kerusakan jalan akibat genangan air atau banjir.

Melalui serangkaian upaya strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terus berupaya menjaga kualitas infrastruktur jalan pada tahun 2025. Meskipun terjadi tekanan pada rasio panjang jalan akibat pertumbuhan jumlah kendaraan, fokus pada pemeliharaan berkala dan pembangunan drainase tetap memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran mobilitas masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah.

Presentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 5 "Meningkatnya Layanan Air Minum Layak"

Sasaran 5 Meningkatnya Layanan Air Minum Layak				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%)	74,70	68,95 (LKJIP PUPR 2025)	92,30

Pada tahun 2025, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan peningkatan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak menjadi 74,70% terealisasi 68,95% dengan Capaian Kinerja 92,30%.



**Perbandingan Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak
Tahun 2023 sampai dengan 2025**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%)	68,57	68,63	68,95 (LKJIP PUPR 2025)

Berdasarkan tabel di atas, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2023–2025, di mana capaian tumbuh dari 68,57% pada tahun 2023 menjadi 68,63% di tahun 2024, dan mencapai angka tertinggi sebesar 68,95% pada tahun 2025. Kenaikan total sebesar 0,38 poin persentase ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dalam perluasan akses air minum layak, dengan akselerasi pertumbuhan yang lebih signifikan terlihat pada transisi menuju tahun 2025.

Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:

1. Adanya dukungan serta anggaran dana dari desa dalam pembangunan air minum.
2. Adanya program dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk pengelolaan dan pengembangan sistem air minum di desa.
3. Adanya program Kementrian PUPR Direktorat Cipta Karya untuk program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
4. Kondisi rumah tangga berakses air minum layak berdasarkan isu-isu strategis bidang cipta karya maka Penyediaan infrastruktur perkotaan untuk air bersih dapat ditingkatkan.

Hambatan:

1. Kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Masih ada kurangnya kesadaran dari masyarakat tertentu untuk pembangunan sistem penyediaan air minum dikarenakan penolakan masyarakat untuk dilaksanakannya pekerjaan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

1. Melakukan permohonan penambahan anggaran lewat tim anggaran pemerintah daerah.



2. Melakukan sosialisasi untuk pentingnya pembangunan SPAM kepada masyarakat lewat musrenbang desa/kecamatan untuk diusulkan ke tingkat musrenbang kabupaten.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 3 “MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP”

Tujuan 3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,98	81,78	113,61

Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh - sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya.

Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dengan target Nilai Indeks 71,98 terealisasi sebesar 81,78.



Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,33	75,33 (Statistik Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2023)	81,78 (BPS Sulut)

Berdasarkan tabel perbandingan **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023–2025**, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan tren peningkatan pada tahun terakhir periode pengukuran.

Pada Tahun 2023, nilai **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** tercatat sebesar **75,33**. Nilai ini menggambarkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow berada pada kategori cukup baik berdasarkan komponen penyusunnya yang meliputi kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Selanjutnya pada Tahun 2024, nilai IKLH masih berada pada angka **75,33**, yang mengacu pada hasil perhitungan yang dirilis oleh **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023**. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas lingkungan hidup di daerah masih relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2025, capaian **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi **81,78** berdasarkan data **BPS Provinsi Sulawesi Utara**. Peningkatan nilai ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai upaya pengelolaan lingkungan, seperti pengendalian pencemaran lingkungan, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, tren peningkatan nilai IKLH pada periode 2023–2025 menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow mulai memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan. Hal ini menjadi indikator penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.



Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:

1. Penyusunan Kebijakan dan Rencana Strategis:
 - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2023-2026, yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak dan sanitasi yang baik.
2. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:
 - Melalui program edukasi dan sosialisasi, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Pengembangan Infrastruktur Hijau:
 - Upaya pengembangan konsep kota hijau telah diterapkan, meskipun masih perlu ditingkatkan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kota hijau di Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 46,5%, yang berada di bawah rata-rata.

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

1. Keterbatasan Data dan Informasi:
 - Kurangnya data terkini mengenai IKLH menyulitkan evaluasi dan perencanaan program lingkungan yang efektif.
2. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan:
 - Meskipun kebijakan telah disusun, pelaksanaan di lapangan sering menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi.

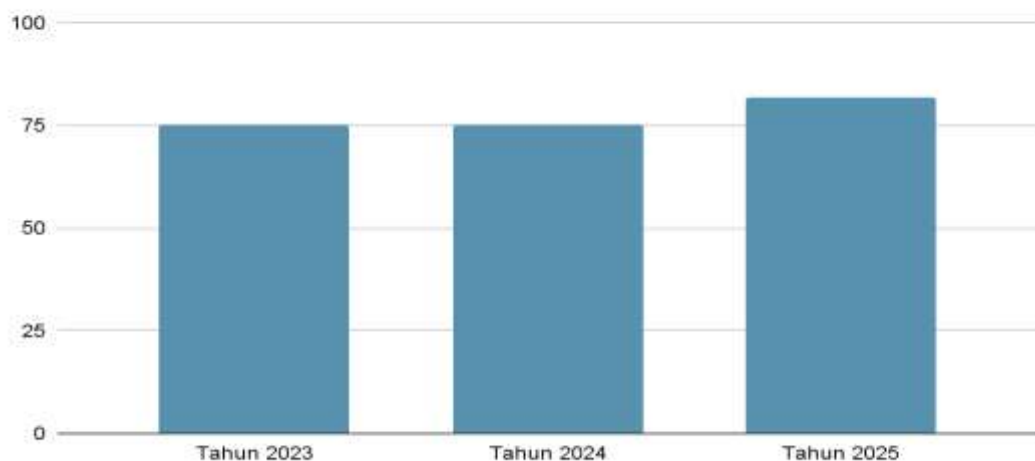
Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:

1. Penguatan Kapasitas Institusi:
 - Meningkatkan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif.
2. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan:
 - Membangun dan memelihara infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah untuk mencegah pencemaran lingkungan.
3. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan:
 - Bekerja sama dengan sektor swasta, komunitas, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program lingkungan yang berkelanjutan.
4. Pemantauan dan Evaluasi Berkala:
 - Melakukan pemantauan rutin terhadap indikator lingkungan dan mengevaluasi efektivitas program untuk perbaikan berkelanjutan.



Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target IKLH yang lebih baik di masa mendatang, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2023 - 2025



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 6 “MENINGKATNYA KUALITAS AIR”

SASARAN 6 MENINGKATNYA KUALITAS AIR				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Air	60,00	74,08 (LKJIP DLH 2025)	123,47

Capaian kinerja Indeks Kualitas Air pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 74,08 atau melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 60. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian pencemaran serta pemantauan kualitas air yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan dampak positif terhadap kondisi kualitas air di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Indeks Kualitas Air	50,00	55,00	74,08 (LKJIP DLH 2025)



Pada Tahun 2025 dari perhitungan Indeks Kualitas Air pada tahun 2025 Dari Target 60 terealisasi sebesar 74,08 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 55,00 persen Indikator Indeks Kualitas Air Meningkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penurunan yang signifikan dimana terdapat alih fungsi lahan menjadi pertambangan ilegal.

Peningkatan kinerja indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung keberhasilan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air dan pemantauan kualitas air. Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:

1. **Bertambahnya jumlah titik sungai yang memenuhi baku mutu air:**
 - o Indikator Indeks Kualitas Air mencapai 74,08 untuk capaian Kinerja mencapai Target Hal ini disebabkan karena dari 5 jumlah Sungai yang dipantau di tahun 2025 terdapat tiga jumlah titik Sungai (bertambah dua) yang telah memenuhi mutu air dan sudah tidak ada lagi Sungai dengan status cemar sedang.
2. **Sebagian besar parameter kualitas air telah memenuhi baku mutu lingkungan:**
 - o Hasil pengujian terhadap berbagai parameter kualitas air menunjukkan bahwa sebagian besar parameter telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Dari sejumlah parameter yang diuji, hanya sebagian kecil yang melampaui ambang batas sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas air.
3. **Pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup:**
 - o Keberhasilan peningkatan kualitas air juga didukung oleh pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Program ini mencakup berbagai kegiatan pencegahan dan pengendalian sumber pencemar yang berpotensi menurunkan kualitas air.



Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

1. **Adanya Alih Fungsi Lahan Menjadi Pertambangan Ilegal:**
 - o Kegiatan alih fungsi lahan menjadi pertambangan ilegal dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti meningkatnya potensi pencemaran air dan kerusakan daerah aliran sungai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penurunan kualitas air
2. **Potensi Pencemaran dari Aktivitas di Daerah Aliran Sungai:**
 - o Adanya beberapa daerah aliran sungai yang rawan mengalami gangguan lingkungan serta aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran dapat mempengaruhi kualitas air sungai apabila tidak dilakukan pengendalian secara optimal.
3. **Belum Optimalnya Sinergi Program Antar Sektor:**
 - o Pelaksanaan program pengendalian pencemaran lingkungan masih menghadapi kendala berupa kurangnya koordinasi dan sinergi antara program dan kegiatan lintas sektor, sehingga upaya pengendalian pencemaran air belum berjalan secara terpadu dan maksimal.

Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:

1. **Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengujian Kualitas Air:** Melaksanakan pemantauan kualitas air secara berkala pada titik-titik sungai yang dipantau serta meningkatkan kegiatan uji laboratorium terhadap parameter kualitas air. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas air secara lebih akurat sehingga langkah pengendalian pencemaran dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
2. **Optimalisasi Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:** Melaksanakan program pengendalian pencemaran lingkungan secara lebih optimal melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap sumber pencemar di wilayah sungai dan daerah aliran sungai. Program ini merupakan program utama yang mendukung peningkatan kualitas air.
3. **Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Sektor:** Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara perangkat daerah, instansi terkait, serta pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terpadu dan lebih efektif.
4. **Pemanfaatan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online:** Mengoptimalkan penggunaan sistem Online Monitoring (ONLIMO) untuk memantau kualitas air secara berkelanjutan sehingga dapat

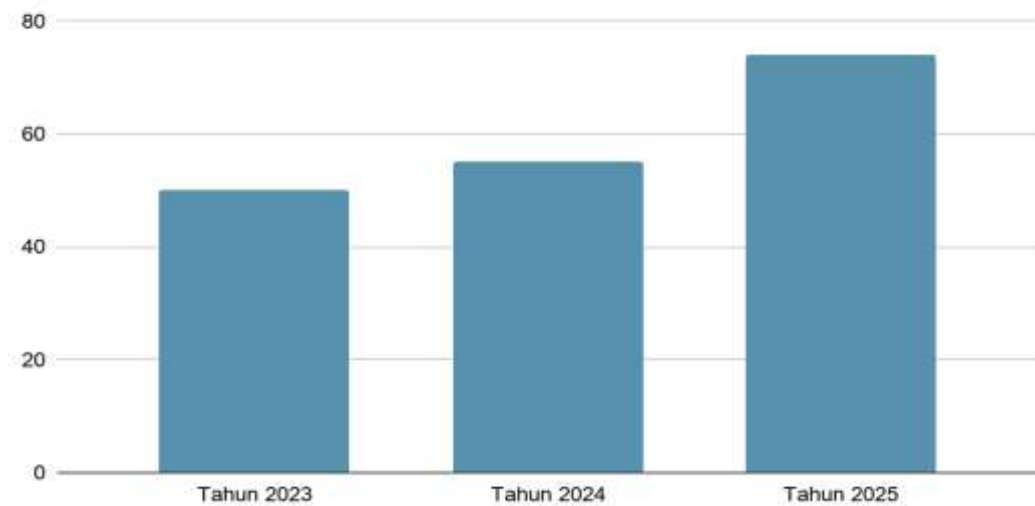


mendeteksi lebih cepat terjadinya penurunan kualitas air dan mempermudah proses pengawasan lingkungan.

5. **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat:** Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pencemaran lingkungan serta memberikan informasi peringatan dini terkait pencemaran lingkungan agar masyarakat turut berperan dalam menjaga kualitas air dan lingkungan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target peningkatan Indeks Kualitas Air pada tahun 2025, sehingga mendukung kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Indeks Kualitas Air Tahun 2023 - 2025



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 7 "MENINGKATNYA KUALITAS UDARA"

SASARAN 7 MENINGKATNYA KUALITAS UDARA				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Udara	95,43	86,55 (LKJIP DLH 2025)	90,69

Capaian indikator Indeks Kualitas Udara pada Sasaran 7 yaitu *Meningkatnya Kualitas Udara* menunjukkan bahwa pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 95,43, dengan realisasi sebesar 86,55 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 90,69%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja indikator belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, namun secara umum masih berada pada kategori sangat baik.



Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Indeks Kualitas Udara	95,87	93,13	86,55 (LKJIP DLH 2025)

Capaian indikator Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari target yang ditetapkan sebesar 95,43, realisasi yang dicapai sebesar 86,55, sehingga menunjukkan adanya penurunan kinerja apabila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024 yaitu sebesar 93,13.

Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:

1. **Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara Secara Berkala:**
 - o Peningkatan kinerja Indeks Kualitas Udara didukung oleh pelaksanaan pemantauan kualitas udara pada beberapa lokasi sampling. Pemantauan ini dilakukan terhadap parameter utama kualitas udara sehingga kondisi kualitas udara dapat diketahui dan dikendalikan secara berkala.
2. **Dukungan program pengendalian pencemaran lingkungan:**
 - o Pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup memberikan kontribusi dalam menjaga kualitas udara. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengendalian pencemaran yang bertujuan untuk meminimalkan sumber emisi pencemar udara.
3. **Pelaksanaan pemantauan kualitas udara secara berkala:**
 - o Kegiatan pemantauan kualitas udara yang dilakukan pada beberapa titik lokasi sampling memberikan data yang akurat mengenai kondisi udara ambien di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemantauan ini dilakukan dengan metode passive sampler dan dilaksanakan secara berkala sehingga memungkinkan pengendalian kualitas udara dapat dilakukan secara lebih efektif.

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

Penurunan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya nilai parameter pencemar udara yang dipantau pada beberapa titik lokasi pengambilan sampel. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara, terdapat kenaikan pada dua parameter utama yaitu **Sulfur Dioksida (SO₂)** sebesar **1,41 mg/m³** dan



Nitrogen Dioksida (NO_2) sebesar **1,16 mg/m^3** , yang berkontribusi terhadap menurunnya nilai indeks kualitas udara.

Selain itu, faktor lingkungan juga turut mempengaruhi kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, khususnya adanya **penebangan pohon di sekitar kawasan industri** yang menyebabkan berkurangnya tutupan vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap polutan udara. Berkurangnya vegetasi tersebut berpotensi meningkatkan konsentrasi pencemar udara di lingkungan sekitar kawasan industri sehingga berdampak pada menurunnya nilai indeks kualitas udara.

Di samping faktor lingkungan tersebut, keterbatasan dukungan program dan kegiatan pengendalian pencemaran udara juga menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pengendalian kualitas udara. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya biaya analisis laboratorium dalam pengukuran kualitas lingkungan serta belum optimalnya sinergi program dan kegiatan lintas sektor, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran udara belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

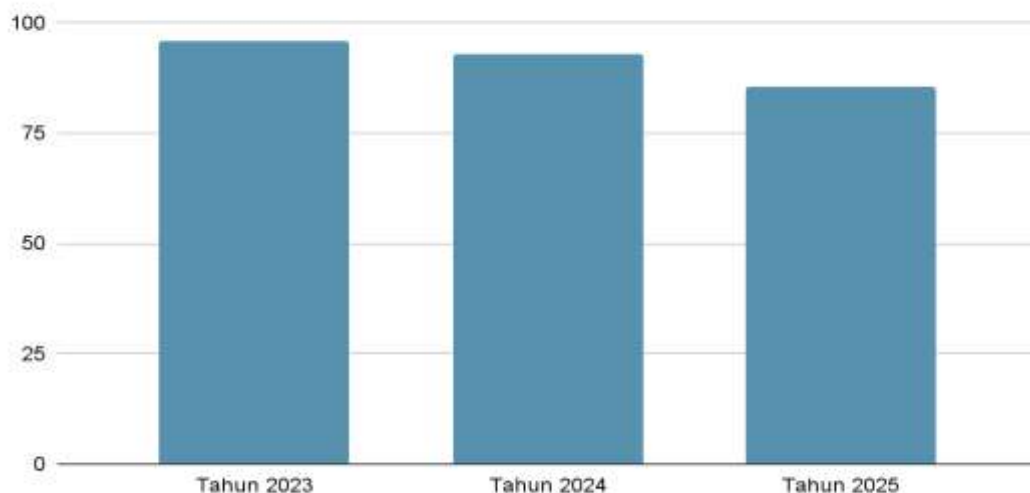
Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:

1. **Penguatan Program Pengendalian Pencemaran Udara:**
Melaksanakan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara lebih optimal, terutama pada wilayah yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara seperti kawasan industri dan wilayah dengan aktivitas transportasi tinggi.
2. **Rehabilitasi dan Penanaman Pohon:**
Melakukan **penanaman kembali pohon (reboisasi)** di sekitar kawasan industri dan daerah yang mengalami penebangan pohon untuk meningkatkan kemampuan lingkungan dalam menyerap polutan udara dan memperbaiki kualitas udara.
3. **Edukasi dan Partisipasi Masyarakat:**
Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas udara, seperti pengurangan pembakaran sampah terbuka dan peningkatan penghijauan di lingkungan permukiman.
4. **Peningkatan Pemantauan Kualitas Udara:**
Memperluas jumlah titik sampling dan frekuensi pemantauan kualitas udara agar data yang diperoleh lebih akurat serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengendalian pencemaran udara.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target Indeks Kualitas Udara yang telah ditetapkan pada tahun 2025, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.



Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 - 2025



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 8 "MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN"

SASARAN 8 MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75,00	61,4 (LKJIP DLH 2025)	81,87

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan, capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 61,4 dari target yang ditetapkan sebesar 75,00, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 81,87%.

Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75,72	61,4	61,4 (LKJIP DLH 2025)

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023–2025, dapat dijelaskan bahwa nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2023 tercatat sebesar 75,72. Pada tahun 2024 terjadi penurunan nilai indeks menjadi 61,4, yang menunjukkan



adanya perubahan kondisi tutupan lahan yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

Selanjutnya pada tahun 2025, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tercatat tetap sebesar 61,4, atau tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan dan perlindungan tutupan lahan belum mampu meningkatkan nilai indeks, namun juga berhasil menahan penurunan lebih lanjut dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2024 dan 2025 masih berada pada tingkat yang lebih rendah.

Analisis yang terdapat dalam dokumen laporan kinerja, kondisi tersebut dipengaruhi oleh alih fungsi lahan yang terjadi di beberapa wilayah menjadi aktivitas pertambangan ilegal, yang berdampak terhadap menurunnya kualitas tutupan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Faktor-Faktor Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:

1. **Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:** Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengendalikan degradasi lingkungan.
2. **Pengawasan terhadap Pemanfaatan Lahan:** Pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan turut membantu menjaga kondisi tutupan lahan agar tetap terjaga.
3. **Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:** Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga tutupan lahan telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program konservasi.

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

1. **Alih Fungsi Lahan:** Perubahan penggunaan lahan dari kawasan hutan atau vegetasi alami menjadi lahan pertanian, perkebunan, permukiman, serta pembangunan infrastruktur menyebabkan berkurangnya luas tutupan vegetasi yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem.
2. **Keterbatasan Data Rehabilitasi Lahan:** Tidak tersedianya data yang lengkap mengenai luas areal rehabilitasi hutan dan lahan serta luas belukar di area penggunaan lain (APL) menyebabkan proses perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak dapat dilakukan secara optimal.



3. **Tingginya Biaya Analisa Laboratorium:** Tingginya biaya analisa laboratorium dalam mengukur kualitas lingkungan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan secara optimal, sehingga dapat mempengaruhi proses evaluasi dan pengendalian terhadap kondisi tutupan lahan.
4. **Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI):** Kegiatan PETI di wilayah Bolaang Mongondow telah menyebabkan degradasi lahan dan penurunan kualitas tutupan lahan.

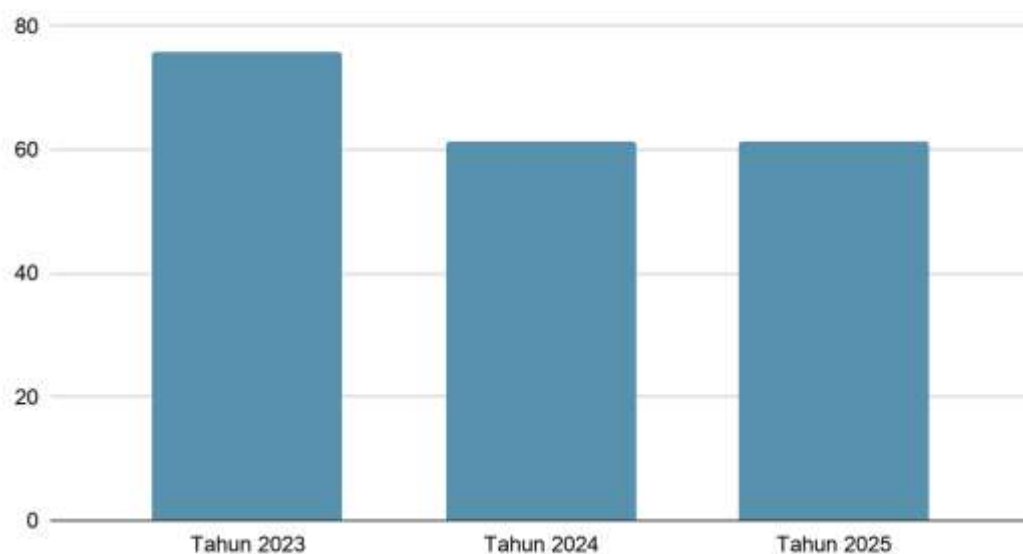
Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:

1. **Peningkatan Pengawasan terhadap Alih Fungsi Lahan:** Melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat terhadap kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pertambangan ilegal yang dapat menurunkan kualitas tutupan lahan.
2. **Optimalisasi Anggaran dan Kegiatan Pemantauan Lingkungan:** Melakukan perencanaan anggaran yang lebih efektif untuk mendukung kegiatan pemantauan lingkungan, termasuk pengujian kualitas lingkungan yang memerlukan analisa laboratorium sehingga kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan dapat berjalan lebih optimal.
3. **Penguatan Sistem Data dan Informasi Tutupan Lahan:** Meningkatkan ketersediaan dan akurasi data mengenai luas areal rehabilitasi hutan dan lahan serta data tutupan lahan lainnya agar proses perhitungan indeks kualitas tutupan lahan dapat dilakukan secara lebih akurat dan komprehensif.
4. **Kolaborasi Antar Sektor:** Membangun kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya konservasi dan peningkatan kualitas tutupan lahan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target ITL yang lebih baik di masa mendatang, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.



Indeks Tutupan Lahan 2023 -2025



ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 4
"MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI"

TUJUAN 4				
MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,58	4,96 *(Bolmong Dalam Angka 2026)	88,88
2	Gino Ratio	0,315	0,354 *(BPS Provinsi Sulawesi Utara 2025)	112,38

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha selama periode 2022–2025 menunjukkan variasi antar sektor.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 tercatat sebesar **4,96 persen**. Capaian ini masih berada di bawah



target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar **5,58 persen**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **88,88 persen**. Meskipun demikian, perekonomian daerah tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif yang ditopang oleh beberapa sektor utama perekonomian daerah dan pertumbuhan paling tinggi adalah untuk kategori penyediaan akomodasi dan makan minum.

Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow selama periode 2022–2025, termasuk penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dan dapat dilakukan:

Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Ekonomi:

1. **Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan**
Sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi komoditas pertanian dan perkebunan yang menjadi basis ekonomi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow. Aktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas perkebunan seperti kelapa dan kakao turut mendukung peningkatan produksi sektor ini sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut.
2. **Sektor Industri Pengolahan**
Sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Peningkatan aktivitas pengolahan hasil pertanian dan perkebunan menjadi produk bernilai tambah turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan industri kecil dan menengah yang mengolah komoditas lokal seperti hasil pertanian dan perkebunan memberikan peluang peningkatan nilai tambah produk serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Perkembangan sektor ini diharapkan dapat mendorong proses hilirisasi produk lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah yang selama ini masih didominasi oleh sektor primer.
3. **Sektor Pertambangan dan Penggalian**
Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi salah satu kontributor penting dalam perekonomian daerah. Peningkatan permintaan terhadap komoditas tambang serta aktivitas eksplorasi dan produksi yang terus berjalan memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor ini dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



4. **Peningkatan Investasi Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya telah meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Kondisi ini turut mendorong pertumbuhan sektor konstruksi serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

5. **Meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga**

Peningkatan daya beli masyarakat turut berperan juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Konsumsi rumah tangga yang relatif stabil menjadi salah satu komponen utama dalam pembentukan PDRB, terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro kecil menengah.

Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja Ekonomi:

1. **Ketergantungan pada Sektor Tertentu** Ketergantungan pada sektor pertambangan membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
2. **Fluktuasi di Sektor Pertanian** Sektor pertanian sebagai salah satu sektor basis utama mata pencaharian masyarakat daerah juga menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi stabilitas produksinya. Ketidakpastian kondisi iklim, perubahan pola cuaca, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi pertanian modern masih menjadi faktor yang mempengaruhi produktivitas sektor ini. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sarana produksi pertanian dan sistem irigasi yang belum optimal turut mempengaruhi tingkat produksi dan pendapatan petani
3. **Terbatasnya Infrastruktur dan Aksesibilitas** Beberapa daerah di kabupaten Bolaang Mongondow masih mengalami keterbatasan akses jalan dan transportasi, menghambat distribusi barang dan jasa.

Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:

- **Diversifikasi Ekonomi** Diversifikasi kegiatan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penguatan sektor UMKM dilakukan melalui program pembinaan usaha, peningkatan akses permodalan, serta pengembangan kapasitas pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** Mengadakan pelatihan dan pendidikan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.

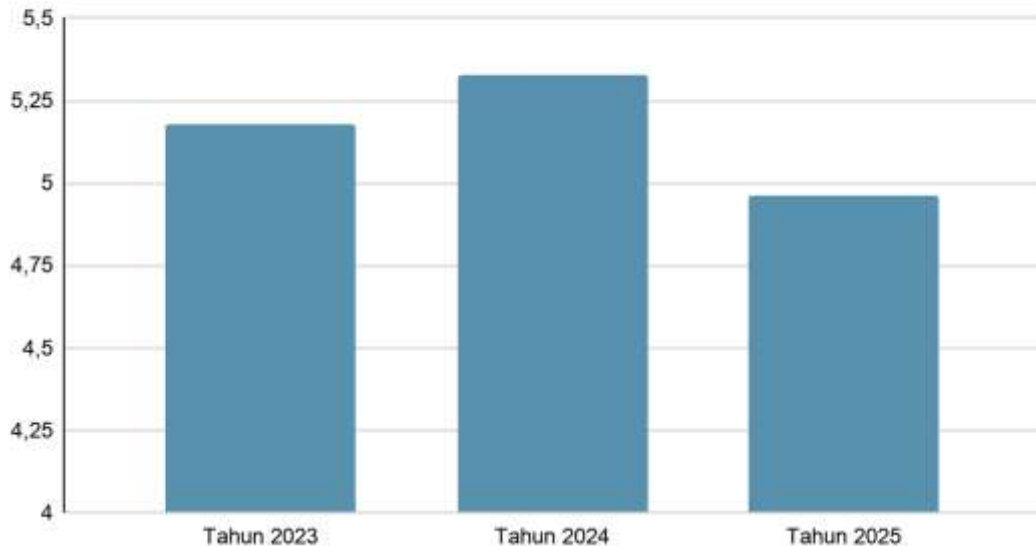


- **Pengembangan Infrastruktur**
Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar untuk memperlancar aktivitas ekonomi dan distribusi hasil produksi.
- **Peningkatan Investasi** meningkatkan daya tarik investasi melalui penyederhanaan proses perizinan, peningkatan pelayanan kepada investor, serta promosi potensi ekonomi daerah. Dengan meningkatnya investasi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa.
- **Penguatan Sektor Unggulan Daerah**
Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan sektor unggulan daerah, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih menjadi basis utama perekonomian masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan komoditas unggulan daerah, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, serta peningkatan kapasitas petani melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan.
- **Pengembangan Pengolahan Industri Lokal**
Mendorong pengembangan sektor industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah terhadap komoditas lokal. Pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal diharapkan dapat memperkuat proses hilirisasi produk pertanian dan perkebunan sehingga mampu meningkatkan daya saing produk daerah serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dapat lebih stabil dan berkelanjutan hingga tahun 2026 dan seterusnya.



Pertumbuhan Ekonomi 2023 - 2025



Gini Ratio

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 yang diukur melalui **Gini Ratio** tercatat sebesar **0,354**. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada kategori **ketimpangan sedang**, dimana distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat belum sepenuhnya merata.

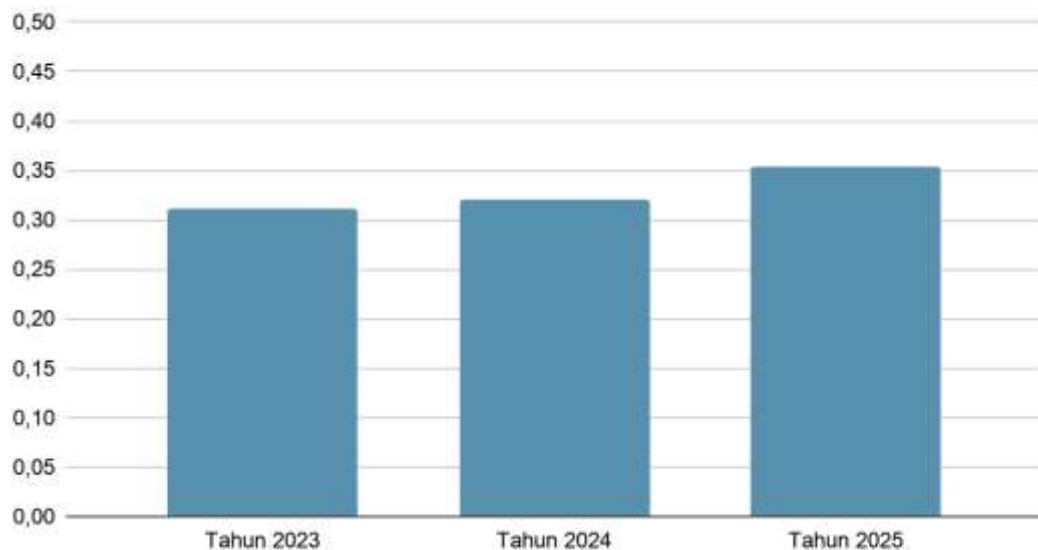
Nilai Gini Ratio tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, khususnya antara masyarakat yang bekerja pada sektor ekonomi dengan tingkat produktivitas tinggi dan masyarakat yang masih bergantung pada sektor ekonomi tradisional. Struktur perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor primer seperti **pertanian, kehutanan, dan perikanan** dengan tingkat produktivitas yang relatif terbatas turut mempengaruhi pola distribusi pendapatan masyarakat.

Selain itu, perbedaan akses terhadap kesempatan kerja, tingkat pendidikan, kepemilikan aset produktif, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih besar terhadap sektor perdagangan, jasa, maupun sektor industri cenderung memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang bekerja pada sektor dengan produktivitas rendah.

Berdasarkan nilai gini ratio Kabupaten Bolaang Mongondow dalam jangka waktu 3 tahun terakhir (Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025) berada kategori rendah yaitu berada pada posisi 0,354.



GINI RATIO TAHUN 2023 - 2025



Analisis terhadap Indikator Rasio Gini di Kabupaten Bolaang Mongondow selama periode 2022–2024 menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu Faktor yang turut mempengaruhi perkembangan Gini Ratio adalah **perbedaan tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia**, yang berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja pada sektor formal maupun sektor ekonomi dengan produktivitas yang lebih tinggi.

Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penurunan Ketimpangan):

1. **Penguatan Sektor Ekonomi Masyarakat:** Salah satu faktor yang mendukung penurunan ketimpangan pendapatan adalah penguatan sektor ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan UMKM melalui berbagai program pembinaan, peningkatan kapasitas usaha, serta dukungan akses permodalan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas kegiatan ekonomi produktif.
2. **Program Penanggulangan Kemiskinan:** Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha mikro dan



kecil. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah dan menurunkan angka kemiskinan.

3. **Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan:** Upaya peningkatan akses terhadap pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berperan dalam mendukung pemerataan pendapatan. Peningkatan kualitas pendidikan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi sehingga berpotensi meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.

Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja (Peningkatan Ketimpangan):

1. **Ketergantungan pada Sektor Tertentu:** Ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, seperti pertambangan, dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan jika manfaat ekonomi tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Dan juga Masyarakat yang bekerja pada sektor dengan tingkat produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi seperti sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan cenderung memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang bekerja pada sektor ekonomi tradisional seperti pertanian dengan produktivitas yang relatif lebih rendah.
2. **Keterbatasan Infrastruktur:** di berbagai wilayah juga turut mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Wilayah yang memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur transportasi, pasar, serta fasilitas ekonomi lainnya cenderung memiliki peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas.

Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:

1. **Diversifikasi Ekonomi:** Mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat.
2. **Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan:** satu langkah penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas tenaga kerja, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengakses pekerjaan yang produktif dan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi.
3. **Pengembangan Infrastruktur:** Meningkatkan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan layanan publik lainnya untuk



memastikan akses yang lebih merata ke peluang ekonomi dan sosial.

4. **Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):** Menyediakan pelatihan, akses permodalan, dan pasar bagi UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat berkurang, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 9

"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah"

Sasaran 9 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	10,30	8,63 (Bolmong Dalam Angka 2025)	83.78
2	Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Pertanian Dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	2,5	3.40 (Bolmong Dalam Angka 2026)	136

Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menciptakan nilai tambah terhadap berbagai komoditas yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi lainnya, khususnya sektor pertanian dan perkebunan. Pada tahun 2025, kontribusi pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow tercatat sebesar 8,63 persen per tahun.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Kontribusi sektor ini terutama berasal dari kegiatan pengolahan berbagai komoditas lokal yang dihasilkan oleh sektor pertanian dan perkebunan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk daerah serta memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.



Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:

Salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja sektor industri pengolahan adalah ketersediaan bahan baku yang berasal dari sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi basis utama perekonomian daerah. Komoditas pertanian dan perkebunan yang dihasilkan masyarakat memberikan peluang bagi berkembangnya kegiatan industri pengolahan yang mengolah bahan baku tersebut menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Berikut beberapa poinnya :

1. **Peningkatan Investasi dan Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan indikator kinerja utama untuk tahun 2025, termasuk kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun fokus utama pada sektor pertanian dan perikanan, kebijakan ini dapat mendorong pengembangan industri pengolahan terkait, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, yang berpotensi meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan secara keseluruhan.
2. **Pengembangan Infrastruktur:** Peningkatan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas produksi, dapat mempermudah distribusi produk dan efisiensi produksi, sehingga meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan.
3. **Meningkatnya Aktivitas Perdagangan dan Permintaan Pasar Terhadap Produk Olahan:** Peningkatan permintaan masyarakat terhadap berbagai produk olahan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga berdampak pada meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah.

Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

1. **Keterbatasan Akses ke Teknologi dan Modal:** Industri pengolahan di daerah mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses ke teknologi modern dan modal, yang dapat menghambat efisiensi dan produktivitas.
2. **Ketersediaan Bahan Baku:** Ketergantungan pada sektor pertanian dan perikanan sebagai penyedia bahan baku dapat menyebabkan fluktuasi produksi industri pengolahan jika sektor-sektor tersebut mengalami penurunan produksi.

Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:

1. **Peningkatan Akses ke Teknologi dan Pelatihan:** Menyediakan pelatihan dan akses ke teknologi modern bagi pelaku industri pengolahan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.



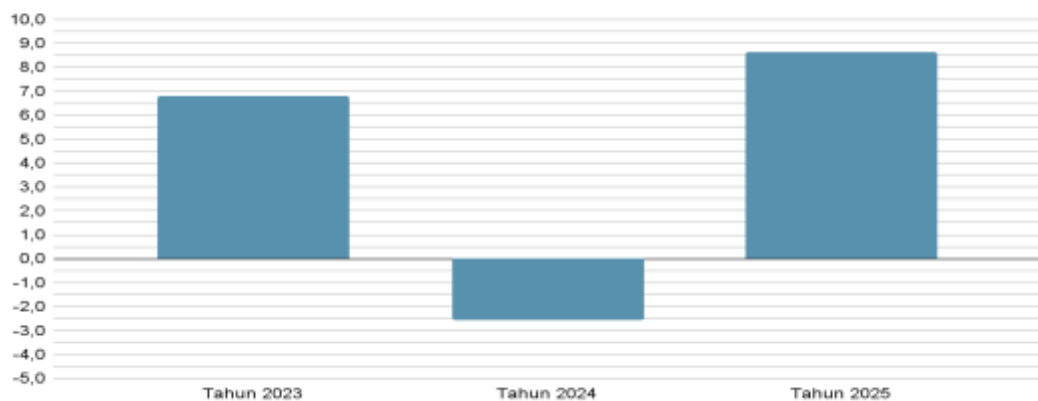
2. **Kemitraan dengan Sektor Pertanian dan Perikanan:**

Membangun kemitraan yang kuat antara industri pengolahan dan sektor pertanian serta perikanan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil dan berkualitas.

3. **Peningkatan Akses ke Pasar:** Membantu pelaku industri pengolahan dalam memasarkan produk mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional, melalui pameran dagang, platform online, dan jaringan distribusi yang lebih luas.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor tersebut, sektor industri pengolahan di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah selama periode 2023–2025.

Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Pertanian Dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi(% / Tahun)



Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Sektor Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow karena sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut. Pada tahun 2025, kontribusi pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow tercatat sebesar 3,40 persen per tahun.

Kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada bidang pertanian dan perikanan masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Berbagai kegiatan produksi pada sektor pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta kegiatan perikanan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.



Peningkatan aktivitas produksi pada sektor pertanian dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan pertanian yang cukup luas serta tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha tani. Komoditas seperti padi, jagung, kelapa, kakao serta berbagai komoditas perkebunan lainnya menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah.

Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:

1. **Sumber Daya Alam yang Melimpah:** Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi alam yang besar untuk pertanian dan perikanan, yang mendukung produktivitas sektor ini.
2. **Program Pemerintah dan Pelatihan:** Pemerintah daerah telah menginisiasi program pelatihan dan penyuluhan untuk petani dan nelayan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola usaha.
3. **Peningkatan Infrastruktur:** Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas penyimpanan telah mempermudah distribusi hasil pertanian dan perikanan, meningkatkan efisiensi dan akses ke pasar.

Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

1. **Ketergantungan pada Kondisi Alam:** Sektor pertanian dan perikanan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan perubahan iklim, yang dapat menyebabkan fluktuasi produksi.
2. **Kurangnya Akses ke Teknologi Modern:** Beberapa petani dan nelayan mungkin belum memiliki akses ke teknologi dan peralatan modern, yang dapat membatasi produktivitas dan efisiensi.
3. **Permodalan Terbatas:** Keterbatasan akses ke sumber permodalan dapat menghambat pengembangan usaha dan adopsi praktik pertanian atau perikanan yang lebih efisien.

Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:

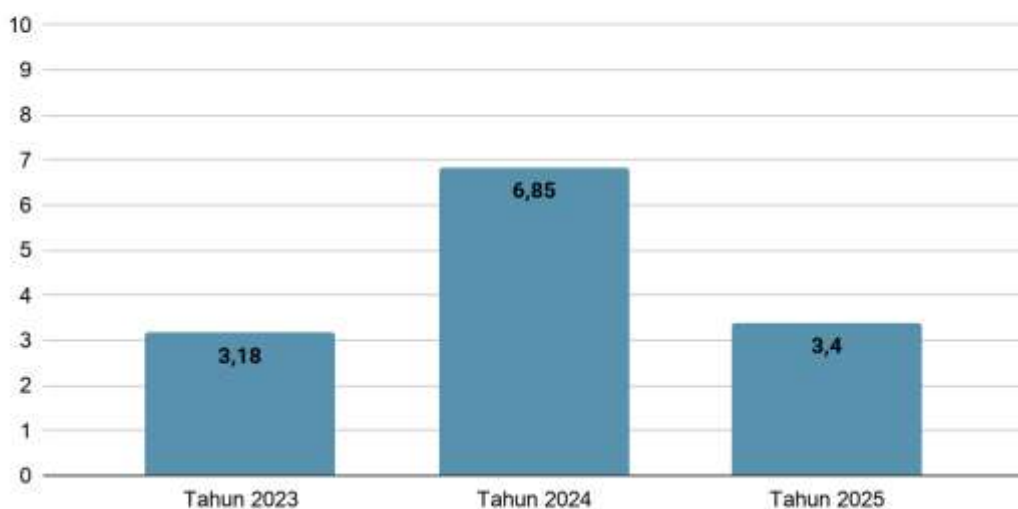
1. **Diversifikasi Produk:** Mengembangkan produk turunan atau olahan dari hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka pasar baru.
2. **Pengembangan Teknologi dan Inovasi:** Mendorong penggunaan teknologi modern dalam proses produksi dan distribusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.
3. **Kemitraan dan Akses Pasar:** Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan membuka akses ke pasar yang lebih luas, termasuk ekspor, untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.



4. **Peningkatan Akses Permodalan:** Menyediakan skema kredit atau bantuan permodalan dengan bunga rendah untuk mendukung pengembangan usaha kecil di sektor pertanian dan perikanan.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan sektor pertanian dan perikanan dapat terus berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Sektor Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 10

“Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional”

Sasaran 10 Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Pma/Pmdn) (% / Tahun)	10	4,33	43,30

Peningkatan investasi ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penyerapan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi



pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan.

Pada tahun 2025, Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan target peningkatan nilai investasi (PMA/PMDN) sebesar 10, namun realisasi yang dicapai hanya 4,33, menunjukkan pencapaian sekitar 43,3% dari target yang ditetapkan.

Analisis Penyebab Penurunan Kinerja Investasi:

1. **Kondisi Ekonomi Global dan Nasional:** Fluktuasi ekonomi global, seperti ketidakpastian pasar dan perubahan kebijakan perdagangan internasional, dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, kondisi ekonomi nasional yang kurang stabil juga dapat menurunkan kepercayaan investor.
2. **Infrastruktur yang Kurang Memadai:** Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja investasi adalah keterbatasan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, khususnya infrastruktur transportasi dan konektivitas wilayah. Kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai dapat meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa serta mengurangi efisiensi kegiatan usaha sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam menentukan lokasi investasi.
3. **Birokrasi dan Regulasi yang Kompleks:** Proses perizinan yang rumit dan regulasi yang tidak jelas dapat menghambat masuknya investasi baru.
4. **Keterbatasan Promosi Potensi Daerah Kepada Investor:** Minimnya Faktor lainnya adalah keterbatasan promosi potensi daerah kepada investor, sehingga peluang investasi yang dimiliki oleh Kabupaten Bolaang Mongondow belum sepenuhnya dikenal secara luas oleh calon investor. Kurangnya informasi mengenai potensi sumber daya daerah serta peluang usaha yang tersedia dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di daerah.

Alternatif Solusi yang Telah atau Dapat Dilakukan:

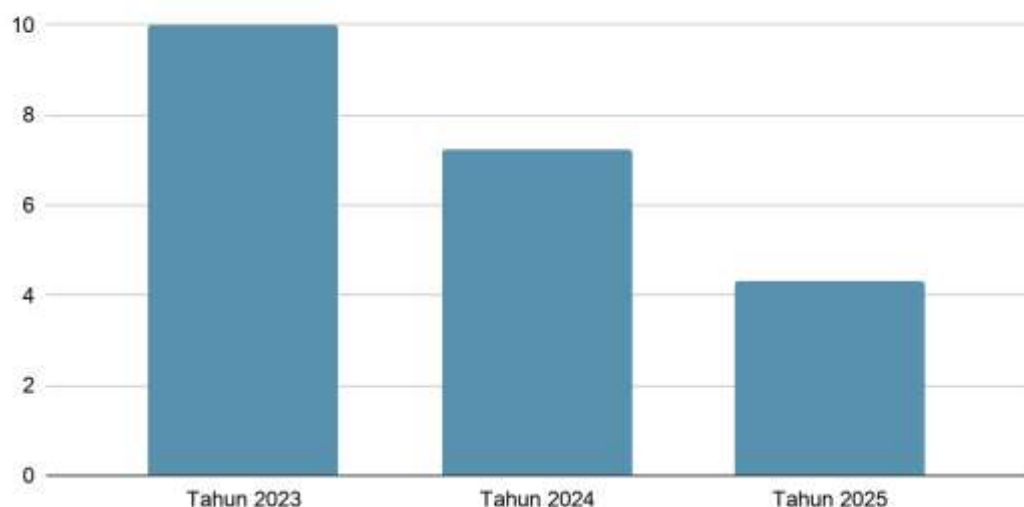
1. **Peningkatan Infrastruktur:** Peningkatan kualitas jaringan jalan, sarana transportasi, serta infrastruktur pendukung lainnya diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa sehingga mampu meningkatkan daya tarik daerah bagi investor.
2. **Simplifikasi Proses Perizinan:** penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan terpadu satu pintu. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam



- mengurus perizinan usaha sehingga proses investasi dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien..
3. **Promosi Investasi yang Aktif:** pemerintah daerah juga mendorong promosi potensi investasi daerah melalui berbagai kegiatan promosi dan penyampaian informasi mengenai peluang investasi yang dimiliki oleh Kabupaten Bolaang Mongondow. Promosi potensi daerah dilakukan dengan memperkenalkan sektor-sektor unggulan daerah yang memiliki prospek pengembangan, seperti sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta sektor jasa.
 4. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan investor.
 5. **Insentif bagi Investor:** Memberikan insentif, seperti keringanan pajak atau fasilitas lainnya, untuk menarik investor.
 6. **Pengembangan Sektor Industri Pengolahan Berbasis potensi Lokal** Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan sektor industri pengolahan berbasis potensi lokal guna meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal diharapkan dapat menarik minat investor sekaligus memperkuat struktur perekonomian daerah.

Dengan mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja investasi dan menerapkan solusi alternatif yang tepat, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target investasi yang diinginkan di masa mendatang.

Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Pma/Pmdn)
(% / Tahun)





ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 5
“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Rata-Rata Capaian Opini BPK, Nilai Sakip, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	84,75	63,55	75,99

Nilai Rata-Rata Capaian Opini BPK, Nilai Sakip, LPPD, Indeks Pelayanan Publik
Capaian Indikator Nilai Rata-Rata Capaian Opini BPK, Nilai SAKIP, LPPD dan Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator yang menggambarkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mutu penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar **84,75**, namun realisasinya hanya mencapai **63,55** sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **75,99%** dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan daerah masih **belum optimal** dan memerlukan penguatan pada beberapa aspek utama yang menjadi komponen penilaian indikator tersebut.

Analisis Penyebab Penurunan Kinerja:

1. Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan):

- o **Kualitas Laporan Keuangan:** Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugasnya membuat suatu laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini, dan mengungkapkan dua jenis temuan, yaitu terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
- o **Sistem Pengendalian Internal:** Kelemahan dalam sistem pengendalian internal dapat menyebabkan ketidak patuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku.

2. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah):

- o **Perencanaan dan Pelaporan Kinerja:** Masih ditemukan PD yang belum mengakomodasi seluruh isu dan urusan sesuai kewenangannya. Seperti pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- o **Evaluasi dan Monitoring:** Kualitas evaluasi internal yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih berfokus pada pemenuhan dokumen semata dan belum mengarah pada penilaian kualitas implementasi Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat Perangkat Daerah.

3. **LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah):**
 - **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Ketidak patuhan terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan dapat mempengaruhi kualitas LPPD.
 - **Ketersediaan Data:** Kurangnya data yang akurat dan lengkap dapat menghambat penyusunan LPPD yang berkualitas.
4. **Indeks Pelayanan Publik:**
 - **Peningkatan Kualitas Pelayanan:** melalui pemenuhan standar pelayanan, digitalisasi layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik.
 - **Sumber Daya Manusia:** belum memenuhi aspek sarana dan prasarana, sistem pelayanan, kompetensi petugas layanan, maupun inovasi pelayanan publik.

Alternatif Solusi yang Telah atau Dapat Dilakukan:

1. **Peningkatan Kapasitas Aparatur:** Menyelenggarakan pelatihan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan terkait pengelolaan kinerja, pengelolaan keuangan daerah, penyusunan laporan kinerja, serta penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan kompetensi aparatur dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
2. **Penguatan implementasi SAKIP secara berkelanjutan:** melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penyelarasan indikator kinerja perangkat daerah dengan tujuan pembangunan daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
3. **Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah:** melalui penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, serta optimalisasi fungsi pengawasan internal.
4. **Peningkatan kualitas pelayanan publik:** melalui pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, digitalisasi layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik pada unit penyelenggara layanan.
5. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik untuk memastikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 11
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Sasaran 11 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik (Zona)	Hijau (85)	Hijau (85,18)	100

Indeks Pelayanan Publik (Zona)

Indikator **Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Maladministrasi)** merupakan ukuran tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan sebagaimana dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam mencegah praktik maladministrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan komponen standar pelayanan,

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 menetapkan target nilai Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik sebesar **85**. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia, realisasi yang dicapai sebesar **85,18**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100%** dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow telah **melampaui target** serta berada pada kategori kepatuhan yang baik. Pada akhirnya, standar pelayanan ini menjadi fokus dalam pengawasan pelayanan publik yang notabene dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Adapun kegiatan tersebut selanjutnya disebut dengan Survei Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik.

Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau diperoleh dari rentang nilai 78-100, Predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning diperoleh dari rentang nilai 54,00-77,99, Akumulasi nilai tersebut diperoleh dari bobot nilai per-variabel pertanyaan yang dilihat dari sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif baik tingkat pusat maupun Daerah.

Pada tahun 2025, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan **Zona Kepatuhan Pelayanan Publik** berada pada kategori **Hijau (85)**, tetapi realisasinya melampaui target hingga **Hijau (85,18)**. Ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam kepatuhan pelayanan publik.



Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

1. **Meningkatnya Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik :** Pemerintah Daerah telah berupaya memenuhi komponen standar pelayanan publik seperti ketersediaan standar pelayanan, maklumat pelayanan, informasi persyaratan layanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian layanan, serta biaya atau tarif layanan yang dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.
2. **Penguatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Unit Pelayanan Publik :** Pemerintah daerah secara aktif melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang menjadi lokus pelayanan publik. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan pemenuhan komponen penilaian yang ditetapkan oleh Ombudsman
3. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik :** Upaya peningkatan kualitas pelayanan juga didukung dengan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pada unit layanan, seperti penyediaan ruang pelayanan yang lebih representatif, fasilitas informasi layanan, serta fasilitas pendukung bagi kelompok rentan.
4. **Peningkatan Kompetensi Aparatur Penyelenggara Pelayanan :** Pemerintah daerah melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sehingga aparatur lebih memahami standar pelayanan serta mampu memberikan pelayanan yang profesional dan responsif kepada masyarakat.
5. **Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat** Penyediaan sarana pengaduan serta mekanisme tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan yang lebih responsif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan serta mendorong perbaikan layanan secara berkelanjutan.
6. **Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Reformasi Birokrasi** Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik.

Dengan berbagai upaya tersebut, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami peningkatan yang tercermin dari hasil penilaian Ombudsman. Ke depan, pemerintah daerah perlu mempertahankan berbagai praktik baik yang telah



dilaksanakan serta terus melakukan inovasi pelayanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat dan mencegah terjadinya praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja

1. Pemenuhan dan Penyempurnaan Standar Pelayanan Publik

Mendorong seluruh perangkat daerah penyelenggara layanan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan yang memuat persyaratan pelayanan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya atau tarif layanan, serta produk layanan yang disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

2. Peningkatan Keterbukaan Informasi Pelayanan

Mendorong Unit pelayanan publik telah menyediakan berbagai media informasi pelayanan seperti papan informasi, banner, maupun media digital yang memuat informasi terkait mekanisme pelayanan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami prosedur layanan yang tersedia.

3. Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Menyediakan sarana pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik serta memastikan adanya mekanisme tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

4. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Peningkatan sarana dan prasarana pada unit layanan publik, seperti penyediaan ruang pelayanan yang lebih representatif, fasilitas ruang tunggu, serta fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan.

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Publik

Melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik agar memiliki pemahaman yang lebih baik terkait standar pelayanan serta mampu memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan responsif.

6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap unit pelayanan publik guna memastikan pemenuhan komponen penilaian yang menjadi indikator dalam evaluasi kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman.

7. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

Beberapa perangkat daerah mulai mengembangkan inovasi pelayanan publik, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam



penyelenggaraan layanan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan sehingga dapat mencegah praktik maladministrasi serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 12

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih”

Sasaran 12 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Bpk (Opini)	WTP	WTP *(Opini BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2024)	100
2	Nilai Sakip (Nilai/Predikat)	BB (71)	B (65,92) *(Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024)	92,85
3	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Angka)	3,8	3,0561 *(Hasil Penilaian Dari Kemendagri Tahun 2023)	80,42

Opini BPK

Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dari kegiatan yang dilakukan BPK tersebut, jenis pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Analisis terhadap Capaian Indikator Opini BPK Tahun 2025 Masih Dalam Tahap Pemeriksaan BPK dan hasilnya akan dirilis pada Juni Tahun 2026 sedangkan Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan **Opini BPK** dengan predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 100**, dan target ini berhasil tercapai dengan realisasi **WTP (100)**. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Opini WTP

1. **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah:** Pemerintah daerah telah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan daerah.
2. **Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP):** Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada perangkat daerah semakin diperkuat sehingga mampu meminimalisir kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan:** Aparatur yang menangani pengelolaan keuangan daerah telah memperoleh pembinaan dan peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku.
4. **Koordinasi dan Komitmen Perangkat Daerah:** Terciptanya koordinasi yang baik antara perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan serta adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel turut mendukung keberhasilan pencapaian opini WTP.
5. **Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan:** Pemerintah daerah secara konsisten menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga berbagai permasalahan yang menjadi temuan dapat diperbaiki secara bertahap.
6. **Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah:** Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah turut mendukung tertib administrasi dan meningkatkan akurasi data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan untuk Mempertahankan WTP

1. **Meningkatkan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan**
Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Memastikan kelengkapan dokumen pendukung transaksi dan Melakukan rekonsiliasi data secara berkala antara OPD dan Badan Keuangan Daerah.



2. **Memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP):** Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh OPD untuk Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran secara rutin dan Meminimalisir potensi kesalahan administrasi dan penyimpangan
3. **Bimbingan Teknis dan Pelatihan Rutin bagi Aparatur:** Mengadakan pelatihan berkala terkait pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintahan, dan tata kelola anggaran yang baik.
4. **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan:** Menyelesaikan secara tepat waktu seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan pada pemeriksaan sebelumnya dan Membentuk tim khusus pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) serta Melakukan pelaporan progres tindak lanjut secara berkala.
5. **Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah:** Mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah melalui audit internal, reviu, dan monitoring untuk Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas laporan keuangan, menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan, serta meningkatkan kapasitas SDM, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan pada pemeriksaan tahun 2025.



Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2026 atas Capaian Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih dalam tahap Penyusunan.

Pada tahun 2025 atas Capaian Kinerja Tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dengan predikat **BB (71)**, namun realisasi yang dicapai hanya **B (65,92)**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sistem akuntabilitas pemerintahan masih belum mencapai target yang diharapkan.

Analisis Penyebab Penurunan Kinerja SAKIP

1. **Perencanaan Kinerja yang Kurang Optimal:** Masih terdapat ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, Perjanjian Kinerja, dan rencana kerja tahunan. Hal ini menyebabkan indikator kinerja belum sepenuhnya menggambarkan outcome yang ingin dicapai sehingga berdampak pada penilaian SAKIP. Perencanaan merupakan komponen dengan bobot besar dalam evaluasi SAKIP sehingga kelemahan pada aspek ini dapat menurunkan nilai secara signifikan.
2. **Pengukuran Kinerja Belum Berbasis Hasil (Outcome):** Sebagian indikator kinerja perangkat daerah masih berorientasi pada **output kegiatan** dan belum sepenuhnya mengukur dampak atau manfaat program terhadap masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan keterkaitan antara program, anggaran, dan hasil pembangunan belum terlihat secara kuat.
3. **Kualitas Pelaporan Kinerja Belum Maksimal:** Penyusunan laporan kinerja masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyajikan analisis capaian kinerja secara komprehensif. Beberapa laporan belum menggambarkan hubungan antara target, realisasi, efisiensi penggunaan anggaran, serta faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.



4. **Evaluasi Internal Belum Berjalan Optimal:** Pelaksanaan evaluasi internal oleh Inspektorat dan perangkat daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat perbaikan berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah sehingga mempengaruhi kualitas implementasi SAKIP.
5. **Komitmen dan Budaya Kinerja Perangkat Daerah:** Komitmen perangkat daerah dalam mengimplementasikan manajemen kinerja secara konsisten masih perlu ditingkatkan. Implementasi SAKIP menuntut adanya budaya kerja yang berorientasi pada hasil, namun pada praktiknya strategi pencapaian sasaran sering masih bersifat rutin dan kurang inovatif.
6. **Kapasitas SDM Pengelola SAKIP:** Kompetensi sumber daya manusia yang menangani perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman teknis mengenai penyusunan indikator kinerja, cascading kinerja, serta penyusunan dokumen akuntabilitas berdampak pada kualitas implementasi SAKIP.

Alternatif Solusi yang Telah atau Dapat Dilakukan

1. **meningkatkan kualitas perencanaan kinerja:** penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Perjanjian Kinerja. Penyusunan indikator kinerja perlu diarahkan pada indikator yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga dapat menggambarkan secara jelas kontribusi program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. **Optimalisasi Sistem pengukuran kinerja:** melakukan pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja secara berkala. Pengukuran kinerja yang berbasis data akan membantu perangkat daerah dalam mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan program serta melakukan langkah-langkah perbaikan secara tepat.
3. **Peningkatan kualitas pelaporan kinerja:** Menyajikan laporan kinerja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilengkapi dengan analisis capaian kinerja yang komprehensif. Analisis tersebut mencakup perbandingan antara target dan realisasi, efisiensi penggunaan anggaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pencapaian kinerja.
4. **Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP):** Melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap perangkat daerah. Melalui evaluasi internal yang efektif, berbagai kelemahan



dalam implementasi SAKIP dapat diidentifikasi lebih dini dan segera dilakukan tindak lanjut perbaikan..

5. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Perencanaan dan pelaporan kinerja perlu terus dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan teknis. Peningkatan kompetensi aparatur ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan manajemen kinerja yang lebih baik..

Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut, diharapkan implementasi SAKIP Kabupaten Bolaang Mongondow dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara lebih optimal.

Adapun terkait rincian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 - 2024 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Komponen Penilaian Nilai AKIP Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22,93	23,00
2	Pengukuran Kinerja	30	18,28	18,36
3	Pelaporan Kinerja	15	9,54	9,62
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,60	14,94
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,35	65,92
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Adapun rekomendasi dari Kemenpan RB RI

1. Melakukan pengesahan RPJMD Tahun 2025–2029 termasuk menetapkan secara lengkap tujuan, sasaran, indikator kinerja beserta target yang terukur sebagai dasar penjabaran kinerja di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Selain itu, melakukan pemutakhiran dan pengunggahan dokumen Perjanjian Kinerja terbaru level Bupati/Pemda Tahun 2025 pada aplikasi esr.menpan.go.id sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan peninjauan dan penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar seluruh urusan dan isu strategis yang menjadi kewenangan dapat terakomodasi dan dikawal pada dokumen perencanaan SAKIP;
3. Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan pada seluruh Perangkat Daerah melalui peninjauan kembali Renstra, Perjanjian



- Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama agar konsisten dengan penetapan arah kebijakan, sasaran dan indikator kinerja daerah;
4. Memperkuat proses penjenjangan kinerja dengan menyusun Critical Success Factor (CSF) yang logis dan mampu menggambarkan keterkaitan antara isu strategis, sasaran, sampai pada level operasional beserta penetapan indikator kinerja yang relevan dan tidak terikat pada urusan maupun struktur organisasi yang berlaku;
 5. Memastikan bahwa seluruh Perangkat Daerah melengkapi dokumen manual IKU dengan formulasi perhitungan yang sesuai, konsisten, dan selaras dengan indikator yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 6. Memastikan bahwa seluruh indikator kinerja pada level Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja telah disusun berdasarkan prinsip SMART, cukup dan sesuai level kinerjanya dalam mengukur tujuan/sasaran strategis;
 7. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan SOP pengumpulan data kinerja yang telah ditetapkan, kemudian mendokumentasikan dan melaporkan secara lengkap hasilnya melalui aplikasi esr.menpan.go.id dan/atau menggunakan teknologi informasi terintegrasi sebagai dasar pengendalian kinerja dan pengambilan keputusan organisasi dan unit kerja
 8. Meningkatkan kualitas analisis dalam penyusunan Laporan Kinerja, pada level Perangkat Daerah. Analisis yang disajikan harus lebih komprehensif dengan mencakup perbandingan capaian kinerja antar-tahun, perbandingan dengan target jangka menengah, perbandingan dengan target nasional maupun internasional (jika relevan), serta analisis efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan sumber daya;
 9. Meningkatkan pemanfaatan Laporan Kinerja sebagai acuan dalam penyusunan target kinerja tahunan melalui pertimbangan terhadap tren capaian tahun-tahun sebelumnya, maupun analisa komprehensif lainnya atas realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya;
 10. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan memperluas cakupan penilaian, tidak hanya pada aspek pemenuhan dokumen, tetapi juga pada aspek implementasi SAKIP secara substantif yang berkualitas berdasarkan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021;
 11. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan hasil evaluasi internal dengan mendorong Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti



seluruh rekomendasi yang diberikan terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8679/OTDA tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023 angka 3 huruf a. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota

Penetapan peringkat , skor dan status kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- Penilaian aspek capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
- Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor
- Perhitungan capaian kinerja makro
- Perhitungan perubahan capaian kinerja makro
- Perhitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan.

Perhitungan Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penetapan peringkat atau Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi yakni dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kelompokkan ke Dalam 5 Klasifikasi

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.	1.00-1.80	Sangat Rendah
2.	1.81-2.60	Rendah
3.	2.61-3.40	Sedang
4.	3.41-4.20	Tinggi
5.	4.21-5.00	Sangat Tinggi



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

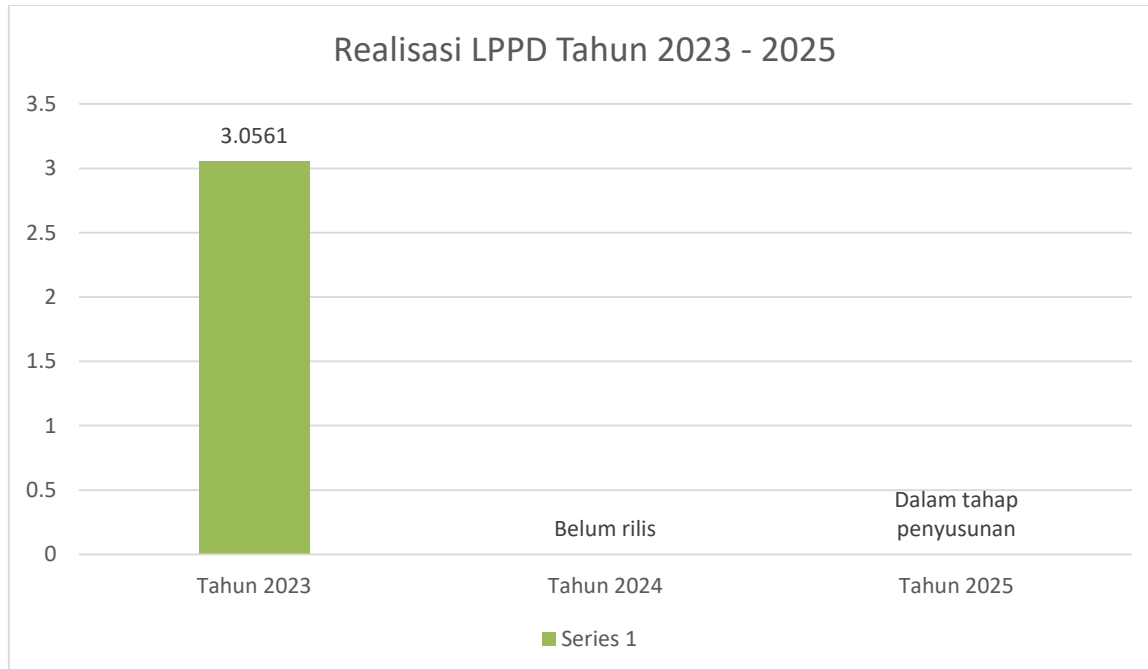
TAHUN
2025

Kemendagri melaksanakan evaluasi setiap tahun secara rutin dengan menggunakan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota setiap tahunnya. Berikut perolehan Nilai LPPD Kabupaten Bolaang Mogondow

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Nilai/Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,0528	3,0561	Belum Rilis	Dalam Tahap Penyusunan

Faktor yang mempengaruhi indikator sasaran ini adalah ketelitian dari semua pihak yang berkopeten dalam menyusun peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Perbandingan Target dan Realisasi Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 – 2025





ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 6
"MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH"

TUJUAN 6 "MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH"				
No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Indeks Ketahanan Pangan	85,04	*79,08 (Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2025)	93,05%

Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan daerah berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Indikator ini digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjamin kecukupan pangan bagi masyarakat baik dari sisi produksi, akses ekonomi, maupun kualitas konsumsi pangan. Pada tahun 2025, target IKP Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan sebesar **85,04**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **79,08** sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **93,05%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ketahanan pangan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, namun masih berada pada kategori cukup baik karena mendekati target yang direncanakan. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025



Analisis Penyebab Penurunan Kinerja Indeks Ketahanan Pangan

1. **Faktor Produksi Pertanian yang Tidak Optimal:** Produksi pangan belum mencapai tingkat yang maksimal akibat berbagai faktor seperti perubahan cuaca, keterbatasan akses terhadap sarana produksi pertanian (benih, pupuk, dan irigasi), serta hama dan penyakit tanaman.
2. **Distribusi dan Akses Pangan yang Belum Merata:** Meskipun produksi cukup, distribusi pangan ke seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow belum optimal, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
3. **Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim:** Cuaca ekstrem seperti kekeringan atau curah hujan berlebih berpengaruh terhadap hasil pertanian dan perikanan, yang berdampak pada ketersediaan pangan di daerah.
4. **Keterbatasan Infrastruktur Pendukung:** Infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, jalan pertanian, serta fasilitas penyimpanan dan pengolahan pangan belum sepenuhnya memadai untuk mendukung ketahanan pangan.
5. **Kurangnya Diversifikasi Pangan Lokal:** Konsumsi pangan masyarakat masih bertumpu pada beberapa komoditas tertentu, sehingga jika terjadi gangguan produksi, ketahanan pangan menjadi rentan.
6. **Minimnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pertanian:** Penggunaan teknologi pertanian yang modern masih terbatas, sehingga produktivitas dan efisiensi produksi pangan belum optimal.



Alternatif Solusi yang Telah atau Dapat Dilakukan

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan

- Meningkatkan akses petani terhadap benih unggul, pupuk, serta teknologi pertanian modern untuk meningkatkan hasil produksi.
- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dengan metode pertanian berkelanjutan.

2. Penguatan Sistem Distribusi dan Akses Pangan

- Meningkatkan jaringan infrastruktur jalan dan transportasi untuk memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah.
- Mendorong pengembangan pasar lokal untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang stabil.

3. Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

- Mengembangkan sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tahan kekeringan atau metode irigasi hemat air.
- Memperkuat program asuransi pertanian bagi petani yang terdampak bencana alam.

4. Penguatan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan

- Membangun dan memperbaiki sistem irigasi, penyimpanan pangan, serta fasilitas pengolahan hasil pertanian agar ketahanan pangan lebih terjamin.

5. Diversifikasi Pangan dan Edukasi Gizi Masyarakat

- Mendorong konsumsi pangan lokal yang beragam dan bergizi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.
- Mengadakan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola konsumsi yang lebih beragam.

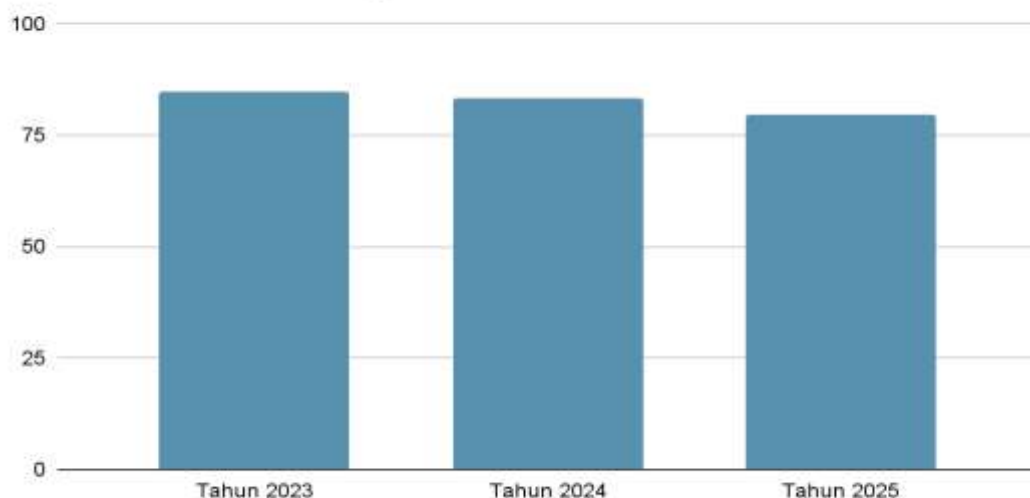
6. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian

- Memanfaatkan teknologi pertanian digital seperti sensor tanah, sistem irigasi otomatis, dan pemantauan cuaca berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi.
- Memberikan pelatihan kepada petani tentang penggunaan teknologi modern dalam pertanian.

Dengan penerapan solusi-solusi ini, Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan dapat meningkatkan **Indeks Ketahanan Pangan** dan mencapai target yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.



Indeks Ketahanan Pangan 2023 -2025



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 13

"Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan "

Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Pangan (Angka)	1,14	1,2	95

Rasio Pangan

Pada Tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator Rasio Pangan sebesar 1,14, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 1,2. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 95% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan telah melampaui target yang direncanakan.

Tingginya capaian indikator rasio pangan tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow relatif berada pada kondisi yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya produksi sektor pertanian, tersedianya distribusi pangan yang lebih baik, serta dukungan program pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan.

Secara umum, keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mendukung ketahanan pangan daerah telah



berjalan dengan cukup efektif. Kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sektor pertanian, peningkatan produktivitas pangan, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya pangan guna menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Sampai dengan tahun 2025 inflasi masih terus melanda Negara Republik Indonesia yang dibarengi dengan adanya beberapa bencana alam berupa banjir yang melanda di beberapa wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berdampak pada perekonomian Masyarakat, khususnya pada sektor pertanian terjadi gagal panen pada beberapa wilayah penghasil padi dan mengakibatkan adanya kelangkaan stok pangan dan lonjakan harga pangan pokok, sehingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satgas Pangan ditingkat Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengambil Langkah-langkah strategis guna penanggulangan inflasi daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 tidak lepas dari upaya yang dilakukan melalui bebrbagi program diantaranya:

- Melakukan operasi pasar terkait dengan adanya permainan harga bahan pokok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan situasi ekonomi saat itu
- Pelaksanaan gelar pangan murah melalui Kerjasama dengan berbagai pihak, dalam rangka penanganan inflasi daerah dan kenaikan harga pangan
- Penyaluran Cadangan pangan pemerintah daerah pada daerah yang rentan dan rawan pangan berdasarkan peta kerawanan dan kerentanan pangan dan wilayah yang terdampak banjir
- Pengisian lumbung pangan Desa dalam rangka pemenuhan Cadangan pangan pada setiap desa.
- Penyaluran benih tanaman kepada kelompok Wanita tani (KWT) dalam rangka pemanfaatan pekarangan di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Jika dilihat dari Capaian rasio pangan tahun 2025 yang melebihi target yaitu 95%, dapat diasumsikan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow tahan dan terjamin akan kebutuhan pangan pada tahun 2025, hal ini tidak lepas dari berbagai Upaya yang dilakukan sebagaimana disebutkan pada poin-poin diatas . Dikatakan ketahanan pangan bila jumlah ketersediaan pangan lebih besar 1,2 kali dibanding dengan jumlah konsumsi pangan. Tidak tahan pangan (rawan pangan) jika $RP < 0,8$ Tahan pangan tetapi kurang terjamin jika $0,8 < RP < 1,2$ dan tahan

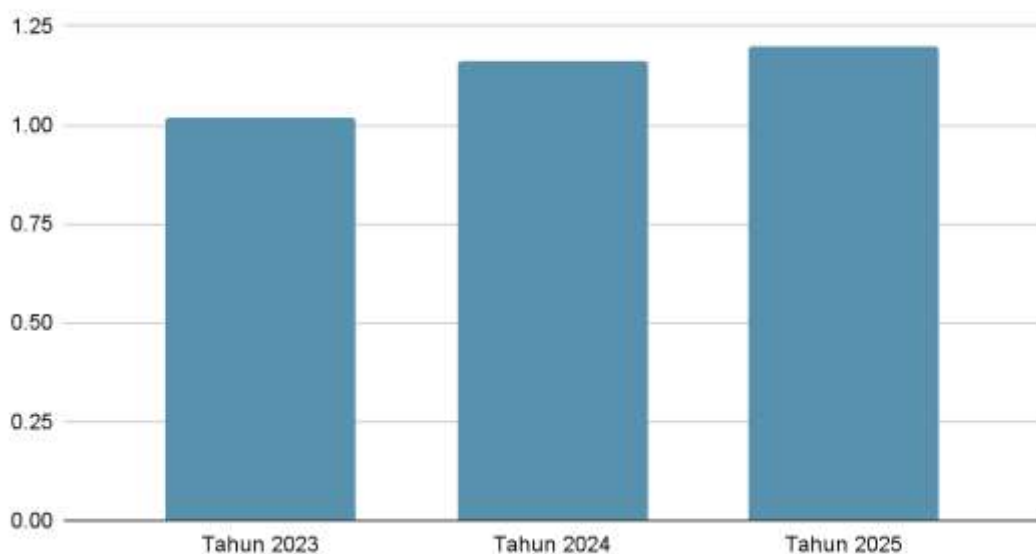


pangan terjamin jika $R_p > 1,2$. Untuk mencapai rasio 1,2 perlu adanya Regulasi Pemerintah Daerah untuk menata ketersediaan pangan pokok (beras), anjuran nasional seperti halnya untuk alur distribusi pangan pokok beras (stok pangan di daerah), untuk mengantisipasi ketimpangan stok pangan pokok beras yang ada di daerah guna memudahkan mengantisipasi gejolak harga saat ini dimana pada tahun 2025 akan adanya inflasi ekonomi yang akan berdampak terhadap harga pangan. Menurut data Neraca Bahan Makanan (NBM) pangan pokok (beras) di daerah untuk ditata dan dikelola sehingga stok pangan (beras) baik yang dikuasai pemerintah maupun yang dikuasai swasta yang ada di daerah dimanfaatkan melalui kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan optimal.

Beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan adanya kegagalan terkait pencapaian target indikator kinerja yang disebabkan oleh :

- Sarana dan Prasarana terkait Pergudangan yang belum ada
- Alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan rendahnya stok ketersediaan pangan
- Belum Beragamnya Konsumsi pangan Masyarakat
- Kualitas dan mutu pangan yang belum terjamin
- Harga Bahan pangan strategis masih berfluktuatif seperti beras, cabe, bawang merah dan bawang putih.
- Masih adanya daerah rawan/rentan terhadap pangan

Points scored





**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (8/7*100)	10 (6-9)
1	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan (Tahun)	13,90	11,82	85,03	97.994.588.018	90.440.433.684	92,29	-7,26
2	Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata-Rata Usia Harapan Hidup (Angka)	69,75	72,48	103,91	81.728.503.243	67.938.729.400	83,13	20,78
3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	6,25	6,98	89,54	10.348.568.558	9.494.114.144	91,74	-2,20



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (8/7*100)	10 (6-9)
4	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan (Angka)	24,82	15,30	61,64	5.666.122.465	5.128.000.658	9050	-28.86
		Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)	71	49,30	69,44	33.286.797.061	32.667.805.715	98.14	-28.70
5	Meningkatnya Layanan Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%)	74,70	68,95	92,30	16.927.077.862	16.267.800.039	96.11	-3.81
6	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (Angka)	60,00	74,08 (Lakip DLH)	123,47	594.691.864	422.859.000	71.11	52.36
7	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (Angka)	95,43	86,55 (Lakip DLH)	90,69	277.979.573	257.917.836	92.78	-2.09



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (8/7*100)	10 (6-9)
8	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan (Angka)	75,00	61,4 (Lakip DLH)	81,87	373.750.000	353.533.175	94,59	-12,72
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (%/ Tahun)	10,30	8,63 (BPS 2026)	83,78	946.821.441	826.596.268	87,30	-3,52
		Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Pertanian Dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (%/ Tahun)	2,5	3,40 (BPS 2026)	136	9.925.706.233	7.068.661.215	71,16	64,84



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (8/7*100)	10 (6-9)
10	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Pma/Pmdn) (%/ Tahun)	10	4,33	43,30	155.073.573	137.975.068	88.97	-45.67
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Zona)	Hijau (85)	Hijau (85,18)	100	4.646.951.152	4.305.824.855	92.66	7.34
12	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	Opini Bpk (Opini)	WTP (100)	WTP (100)	100	9.299.387.200	6.119.106.626	65.80	34.20
		Nilai Sakip (Nilai/Predikat)	BB (71)	B (65,92)	92,85	1.874.160.010	1.171.289.784	62.50	30.35
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Angka)	3,8	3,0528	92,10	13.931.697.696	13.163.291.457	94.48	-2.38
13	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan (Angka)	1,14	1,2	105	10.733.955.903	7.961.427.793	74.17	30.83



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (8/7*100)	10 (6-9)
Rata Rata Efisiensi (Inefisiensi) Kinerja dan Anggaran					1446			1373	73
					85			81	4



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

2.3.6 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung capaian target kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan (Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	94.316.604.308	87.543.473.329	92.82
			- PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	54.028.979.035	50.184.242.564	
			- PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	32.343.054.200	30.235.979.534	
			- PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	6.469.003.073	5.649.039.331	
			- PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN	1.475.570.000	0	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	224.671.104	0	0
			- PETETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	224.671.104	0	
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0	0	0
			- PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA DALAM DAERAH	0	0	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
			KABUPATEN/KOTA			
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0	0	0
			- PENERTIBAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	0	0	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	19.988.040	19.050.000	95.31
			- PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.988.040	9.150.000	
			- - PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.000.000	9.900.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.795.587	0	0
			- PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	100.795.587	0	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.221.830.841	1.180.961.473	96.65
			- PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	87.787.427	86.847.035	
			- PENYELENGGARAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.128.129.334	1.088.164.238	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	72.454.283	68.371.576	94.37
			- PENYADARAAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELAPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA DAN PEMUDA KADER KABUPATEN.KOTA	72.454.283	68.371.576	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	231.754.000	124.149.675	53.57
			- PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.226.000	14.421.675	
			- PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA	134.100.000	60.300.000	
			- PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PEYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTAA	49.428.000	49.428.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	299.039.355	200.187.800	66.94
			- PENCEGAHAN KEKERASAAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUNGAN DAERAH KAB/KOTA	49.623.000	6.180.000	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
			- PEYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KAB./KOTA	81.533.000	57.057.800	
			- PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.883.355	136.950.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	214.437.927	55.288.266	25,78
			- PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUTKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	214.437.927	55.288.266	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.293.012.573,00	1.248.951.565,00	96,59
			- PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.293.012.573,00	1.248.951.565,00	
2	Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata-Rata Usia Harapan Hidup (Angka)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.677.238.038	61.583.303.517	84,74
			- PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	30.106.898.651	27.432.598.422	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
			- PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.192.696.422	32.817.517.641	
			- PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	931.231.824	894.420.213	
			- PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	446.411.141	438.767.241	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.092.354.787	1.438.576.474	46,52
			- PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	64.380.161	54.566.326	
			- PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DIWILAYAH KABUPATEN/KOTA	2.107.802.626	522.754.986	
			- PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	920.172.000	861.255.162	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	238.054.769,00	206.322.830,00	86,67
			- PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	67.539.604,00	59.659.458,00	
			- PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA	23.597.800,00	20.765.337,00	
			- PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	59.504.609,00	50.313.969,00	
			- PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	11.171.266,00	7.183.703,00	
			- PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	76.241.490,00	68.400.363,00	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	190.322.650	102.049.768	53,62
			- ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	0	0	
			- PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	49.073.190	44.539.768	
			- PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH	141.249.460	57.510.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	301.200.000,00	215.148.843,00	71,43
			- PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN CAKUPAN DAERAH KAB/KOTA	301.200.000,00	215.148.843,00	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.678.132.999,00	2.856.905.468,00	77,67
			- PELAKSANAAN, ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKA	1.450.000.000,00	1.338.755.468,00	
			- PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB / PETUGAS LAPANGAN KB (PKB, PLKB)	1.616.000.000,00	1.213.133.500,00	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
			- PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN DI DAERAH KAB/KOTA	556.132.999,00	249.516.500,00	
			- PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	56.000.000,00	55.500.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.551.200.000,00	1.536.422.500,00	99,05
			- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.551.200.000,00	1.536.422.500,00	
3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	207.568.065,00	201.055.768,00	96.86
			- PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	207.568.065,00	201.055.768,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	319.675.974,00	308.683.761,00	96.56
			- PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	319.675.974,00	308.683.761,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	291.690.888,00	289.395.016,00	99.21



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
			- REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	291.690.888,00	289.395.016,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	346.273.505,00	307.864.438,00	88.91
			- PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	346.273.505,00	307.864.438,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	259.322.641,00	242.448.740,00	93.50
			- PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	22.222.530,00	17.360.000,00	
			- PENGELOLAAN STRATEGIS KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	209.248.111,00	200.532.740,00	
			- PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	27.852.000,00	24.556.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	274.876.399	222.388.380	80.90
			- PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.674.399,00	48.481.580,00	
			- PELESTARIAN Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.202.000	173.906.800	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	177.108.654,00	0	0
			- PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	177.108.654,00		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.693.641.600,00	1.547.313.600,00	91.36
			- PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.693.641.600,00	1.547.313.600,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	170.731.395,00	169.768.545,00	99.44
			- PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.858.538,00	116.415.690,00	
			- PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	53.872.857,00	53.352.855,00	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	68.674.128,00	67.894.530,00	98.86
			- PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	68.674.128,00	67.894.530,00	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.557.266.272,00	1.510.049.938,00	96.97
			- PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	419.062.843,00	386.967.822,00	
			- PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	725.320.770,00	713.580.039,00	
			- PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	336.547.805,00	336.459.627,00	
			- PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	76.334.854,00	73.042.450,00	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.981.739.037,00	4.627.251.428,00	92.88
			- ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	613.416.676,00	635.985.115,00	
			- FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	39.050.295,00	37.884.178,00	
			- FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	890.744.999,00	792.313.025,00	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan Pendukung			Capaian
			Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
			- PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.438.527.067,00	3.161.069.110,00	



**BAB
III**

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan atau mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Pertanian pada Tahun 2025 memperoleh tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian yang dijabarkan dalam 2 (dua) satuan kerja pengelolaan yaitu meliputi Direktorat Tanaman Pangan serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).



3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Adapaun Dasar hukum dari pengelolaan kegiatan Tugas Pembantuan (TP) yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7345);
- 8) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2226)
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturasn Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;



- 12) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- 14) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kemneterian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 21) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e-Planning;



- 22) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/6/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
- 23) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- 24) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
- 25) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- 26) Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 26/KTPS/SR.130/B/06/2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan DIRJEN PSP Nomor 13/KPTS/SR.130/B/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpompaan Mendukung Pertambahan Areal Tanam Tahun Anggaran 2024.
- 27) Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 71/KTPS/RC.210/B/12/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Alat Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- 28) Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 26/Kpts/KU.010/B/KPA/11/2025 Tanggal 18 November 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 16.1/Kpts/KU.010/B/KPA/07/2025 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan wujud sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka akselerasi pembangunan sektor-sektor strategis khususnya sektor pertanian. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi tugas.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Pertanian memperoleh amanat pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Alokasi tugas ini diarahkan pada dua sektor krusial yang dikelola oleh:

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan: Difokuskan pada penguatan cadangan pangan melalui distribusi benih unggul.
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP): Difokuskan pada modernisasi alat mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi olah lahan.



Secara umum pelaksanaan Tugas Pembantuan ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan produktivitas hasil pertanian daerah guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
- Mendorong swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Mempercepat proses mekanisasi pertanian melalui penyediaan alat mesin pertanian guna mengurangi biaya produksi petani.

Penyelenggaraan seluruh kegiatan ini tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari sisi administrasi keuangan maupun pencapaian fisik di lapangan.

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten

3.3.1.1 Target Kinerja

a) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Target pada sektor ini berfokus pada volume bantuan benih dan cakupan luas lahan:

- Benih Padi Ladang: Target penyaluran sebanyak 93.600 kg untuk lahan seluas 2.340 Ha
- Benih Jagung Varietas JAFRAN 1: Target penyaluran sebanyak 112.500 kg untuk lahan seluas 7.500 Ha
- Benih Jagung Hibrida Varietas SAGE 01: Target penyaluran sebanyak 66.750 kg untuk lahan seluas 4.450 Ha

b) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Target pada sektor ini difokuskan pada penguatan mekanisasi pertanian melalui distribusi alat mesin pertanian (Alsintan):

- Penerima Manfaat: Target bantuan diserahkan kepada 1 (satu) Brigade dan 5 (lima) kelompok tani
- Jenis Alat: Pengadaan unit traktor roda empat, traktor roda crawler, traktor roda dua, pompa air 3 inchi dan rice transplanter



3.3.1.2 Realisasi

a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tabel 3.1
Jenis Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Satker Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	
				Keuangan	Fisik
1	Pengadaan Benih Padi Ladang	-	-	-	100
2	Pengadaan Benih Jagung Varietas Jafran 1	-	-	-	100
3	Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas SAGE 01	-	-	-	100
Jumlah					100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi fisik mencapai 100%. Akan tetapi, untuk jumlah dana yang bersumber pada APBN Tahun 2025 yang digunakan dalam Pengadaan Benih Padi Ladang, Pengadaan Benih Jagung Varietas JAFRAN 1, Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas SAGE 01 keuangan tidak diketahui, karena Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Bidang Tanaman dan Holtikultura hanya menerima bantuan dalam bentuk Benih yang kemudian disalurkan kepada Kelompok Tani Penerima Bantuan.



b. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

Tabel 3.2
Jenis Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Satker Dirjen Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pertanian (PSP) Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	No	Kelompok Tani Penerima	Jenis Alat	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	
						Keuangan	Fisik
I	Bantuan Alat Mesin Pertanian	1	Brigade Dinas Pertanian	Traktor Roda Empat			100
		2	Brigade Dinas Pertanian	Traktor Roda Crawler			100
		3	Diat 2	Traktor Roda Dua			100
		4	Monano II	Traktor Roda Dua			100
		5	Primadona	Traktor Roda Dua			100
		6	Nonap II	Pompa Air 3 Inchi			100
		7	Sejahtera	Rice Transplanter			100
Jumlah							100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan tidak diketahui, karena Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Bidang Sarana Prasarana Pertanian hanya menerima bantuan dalam bentuk Alsintan yang kemudian disalurkan kepada Kelompok Tani Penerima dan Brigade yaitu 1 (satu) Brigade dan 5 (lima) Kelompok Tani.

3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah

Untuk Tahun Anggaran 2025 Tugas Pembantuan dari Provinsi ke Daerah tidak ada kegiatan.



3.3.3 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Kesenjangan Alokasi Bantuan dan Potensi Lahan: Potensi luas lahan jagung yang tersedia di Kabupaten Bolaang Mongondow sangat luas, namun jumlah bantuan benih jagung yang diberikan oleh Pemerintah Pusat belum proporsional atau belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh potensi lahan tersebut.
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia Petani: Masih ditemui adanya kelompok tani penerima manfaat yang belum sepenuhnya memahami prosedur teknis maupun administratif dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
3. Ketergantungan terhadap Bantuan Pemerintah: Adanya kecenderungan kelompok tani dalam menjalankan usahatani yang masih sangat bergantung pada ketersediaan bantuan dari pemerintah, sehingga aspek kemandirian petani perlu terus ditingkatkan.

3.3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025, dirumuskan beberapa saran dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penguatan Pendampingan Administrasi: Mengoptimalkan peran tenaga penyuluh dan staf teknis dari Dinas Pertanian untuk memberikan pendampingan serta arahan yang lebih intensif kepada Kelompok Tani. Fokus pendampingan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga pada penyusunan laporan pertanggungjawaban agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Edukasi Kemandirian Petani: Melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada para petani agar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah. Hal ini bertujuan agar petani mampu mengelola kegiatan usahatani secara mandiri dan berkelanjutan, mengingat keterbatasan alokasi bantuan dibandingkan dengan luas potensi lahan yang ada.
3. Optimalisasi Brigade Dinas: Mengingat bantuan alsintan juga dikelola oleh Brigade Dinas Pertanian, maka perlu dilakukan pengawasan dan pemeliharaan alat secara rutin agar masa pakai alat lebih lama dan manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak kelompok tani di Kabupaten Bolaang Mongondow.



4. Koordinasi Intensif dengan Pemerintah Pusat: Terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan serta Direktorat Jenderal PSP) untuk mengusulkan penambahan kuota bantuan benih dan sarana prasarana yang lebih proporsional dengan luas lahan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.



**BAB
IV**

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.



Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan kabupaten bolaang mongondow terdiri atas:

- a. Pendidikan angka usia dini;
Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun.
- b. Pendidikan dasar;
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- c. Pendidikan kesetaraan.
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Target pencapaian SPM bidang urusan pendidikan tahun 2025



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian Tahun 2025 (%)
1	2	3	4
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan PAUD	100,00
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100,00
3.	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang didapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Realisasi capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian Tahun 2025 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan PAUD	100,00	41,60	85,87	7,87	93,98
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100,00	26,67	82,74	57,64	97,73



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian Tahun 2025 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00	37,58	90	7,67	6,12

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 33.466.170.629,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	33.466.170.629
A.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	16.319.355.993
	- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	62.856.788
	- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	903.649.997
	- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.159.135.700
	- Pembangunan Ruang Kelas Baru	422.532.000
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kelas Sekolah	5.854.920.000
	- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.800.000.000
	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.573.710.502
	- Pengembangan konten digital untuk pendidikan	45.511.359
	- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	213.815.200
	- Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	283.224.447



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
B.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.728.516.563
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.443.455.795
	- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	827.127.876
	- Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.852.091.000
	- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5.045.601.000
	- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.800.000.000
	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.760.240.892
C.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.418.298.073
	- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.196.927.289
	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	101.397.130
	- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.119.973.654
	- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	497.064.673,00

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 didukung jumlah personil sebanyak 35 orang. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Dukungan Personil Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	1 Orang
2.	Sekretaris	Pembina, IV/b	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
		Pembina, IV/a	1 Orang



No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
		Penata Tingkat I, III/d	1 Orang
4.	Kasubag/Fungsional	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
		Penata Tingkat I, III/d	2 Orang
		Penata, III/c	2 Orang
		Penata Muda Tingkat I, III/b	1 Orang
5.	Pelaksana	Pembina, IV/a	1 Orang
		Penata Tingkat I, III/d	4 Orang
		Penata, III/c	3 Orang
		Penata Muda Tingkat I, III/b	3 Orang
		Penata Muda, III/a	8 Orang
		Pengatur Tingkat I, II/d	2 Orang
		Pengatur, II/c	1 Orang
		Pengatur Muda Tingkat I, II/b	1 Orang
		Juru, I/c	1 Orang
JUMLAH			35 Orang

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Pemutakhiran data di lapangan yang memerlukan biaya untuk secara berkala bisa turun ke wilayah-wilayah, terutama data peserta didik kesetaraan yang masih sangat kurang akurat
2. Penghitungan kebutuhan belum benar-benar dimengerti.

Solusi

1. Perlunya pemuktahiran data untuk pencapaian target SPM;
2. Perlunya pelatihan-pelatihan untuk perencanaan.



4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- Pelayanan kesehatan balita;
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- Pelayanan kesehatan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

4.2.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)
1	2	3	4
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)
1	2	3	4
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100,00
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang didapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Realisasi capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	21,53	45,10	76,95	93,87
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	24,85	43,01	73,57	95,18
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	26,59	42,50	74,57	96,18
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	43,24	90,28	91,23	94,47
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	27,25	87,42	87,88	86,68
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	23,05	45,40	68,82	86,70



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	34,55	57,55	78,84	93,96
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	23,46	32,29	45,71	96,54
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	31,68	56,68	82,45	96,76
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100,00	53,88	69,07	73,57	95,64
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	20,17	42,95	64,70	82,55



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Pelayanan kesehatan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	17,89	40,91	61,70	77,24

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2025 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 6.110.240.270,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.110.240.270
A.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.110.240.270
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.696.951.176
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.432.488.250
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	73.424.282
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	197.252.262
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.026.765.278
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	97.600.591



No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	528.600.0000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	35.109.154
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	68.708.726
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	356.050.000
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	302.800.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	77.092.551
13.	Koordinasi dan Sikronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	217.398.000

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 didukung jumlah personil sebesar 64 Orang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Dukungan Personil Dinas Kesehatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	1 Orang
2.	Sekretaris	Pembina, IV/a	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Pembina, IV/a	2 Orang
		Penata Tingkat I, III/d	1 Orang
		Penata, III/c	1 Orang
4.	Kasubag/Fungsional	Pembina Tingkat I, IV/b	2 Orang
		Pembina, IV/a	1 Orang
		Penata Tingkat I, III/d	2 Orang
		Penata, III/c	1 Orang



No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
		Penata Muda Tingkat I, III/b	1 Orang
5.	Pelaksana	Penata, III/c	5 Orang
JUMLAH			64 Orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraannya pelayanan di bidang kesehatan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesehatan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tahun 2025 di Kabupaten Bolaang Mongondow belum mencapai target 100% sebagaimana ketentuan dalam peraturan tentang SPM. Permasalahan dalam pencapaian target tersebut disebabkan :

- Pencapaian 12 Indikator SPM belum mencapai target disebabkan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar belum semua terpenuhi, jumlah rasio SDM Kesehatan dibanding jumlah penduduk masih kurang, adanya kekurangan vaksin beberapa antigen yang tidak dapat diberikan kepada sasaran tepat waktu;
- Pelaksanaan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bolaang Mongondow belum optimal, dimana ada sebagian indikator berkaitan dengan standar kualitas belum tersedia terkait SDM Kesehatan yang belum terlatih sementara pembiayaan logistik penunjang masih terbatas;
- Realisasi Anggaran yang diinput adalah realisasi sub kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten, sehingga belum menggambarkan realisasi anggaran seluruhnya dengan kegiatan yang di laksanakan di Puskesmas. Realisasi anggaran seluruhnya (Kabupaten dan Puskesmas) akan di sesuaikan pada triwulan IV.

Solusi

Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow telah berupaya melakukan perencanaan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan melakukan monitoring secara berkala pada capaian indikator SPM tersebut.

Beberapa indikator SPM telah dicapai namun hasil pencapaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui upaya-upaya:

- Upaya dalam pengendalian penyakit menular dengan peningkatan survailance aktif di Rumah Sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan serta penemuan kasus TB Paru.



- b. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, merata, terjangkau dan berkeadilan melalui berbagai program yang meliputi: Akreditasi Puskesmas, Peningkatan Puskesmas PONED, Pengadaan alat-alat kesehatan serta pendidikan dan pelatihan tenaga medis.
- c. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan.
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi di Puskesmas.
- e. Membangun sistem informasi kesehatan dengan menggunakan teknologi sehingga menghasilkan satu data kesehatan.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah;

4.3.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)
1	2	3	4
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,00
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00



4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang didapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Realisasi capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,00	10	10,60	75	100
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00	0	44,77	88,89	100

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2025 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 6.642.795.863,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.625.499.003
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.625.499.003
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	564.056.003



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500.000.000
	Perluasan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.561.443.000
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.017.296.860
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.017.296.860
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.658.220.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	359.076.860

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 didukung jumlah personil sebanyak 13 orang.

Tabel 4.3

Dukungan Personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan SPM bidang urusan pekerjaan umum

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	1 Orang
2.	Sekretaris	Pembina Tkt. I, IV/b	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Pembina, IV/a	1 Orang
4.	Kasubag /Fungsional	Penata Tkt. I, III/d	2 Orang
5.	Pelaksana	Penata Tkt I, III/d	1 Orang
		Penata, III/c	1 Orang
		Penata Muda Tkt I, III/b	1 Orang
		Pengatur Tkt I, II/d	1 Orang



No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
		Pengatur, II/c	1 Orang
JUMLAH			13 Orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pembangunan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pekerjaan umum mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- Belum sinerginya upaya implementasi

Solusi

Perlunya intervensi sumber dana diluar APBD untuk perluasan cakupan layanan air minum dan sanitasi.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat tahun 2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)
1	2	3	4
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang didapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Realisasi capaian SPM bidang urusan perumahan rakyat tahun 2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00	80	75	60,83	68,33
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00	0	50	75	100



4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2025 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat berjumlah Rp139.272.978,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	139.272.978
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	24.272.978
	- Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	7.628.630
	- Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	5.656.470
	- Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.099.754
	- Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.888.124
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	115.000.000
	- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	15.000.000
	- Pembangunan rumah bagi korban bencana	100.000.000

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 mendapat dukungan personil sebanyak 25 orang. Adapun daftar personil tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Dukungan personil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan SPM bidang urusan perumahan rakyat

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	1 Orang
2.	Sekretaris	Pembina Tkt. I, IV/b	1 Orang



No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
3.	Kepala Bidang	Pembina Tkt I, IV/b	1 Orang
		Pembina, IV/a	2 Orang
4.	Kepala Seksi/Fungsional	Pembina, IV/a	1 Orang
		Penata Tingkat I, III/d	8 Orang
		Penata Muda Tkt I, III/b	1 Orang
		Penata Muda, III/a	1 Orang
5.	Pelaksana	Penata, III/c	1 Orang
		Penata Muda Tkt. I, III/b	2 Orang
		Penata Muda, III/a	2 Orang
		Pengatur Tkt I, II/d	4 Orang
JUMLAH			25 Orang

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana yang tertangani di tahun 2025 ada 1 rumah dari 2 yang direncanakan. Dari Dinas telah memberikan bantuan sesuai dengan prosedur yang ada, namun saat proses tahap penyaluran penerima bantuan menyatakan tidak siap untuk melanjutkan proses dan tahapan karena ada masalah internal dari penerima bantuan yang dikhawatirkan akan berdampak bagi proses pembangunan yang akan berlangsung;
- Tahapan pengumpulan data korban bencana tidak maksimal dikarenakan kekurangan Sumber Daya ASN;
- Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua standar pelayanan minimal terpenuhi;
- Dalam pelaksanaan masih kurangnya personil.

Solusi



- a. Melakukan pendekatan kualitatif dan menganggarkan kembali kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian urusan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pengajuan alokasi anggaran kegiatan SPM pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat;
- c. Merencanakan penambahan personil pegawai dalam pemenuhan capaian SPM.

4.5 Urusan Trantibum dan Linmas

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan pada 2 (dua) perangkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

4.5.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.



1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai berikut:

Target pencapaian SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)
1	2	3	4
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai berikut:

Target pencapaian SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)
1	2	3	4
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100,00
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00



4.5.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang didapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	83,33	1,78	86,94	96,33
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	52,15	3,33	89,48	94,35
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	1,51	0	60,60	98,13



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow
Realisasi capaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	36,09	0	92,76	100
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	76,50	0	90,49	90,74

4.5.4 Alokasi Anggaran

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi anggaran tahun 2025 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah Rp. 1.320.147.809,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1.320.147.809
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	226.536.872
	- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	81.234.287



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
	- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	145.302.585
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	473.169.438
	- Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	401.155.967
	- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	18.833.000
	- Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	28.187.544
	- Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	24.992.927
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	620.441.499
	- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	45.034,211
	- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	575.407.288

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Alokasi anggaran tahun 2025 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah Rp 239.405.523,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	170.731.395
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.858.538
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	116.858.538



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	53.872.857
	- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	53.872.857
2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	68.674.128
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.674.128
	- Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	68.674.000

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dibutuhkan personil untuk pelaksanaannya.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 didukung jumlah personil sejumlah 43 orang. Yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Dukungan personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	1 Orang
2.	Sekretaris	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Penata Tingkat I, III/d	3 Orang
4.	Kasubag/Kasie/Fungsional	Penata Tingkat I, III/d	3 Orang
		Penata, III/c	3 Orang
5.	Pelaksana	Penata Tingkat I, III/d	1 Orang
		Penata Muda Tingkat I, III/b	1 Orang
		Pengatur Muda Tingkat I, II/d	4 Orang



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
		Pengatur, II/c	3 Orang
		Non Golongan	23 Orang
JUMLAH			43 Orang

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 didukung jumlah personil sejumlah 109 orang. Yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Kasat Pol-PP	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
2.	Sekretaris	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
		Pembina, IV/a	1 Orang
		Penata Tingkat I, III/d	1 Orang
4.	Kasubag/Kasie/ Fungsional	Penata Tingkat I, III/d	4 Orang
		Penata, III/c	4 Orang
5.	Pelaksana	Penata Muda, III/a	5 Orang
		Pengatur Tingkat I, II/d	1 Orang
		Pengatur, II/c	5 Orang
		Pengatur Muda Tingkat I, II/b	2 Orang
		Pengatur Muda, II/a	1 Orang
		Non Golongan	82 Orang
JUMLAH			109 Orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

- a. Keterbatasan Personel dan Anggaran: Jumlah anggota Damkar Kabupaten Bolaang Mongondow yang tidak sebanding dengan luas wilayah/jumlah penduduk yang harus diawasi. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sarana prasarana seperti



- kendaraan damkar, jumlah Hydrant yang tersedia, serta alat pelindung diri;
- b. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua standar pelayanan minimal terpenuhi;
 - c. Keterbatasan jumlah Personel dan Sarana Prasarana: Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Bolaang Mongondow yang tidak sebanding dengan luas wilayah/jumlah penduduk yang harus diawasi. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sarana prasarana seperti kendaraan patroli, dan ketiadaan gedung kantor yang mandiri;
 - d. Keterbatasan Anggaran yang berdampak pada minimnya tunjangan kesejahteraan bagi para Anggota Satpol PP;
 - e. Penyebab utama Tidak Tercapainya Layanan Damkar adalah karena minimnya jumlah armada (unit damkar) serta peralatan/perlengkapan damkar, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pelayanan damkar. Yang mana Bidang Damkar Kab Bolaang Mongondow hanya memiliki 3 unit damkar (yang tersebar di 3 pos/kecamatan. Sementara Kab Bolaang Mongondow memiliki luas wilayah yang sangat luas, terdiri dari 15 kecamatan. Itu berarti bahwa idealnya harus memiliki 15 unit dan 15 pos agar dapat melaksanakan pelayanan dengan maksimal;
 - f. Tidak terealisasinya usulan pembangunan Gedung kantor, gudang logistik dan PUSDALOPS BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - g. Terbatasnya anggaran belanja untuk pengadaan Sarana dan Prasarana sebagai alat Penunjang dalam melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanganan darurat Bencana di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Solusi

- a. Menambah jumlah personil dan sarana prasarana Damkar;
- b. Sekiranya anggaran untuk OPD Satpol PP dan Damkar yang memangku tanggung jawab di Bidang Trantibumlinmas dan Damkar, kiranya dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi;
- c. Penambahan jumlah personil anggota Satpol PP dan sarana prasarananya;
- d. Membangun gedung kantor, gedung logistik dan PUSDALOPS BPBD agar dapat terpusat kegiatannya.



4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Sosial Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Target pencapaian SPM bidang urusan sosial

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)
1	2	3	4
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**TAHUN
2025**

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)
1	2	3	4
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100,00
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100,00

4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang didapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Realisasi capaian SPM bidang urusan sosial tahun 2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	85,20	85,20	93,85	98,46
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	0,00	0	98,33	98,33
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	0	0	96,92	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100,00	0	0	98,33	100



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2025 (%)	Capaian TW 1 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 2 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 3 Tahun 2025 (%)	Capaian TW 4 Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100,00	0	96	96	100

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2025 di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah Rp247.984.776,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	247.984.776
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	19.616.826
	- Penyediaan permakanan	9.961.476
	- Penyediaan sandang	4.665.000
	- Penyediaan Alat Bantu	4.990.350
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	228.367.950
	- Penyediaan makanan	70.270.362
	- Penyediaan sandang	123.982.560
	- Penanganan khusus bagi kelompok rentan	21.217.128
	- Pelayanan dukungan Psikososial	12.897.900



4.6.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 didukung jumlah personil sebanyak 22 orang ASN. Keadaan pegawai dilihat dari pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Dukungan Personil Dinas Sosial dalam Pelaksanaan SPM Urusan Sosial

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	1 Orang
2.	Sekretaris	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
		Pembina, IV/a	1 Orang
		Penata Tingkat I, III/d	2 Orang
4.	Kasubag / Kasie / Fungsional	Penata Tingkat I, III/d	5 Orang
		Penata, III/c	1 Orang
5.	Pelaksana	Penata, III/c	1 Orang
		Penata Muda, III/a	4 Orang
		Pengatur Tingkat I, II/d	1 Orang
		Pengatur, II/c	2 Orang
		Non Golongan	2 Orang
JUMLAH			22 Orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Masalah yang dihadapi selama tahun 2025 antara lain adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan data yg masuk DTKS dan belum Masuk DTKS belum terverifikasi dan tervalidasi dengan baik;
- Kurangnya SDM yang ada;
- Minimnya anggaran;
- Penghitungan kebutuhan belum terlaksana dengan baik dikarenakan data yang belum valid;
- Terkendala pada minimnya anggaran;
- Perencanaan dan penganggaran terkendala pada data yang belum valid.

Solusi

Solusi dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:



1. Melakukan pendataan dan verifikasi dilapangan terkait dengan keterlantaran, gepeng dan pengemis yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Melakukan permintaan penambahan pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow untuk pemenuhan capaian SPM.

4.7 Program dan Kegiatan

1. Bidang Urusan Pendidikan

Program kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	33.446.170.629	29.282.889.855	87,50 %
A.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	16.319.355.933	13.935.656.859	85,39 %
	- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	62.856.788	62.520.216	99,46 %
	- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	903.649.997	647.369.413	71,64 %
	- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.159.135.700	5.146.021.712	99,75 %
	- Pembangunan Ruang Kelas Baru	422.532.000	402.065.760	95,16 %
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.854.920.000	5.209.535.239	88,98 %
	- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.800.000.000	1.800.000.000	100 %
	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.573.710.502	378.176.819	24,03 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
	- Pengembangan konten digital untuk pendidikan	45.511.359	0	0 %
	- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	213.815.200	210.766.500	98,57 %
	- Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	283.224.447	79.201.200	27,96 %
B.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.728.516.563	13.554.736.937	92,03 %
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.443.455.795	2.280.428.524	93,33 %
	- Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	827.127.876	631.646.891	76,37%
	- Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.852.091.000	2.598.979.046	91,13 %
	- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5.045.601.000	5.045.601.000	100 %
	- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.800.000.000	1.800.000.000	100 %
	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.760.240.892	1.198.081.476	68,06 %
C.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.418.298.073	1.792.496.059	74,12 %
	- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.196.927.289	790.983.298	66,08 %
	- Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	101.397.100	9.343.000	9,21 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
	- Pembinaan Kelembagaan dan Manajeen PAUD	1.119.973.654	992.169.761	88,59 %
JUMLAH		33.466.170.629	29.282.889.855	87,50 %

2. Bidang Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025 sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.110.240.270	4.452.808.707	72,88 %
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.110.240.270	4.452.808.707	72,88 %
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.696.951.176,00	1.506.697.912,00	88,79 %
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.432.488.250,00	336.630.000,00	23,50 %
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	73.424.282,00	46.368.694,00	63,15 %
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	197.252.262,00	140.904.030,00	71,43 %
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.026.765.278,00	919.918.569,00	89,59 %
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	97.600.591,00	63.356.322,00	64,91 %
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	528.600.000,00	501.700.000,00	94,91 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	35.109.154,00	27.116.758,00	77,24 %
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	68.708.726,00	53.242.642,00	77,49 %
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	356.050.000,00	331.200.000,00	93,02 %
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	302.800.000,00	294.150.000,00	97,14 %
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	77.092.551,00	73.445.506,00	95,27 %
13.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	217.398.000,00	158.078.274,00	72,71 %
JUMLAH		6.110.240.270,00	4.452.808.707,00	72,87 %

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
I.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.625.499.003.00	1.518.307.175,00	57,83 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.625.499.003.00	1.518.307.175,00	57,83 %
	- Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	564.056.003.00	113.083.600,00	20,05 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
	- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500.000.000.00	500.000.000,00	100,00 %
	- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.561.443.00.00	905.223.575,00	57,97 %
II.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.017.296.860	4.005.110.000	99,70 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.017.296.860	4.005.110.000	99,70 %
	- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.658.220.000.00	3.658.220.000,00	100,00 %
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domes	359.076.860.00	346.890.000,00	96,61 %
JUMLAH		6.642.795.863,00	5.523.417.175,00	83.15 %

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM bidang urusan perumahan rakyat tahun 2025 sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	139.272.978,00	85,281,470,00	61,23 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	24.272.978,00	20,281,470,00	83,56 %
	- Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	7.628.630,00	6,000,000,00	78,65 %
	- Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	5.656.470,00	5,656,470,00	100,00 %
	- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5.099.754,00	3,750,000,00	73,53 %
	- Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5.888.124,00	4,875,000,00	82,79 %
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	115.000.000,00	65,000,000,00	56,52 %
	- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	15.000.000,00	15,000,000,00	100,00 %
	- Pembangunan rumah bagi korban bencana	100.000.000,00	50,000,000,00	50,00 %
JUMLAH		139.272.978,00	85,281,470,00	61,23 %

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 sebagai berikut:



1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1.320.147.809.00	1.166.000.351,00	88,32 %
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	226.536.872.00	131.942.655,00	58,24 %
	- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	81.234.287.00	0,00	0,00%
	- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	145.302.585.00	131.942.655,00	90,81 %
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	473.169.438.00	423.332.840,00	89,47 %
	- Respon cepat darurat bencana Kabupaten/ Kota	401.155.967.00	399.105.277,00	99,49 %
	- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota	18.833.000.00	0,00	0,00%
	- Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota	28.187.544.00	610,50	2,17 %
	- Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	24.992.927.00	23.617.063,00	94,49 %
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	620.441.499.00	610.724.856,00	98,43 %
	- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	45.034.211.00	44.188.207,00	98,12 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
	- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	575.407.288,00	566.536.649,00	98,46 %
JUMLAH		1.320.147.809,00	1.166.000.351,00	88,32 %

2. Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	170.731.395,00	169.768.545,00	99,44 %
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.858.538,00	116.415.690,00	99,62 %
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	116.858.538,00	116.415.690,00	99,62 %
	- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	53.872.857,00	53.352.855,00	99,03 %
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	53.872.857,00	53.352.855,00	99,03 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	68.674.128,00	67.894.530,00	98,86 %
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.674.128,00	67.894.530,00	98,86 %
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	68.674.128,00	67.894.530,00	98,86 %
JUMLAH		239.405.523,00	237.663.075,00	99,27 %

6. Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025 sebagai berikut:

N O	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
I.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	43.715.826,00	42.384.080,00	96,95 %
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	43.715.826,00	42.384.080,00	96,95 %
	- Penyediaan permakanan	9.961.476,00	9.415.610,00	94,52 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN
2025**

N O	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN
	- Penyediaan sandang	4.665.000,00	4.031.745,00	86,43 %
	- Penyediaan alat bantu	29.089.350,00	28.936.725,00	99,48 %
II.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	228.367.950,00	219.379.261,00	96,06 %
	- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	228.367.950,00	219.379.261,00	96,06 %
	- Penyediaan makanan	70.270.362,00	69.213.511,00	98,50 %
	- Penyediaan sandang	123.982.560,00	123.864.900,00	99,91 %
	- Penanganan khusus bagi kelompok rentan	21.217.128,00	21.050.850,00	99,22 %
	- Pelayanan dukungan Psikososial	12.897.900,00	5.250.000,00	40,70 %
JUMLAH		315.799.602,00	304.147.421,00	96,31 %



**BAB
V**

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan berbagai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan menunjukkan berbagai capaian yang positif. Hal ini tercermin dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun keterbatasan sumber daya.

Berbagai capaian yang telah diraih pada Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan akan menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar lebih efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah akan terus berupaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN
2025

Akhirnya, melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan **Visi Bolaang Mongondow JUARA “Bolaang Mongondow Maju dan Sejahtera”**.

Sukur Mo'anto Sukur Mo barong

CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

KABUPATEN

: BOLAANG MONGONDOW

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
1	PENDIDIKAN	1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini, 6.922 ----- x 100% Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten yang bersangkutan, 7.772	89.06%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas Dukcapil
		2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar, 31.714 ----- x 100% Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan, 36.675	86.47%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas Dukcapil
		3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, 341 ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah, 465	73.33%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		4	Persentase toilet sekolah dasar, sekolah menengah pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet sekolah dasar, sekolah menengah pertama dalam kondisi baik, 616 ----- x 100% Jumlah seluruh toilet, 842	73.16%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		5	Persentase ruang kelas sekolah dasar, sekolah menengah dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas sekolah dasar, sekolah menengah pertama dalam kondisi baik, 1.415 ----- x 100% Jumlah ruang kelas, 1.859	76.12%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN	1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N, 9 ----- x 100% Jumlah ibu melahirkan tahun N, 3.301	0.27%	Sumber Data Dinas Kesehatan
		2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, 30 ----- x 100% Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama, 15.513	0.19%	Sumber Data Dinas Kesehatan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		3	Persentase pelayanan kesehatan Ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator), 3.460 ----- x 100% Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama, 4.339	79.74%	Sumber Data Dinas Kesehatan
		4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun, 3.301 ----- x 100% Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama, 4.300	76.77%	Sumber Data Dinas Kesehatan
		5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun, 3.250 ----- x 100% Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama, 4.035	80.55%	Sumber Data Dinas Kesehatan
		6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1+ jumlah balita usia 24-35 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ balita usia 36-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 3, 12.882 ----- x 100% Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama, 15.395	83.68%	Sumber Data Dinas Kesehatan
		7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran, 33.371 ----- x 100% Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama, 37.157	89.81%	Sumber Data Dinas Kesehatan
		8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten / kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun, 136.038 ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun, 167.595	81.17%	Pembilang Dinas Kesehatan, Penyebut Capil
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator), 30.517 ----- x 100% Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator), 32.000	95.37%	Pembilang Dinas Kesehatan, Penyebut Capil

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun, 17.896 -----x 100% Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama, 17.896	100%	Pembilang Dinas Kesehatan
		11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun, 6.070 ----- x 100% Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun, 6.070	100%	Pembilang Dinas Kesehatan
		12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun, 390 ----- x 100% Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat berdsarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama, 390	100%	Sumber Data Dinas Kesehatan
		13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis sesuai standar	Jumlah orang terduga tuberkolosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun, 5.755 ----- x 100% Jumlah perkiraan orang yang terduga tuberkolosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama, 7214	79.78%	Sumber Data Dinas Kesehatan
		14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien infeksi menular seksual, pasien TBC, Wanita Pekerja Seks, Lelaki Seks dengan lelaki, pengguna narkotika suntik, warga binaan pemasyarakatan dan trans gender/waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun, 4.182 ----- x 100% Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien infeksi menular seksual, pasien TBC, Wanita Pekerja Seks, Lelaki Seks dengan lelaki, pengguna narkotika suntik, warga binaan pemasyarakatan dan trans gender/waria) di kabupaten/kota dalam waktu satu tahun yang sama, 5.099	82.02%	Sumber Data Dinas Kesehatan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten / kota dalam kondisi baik (Ha), 3.248 ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten / kota (Ha), 9.231	35.19%	Sumber Dtaa Dinas PU & PR
		2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten / kota (Km), 406,21 ----- x 100% Panjang jalan kewenangan kabupaten / kota (Km), 682,71	59.50%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten / kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan terlindungi di kabupaten kota pada tahun N, 173.124 ----- x 100% Jumlah total penduduk kabupaten / kota, 258.561	66.96%	Pembilang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyebut Disudkcapil
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD, 31.739 ----- x 100% Jumlah rumah di kabupaten, 58.877	53.91%	Pembilang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha), 340 ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha). 340	100%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten / kota (ha), 1.620,63 ----- x 100% Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha), 8.103,15	20%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7	Persentase kepatuhan persetujuan bangunan gedung kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya, 42 ----- x 100% Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku, 42	100%	Sumber Data Dinas PUPR

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		8	Persentase persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan, 0 ----- x 100% Jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, 0	0%	Sumber Data Dinas PUPR
		9	Persentase tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis, 73 ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota, 78	93.59%	Sumber Data Dinas PUPR
		10	Persentase penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun, 10 ----- x 100% Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun, 31	32.26%	Sumber Data Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modan dan PTSP
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N, 2 ----- x 100% Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N, 4	50%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha), 14.32 ----- x 100% Target luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha pada tahun N, 27.25	52.55%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		3	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun N, 44 ----- x 100% Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun N, 2.379	1.85%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum di tahun N, 0 ----- x 100% Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N, 5	0%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N, 2 ----- x 100% Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	66.67%	Sumber data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
6	SOSIAL	2	Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja	Jumlah pengaduan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, 5 ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan, 5	100%	Sumber data dari Satpol PP
		3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan, 3 ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi, 3	100%	Sumber data Satpol PP
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 101.415 ----- x 100% Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan, 163.500	62.03%	Sumber Data BPBD
		5	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 5.782 ----- x 100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana, 5.782	100%	Sumber Data BPBD
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, 6 ----- x 100% Total kejadian kebakaran di Kabupaten, 7	35.29%	Sumber data Satpol PP
		1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti, 72 ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti, 72	100%	Sumber data Dinas Sosial
		2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti, 30 ----- x 100% Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti, 30	100%	Sumber data Dinas Sosial
		3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti, 100 ----- x 100% Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti, 100	100%	Sumber data Dinas Sosial

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti, 100 ----- x 100% Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti, 100	100%	Sumber data Dinas Sosial
		5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran, 212 ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten, 212	100%	Sumber data Dinas Sosial
		6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar, 48.469 ----- x 100% Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentasn yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota, 48.469	100%	Sumber data Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
1	TENAGA KERJA	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD, 1 ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten, 1	100%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, 66 ----- x 100% Jumlah Perusahaan, 151	43.71%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, 8.039 ----- x 100% Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, 14.545	55.27%	Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif, 28 ----- x 100% Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun). 28	100%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Keuangan Daerah

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		2	Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif, 11 ----- x 100% Jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, 11	100%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
3	PANGAN	1	Persentase ketersediaan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, 8.31 ----- x 100% Jumlah target cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, 79.1	10.51%	Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan
4	PERTANAHAN	1	Persentase ditetapkan hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah, 1.146.886 ----- x 100% Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah, 5.336.972,33	21.49%	Sumber Badan Keuangan Daerah
		2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting, 2.919.483.600 ----- x 100% Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, 3.385.691.141,07	86.23%	Sumber Data Dinas PUPR
		3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah rencana detail tata ruang yang sudah legal, 1 ----- x 100% Jumlah rencana detail tata ruang yang diamanatkan dalam rencana tata ruang wilayah, 4	25%	Sumber data Dinas PUPR
5	LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten, 14 ----- x 100% Jumlah Target tahunan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung, 58	24.14%	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
		2	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle, Pusat Daur Ulang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/ Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Refuse Derived Fuel, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu kabupaten/kota atau Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di wilayah kabupaten/kota, 1.350 ----- x 100% Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota, 129.282	1.04%	Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akte kelahiran yang diterbitkan, 64.643 ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun, 65.633	98.49%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2	Persentase kepemilikan kartu identitas naka (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak, 36.044 ----- x 100% Jumlah anak wajib kartu identitas anak, 59.835	60.24%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		3	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan, 1 ----- x 100% 2 dokumen	50%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, 174.990 ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas, 197.892	88.43%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan, 13.900 ----- x 100% Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan, 13.900	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan, 90.344 ----- x 100% Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan, 128.463	70.33%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan, 2.354 ----- x 100% Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan, 3.545	66.40%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa yang tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun, 1 ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n), 3	33.33%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun, 11 ----- x 100% Jumlah Desa berkembang (per awal tahun n), 37	29.73%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku, 61 ----- x 100% Jumlah kerja sama desa yang ditangani, 69	88.41%	Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	1	TFR (Angka Kelahiran Total) per wanita usia subur 15-49 tahun	Total Fertility Rate / TFR Kabupaten/kota, 1.628824 ----- x 100% Target Fertiliy Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan, 2.43	67.03%	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mPCR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern, 24.114 ----- x 100% Total pasangan usia subur usia 15— 49 tahun, 35.640	67.66%	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten /kota, 11.89 ----- x 100% Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten /kota yang bersangkutan, 17.4	68.33%	Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
9	PERHUBUNGAN	1	Konektivitas Kabupaten	$KTDaerah = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$ KTD = Konektivitas Transportasi Darat WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah dengan satuan %) KTL = Konektivitas Transportasi Laut WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan 0%) $Jumlah\ WTD + WTL = 100\%$	0	Dinas Perhubungan
		2	Volume / Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten / Kota	0,01	Dinas Perhubungan
		3	Persentase jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	$\frac{Jumlah\ perusahaan\ angkutan\ umum\ yang\ tersertifikasi\ sistem\ manajemen\ keselamatan}{Jumlah\ perusahaan\ angkutan\ umum\ yang\ terdata\ 0} \times 100\%$	0%	Dinas Perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{Jumlah\ Perangkat\ Daerah\ (PD)\ dan\ atau\ unit\ pelaksana\ teknis\ daerah\ yang\ terhubung\ dengan\ akses\ internet\ yang\ disediakan\ oleh\ Dinas\ Komunikasi\ dan\ Informatika.\ 33}{Jumlah\ Organisasi\ Perangkat\ Daerah\ atau\ unit\ pelaksana\ teknis\ daerah,\ 47} \times 100\%$	70.21%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integritas	$\frac{Jumlah\ Layanan\ Publik\ yang\ diselenggarakan\ secara\ online\ dan\ terintegrasi,\ 62}{Jumlah\ Layanan\ Publik,\ 63} \times 100\%$	98.41%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	$\frac{Jumlah\ masyarakat\ yang\ menjadi\ sasaran\ penyebaran\ informasi\ publik,\ mengetahui\ kebijakan\ dan\ program\ prioritas\ pemerintah\ dan\ pemerintah\ daerah\ kabupaten,\ 153.967}{Jumlah\ Penduduk,\ 181.271} \times 100\%$	84.94%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika / Dinas Disdukcapil
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	$\frac{£\ Volume\ usaha\ koperasi\ tahun\ berjalan - £\ Volume\ usaha\ koperasi\ tahun\ sebelumnya,\ (430.900.500-390.900.500=40.000.000)}{£\ Volume\ usaha\ koperasi\ tahun\ sebelumnya,\ 390.900.500} \times 100\%$	10.23%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
		2	Persentase usaha yang bertransformasi dari informal ke formal	$\frac{£\ Usaha\ mikro\ yang\ memperoleh\ Nomor\ Induk\ Berusaha\ (NIB),\ 1.536}{£\ Usaha\ Mikro,\ 11.998} \times 100\%$	12.80%	Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM
12	PENANAMAN MODAL	1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	$\frac{(Jumlah\ nilai\ investasi\ tahun\ N - jumlah\ nilai\ investasi\ tahun\ N-1)\ di\ kabupaten/kota\ (12.865.861.597.662 - 12.552.747.887.510 = 313.113.710.152)}{Jumlah\ nilai\ investasi\ tahun\ N-1\ di\ kabupaten/kota,\ 12.552.747.887.510} \times 100\%$	2.49%	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP □

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota, 313.113.710.152 ----- x 100% Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan, 300.000.000.000	104.37%	Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP □
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten, 300 ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten, 1287	23.31%	Sumber Data Dinas Pemuda dan Olahraga
		2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten, 161 ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten, 67.521	0.24%	Sumber Data Dinas Pemuda dan Olahraga / Disdukcapil
		3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk pemusatan latihan daerah provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk pemusatan latihan daerah provinsi, 3 ----- x 100% Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga), 142	2.11%	Sumber Data Dinas Pemuda dan Olahraga
		4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali, 5 ----- x 100% Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional, 6	83.33%	Sumber Data Dinas Pemuda dan Olahraga
14	STATISTIK	1	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum sata data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah, 531 ----- x 100% Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah, 531	100%	Sumber Data Dinas Kominfo
15	PERSANDIAN	1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	Nilai indeks Kemanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi, 0 ----- x 100% Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	0%	Sumber Data Dinas Komunikasi dan Informatika
16	KEBUDAYAAN	1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan, 0 ----- x 100% Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan, 0	0%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N} - \text{jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1, (0-0 = 0)}}{\text{Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1, 0}} \times 100\%$	0%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17	PERPUSTAKAAN	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	TKM = ((0.15 x Pra Membaca) + (0.50 x saat membaca) + (0.35 x pasca membaca) x 100	58.32	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	IPLM = ((0.30 x dimensi kepatuhan) + (0.70 x dimensi kinerja) x 100	4.38	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	KEARSIPAN	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps.40 dan 39 UU 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	61.48	Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN						
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (ton), 11.727,33 $\frac{\text{Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (ton), 11.727,33}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (ton), 13.367}} \times 100\%$	87.73%	Sumber Data Dinas Perikanan
		2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kep/Th)	Konsumsi per kapita = jumlah ikan yang dikonsumsi rumah tangga per kapita setara utuh segar dalam periode 1 tahun berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional penimbang individu = nilai yang menggambarkan keterwakilan sampel di dalam populasi jumlah penduduk = jumlah seluruh penduduk di lingkup populasi sampel	54.14	Sumber Data Dinas Perikanan
2	PARIWISATA	1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), 13.227.790.100 $\frac{\text{Realisasi investasi Tahun N, 313.113.710.152}}{\text{Realisasi investasi Tahun N-1, 60}} \times 100\%$	4.22%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun N} - \text{Jumlah wisatawan asing tahun N-1 (97-60=37)}}{\text{Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun N-1, 60}} \times 100\%$	61.67%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun N} - \text{Jumlah wisatawan N-1, (21.300-25.385 = -4.085)}}{\text{Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun N-1, 25.385}} \times 100\%$	-16.09%	Sumber Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
3	PERTANIAN	1	Peningkatan produksi tanaman pangan	$\frac{\text{Produksi tanaman pangan tahun N} - \text{Produksi tanaman pangan tahun N-1}, (507.016,49-488.392,22 = 18.624,27)}{\text{Produksi tanaman pangan tahun N-1}, 488.392,22} \times 100\%$	3.81%	Sumber Data Dinas Pertanian
		2	Peningkatan produksi holtikultura	$\frac{\text{Produksi holtikultura tahun N} - \text{Produksi holtikultura tahun N-1}, (21.582,13-19.267,32=2.314,81)}{\text{Produksi holtikultura tahun N-1}, 19.267,32} \times 100\%$	12.01%	Sumber Data Dinas Pertanian
		3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	$\frac{\text{Produksi komoditas peternakan tahun N} - \text{Produksi komoditas peternakan tahun N-1}, (3.909,53-3.001,05 = 908,48)}{\text{Produksi komoditas peternakan tahun N-1}, 3.001,05} \times 100\%$	30.27%	Sumber Data Dinas Pertanian
		4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilance penyakit hewan menular strategis (PHMS)	$\frac{\text{Luas wilayah terkendali dari penyakit menular strategis tahun N}, 0}{\text{Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}, 0} \times 100\%$	0%	Sumber Data Dinas Pertanian
4	PERDAGANGAN	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}, 859}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten}, 4.511} \times 100\%$	19.04%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
5	PERINDUSTRIAN	1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut: 1. Pertumbuhan PDRB 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Non Migas 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	0%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui sistem informasi industri nasional	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha inndustri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui sistem informasi industri nasional}, 78}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah}, 1.737} \times 100\%$	4.49%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten / kota	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun N} - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1}, (1.737-1.686 = 51)}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1}, 1.686} \times 100\%$	3.02%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM
		4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	$\frac{\text{Nilai investasi sektor industri}, 305.181.294.040}{\text{Total investasi seluruh sektor}, 313.113.710.152} \times 100\%$	97.47%	Sumber Data Dinas Perdagangan dan ESDM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	PERENCANAAN	1	Persentase kesesuaian antara rencana kerja pemerintah dengan anggaran pendapatan belanja daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan, 16 ----- x 100% Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden, 17	94.12%	Sumber data Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	KEUANGAN	1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus profesi guru dan tunjangan sejenisnya yang bersumber dari transfer ke daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah (TKD), 451.394.315.867,88 ----- x 100% Anggaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, 1.197.627.995.761,39	37.69%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah
		2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi pendapatan asli daerah, 78.367.609.139,11 ----- x 100% realisasi pendapatan daerah, 1.156.102.906.144,11	6.78%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah
		3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N, 600.911.525.240,95 ----- x 100% Total realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun N, 1.093.880.623.940,95	54.93%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah
		4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokakksi belanja infrastruktur pelayanan publik, 240.005.038.161,85 ----- x 100% Total belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, 960.989.003.637,39	24.97%	Sumber Data Badan Keuangan Daerah
3	KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	Persentase aparatur sipil negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), 1.020 ----- x 100% Jumlah aparatur sipil negara (Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), 1.782	57.24%	Sumber Data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah, 19 ----- x 100% Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah, 19	100%	Sumber Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
5	PENGAWASAN	1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: - - - - Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	1	Sumber Data Inspektorat Daerah
		2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Tingkatan Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: - - - - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2; Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	4	Sumber Data Inspektorat Daerah
		3	Manajemen Risiko Indeks	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: - - - - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) Manajemen Risiko, nilai capaian 1; Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3 Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4, dan Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat capaian Manajemen Risiko Indeks	1	Sumber Data Inspektorat Daerah

No	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi badan pemeriksa keuangan tahun anggaran N-1, 37 ----- x 100% Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N--1, 37	100%	Sumber Data Inspektorat Daerah
6	PENGADAAN	1	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa	35,56	Sumber Data Bagian Layanan Pengadaan
		2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	26.83	Sumber Data Bagian Layanan Pengadaan
		3	Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa	10.50	Sumber Data Bagian Layanan Pengadaan
7	HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH	1	Ketepatan waktu penetapan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun N	1. Tepat Waktu 2. Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu (100%) Tidak Tepat Waktu (0%)	Tepat Waktu	Sumber Data Badan Keuangan Daerah
		2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N, 5 ----- x 100% Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N, 11	45.45%	Sumber Data Bagian Hukum
8	PELAYANAN PUBLIK	1	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	85.18	Sumber data Bagian Organisasi